

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH
TENTANG PEMIMPIN ZALIM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun Oleh:

**Nader Arafat Hassan
2103016**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYA'RIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs. H. Abdul Fatah Idris
Ds. Tlogorejo Rt/Rw 2/12
Karangawen Demak
Rupi'i, M.Ag
Perum Griya Lestari B. 2/2
Ngaliyan Semarang

NOTA PERSTUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

A. n. Sdr, Nader Arafat Hassan

Assalamualaikum WR. WB.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nader Arafat Hassan

Nim : 2103016

Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU**

TAIMIYAH TENTANG PENGUASA ZALIM

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

(Drs. H. Abdul Fatah Idris)
NIP. 150 216 494

Pembimbing II

(Rupi'i, M.Ag.)
NIP. 150 285 611



**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.02 Semarang 50185 Telp. (024) 601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nader Arafat Hassan

NIM : 2103016

Judul Tugas Akhir : STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH
TENTANG PEMIMPIN ZALIM

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, dengan predikat cumlaude/baik /cukup pada tanggal:

28 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Semarang, 28 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

(Drs. Musahadi, M.Ag)

NIP. 150 267 754

(Rupi'i, M.Ag)

NIP. 150 285 611

Penguji I

Penguji II

(Muhammad Saifullah, M.Ag)

NIP. 150 276 621

(Ali Murtadho, M.Ag)

NIP. 150 289 379

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. H. Abdul Fatah Idris)

NIP. 150 216 494

(Rupi'i, M.Ag)

NIP. 150 285 611

MOTTO

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Artinya : “Diberitakan dari Musadda, yahya bin said, abdillah , dari Nafi, dari Abdullah Ra, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : diwajibkan mendengarkan dan mentaati bagi setiap muslim, sesuatu di senang maupun di benci selagi tidak diperintahkan berbuat maksiat, apabila di perintahkan berbuat maksiat maka tidaklah kamu mendengarkan dan mentaati.”¹

¹ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, jilid IV, Bairut: Dar Al fikr, tt hlm, 234

DEKLARASI

Dengan kesadaran hati dan rasa tanggung jawab yang tinggi,
begitu pula dengan penuh kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini
tidak berisi materi yang telah ditulis
oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun
pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat
dalam referensi yang dijadikan
sebagai bahan rujukan.

Semarang, 28 Juli 2008

Deklarator

Nader Arafat Hassan

2103016

ABSTRAK

Adanya kesewenang-wenangan penguasa dalam sebuah sistem pemerintahan yang arogan pada (abad VII H) bulan Sya'ban 726 H/ Juli 1326 M, membuat Ibnu Taimiyah bangkit untuk memberikan pemikiran-pemikirannya. Walaupun pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik, namun hal itu tidak menyurutkan semangat Ibnu Taimiyah untuk menyeru dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* ditengah-tengah kekuasaan yang ada pada masa itu.

Mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman, maka pemikiran Ibnu Taimiyah ini masih sangat relevan apabila dikaji dan diterapkan pada masa sekarang ini. Karena kezaliman tidak pernah akan habis dan berhenti selama masih adanya pemimpin yang zalim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) , dan menggunakan sumber data dalam rangka penyempurnaan kajian ilmiah yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam memakai analisa data dapat di ambil data secara *deskriptif analitis* dan *metode hermeneutika*.

Konsepsi Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim meliputi: dasar pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim, sikap Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin zalim dan hukum melawan pemimpin zalim. Al-Qur'an sebagai prinsip dasar masyarakat Islam dijadikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai rujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini pula Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemimpin yang dapat mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya "*Kepemimpinan*". Dari sinilah ada sebuah riwayat yang mengatakan enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa masyarakat dilarang untuk memberontak (perang) sehingga terjadinya pembunuhan. Karena menurutnya bisa menimbulkan kehancuran dan akan menimbulkan kezaliman yang lebih besar dan juga untuk menghindari akan terjadinya kekosongan kekuasaan. Untuk menghindari itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara tidak adil sekalipun Islam.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat, jerih payah dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- Ayahanda Abdurrahman Hassan dan Ibunda Mahani Hassan yang tercinta dan selalu mendoakan dalam perjalanan hidupku.
- Kakak-kakak ku yang selalu memberikan motivasi berharga dalam karirku.
- Dosen-dosen ku yang selalu memberikan semangat dan moral dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat ku yang selalu membantu dan memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman yang selalu memberikan ketenangan dalam hatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah akan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan, penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan penulisan sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. H. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Arif Junaidi, M.Ag, selaku Kajur Siyasah Jinayah.
4. Rupi'I, M.Ag, selaku Sekertaris Siyasah Jinayah.
5. Moch Khasan M.Ag selaku Biro judul Siyasah Jinayah yang telah merestui penulis mengangkat judul ini.
6. Drs. H. Fatah Idris dan Rupi'I M.Ag selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu beliau yang berharga semata-mata untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan hingga terselesaikan skripsi ini.

7. Ayahanda Abdurrahman Hassan dan Ibunda Mahani Hassan yang telah membesarkanku atas segala kasih sayang, materi serta butir-butir doanya yang telah diucapkan dengan tulus untuk kesuksesan putra tersayang.
8. Kakakku Navisa Hassan, Naimah Hassan, Nazeli Hassan, Novel Hassan dll dan segenap keluarga Al Hassan yang ada di Semarang, atas dukungan spiritual dan moril untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bp Ali Imron dan Bp Muhammad Solek, selaku dosen yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Pengasuh Pondok Pesanteren Daruttauhid Malang yang telah membekali penulis dalam mempelajari pelajaran agama maupun umum.
12. Para Pegawai-pegawai perpustakaan institut serta fakultas, yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Sahabatku khususnya Nurul Farida, Halimah, M Ichrom, Mifroh, M. Asif, Fitrul Huda, Adib, Baihaqi, Hilmi, Sri, Afidah, yang selalu menemani dan mensupport untuk penulis menyelesaikan skripsi.
14. KING FOOTBALL CLUB DAN DEJAVU FUTSAL CLUB, Umar Ass, Amang Ass, Mahdi, Armanda, Raymond, Arifuddin, Havid Al Munawwar yang selalu memberi dorongan hati yang dalam sehingga saya bisa membuat skripsi.

15. Para Pencari Tuhan, Salim bin ahmad al bakri dan Ronald Febrico yang selalu memotivasiku dalam menyelesaikan skripsiku ini.
16. Bp Yopi, Bu Widya, Mbak Ade and Mas Andy yang selalu memberikan doa serta restunya dalam menyelesaikan skripsiku ini.
17. BKUI (Badan Kesejahteraan Umat Islam) khususnya Ayek, Ami Mey, Sdr Rifki Ass, Ibnu Rizal, Zain Assagaf, Ali Abunumay, Ali Ba-agil, Husin Al Jufri, Ja'far Habsy, Bagir Abunumay, Saiful Daslan dll yang selalu memotivasi dan mendorong dalam penyusunan skripsi.
18. Ust Ja'far Musawa dan Ust Rizak selaku Ustad yang selalu mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
19. NAFILAH khususnya Chabieb, Irvan, Iman Fadilah, Vina, Ellin, Nada, Ahlisin, Nasrullah dll yang slalu menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi.
20. Sahabat-sahabat senasib dan seperjuangan di IAIN Walisongo Semarang, khusus nya teman-teman di Fakultas Syari'ah yang telah bersama-sama berpacu dalam cita-cita.

Kepada mereka semua, tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka, kecuali penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta sekuntum doa semoga amal kebaikan mereka semua kepada penulis akan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Penulis menyadari, bahwa keterbatasan yang ada pada diri penulis, hasil penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari hal tersebut, penulis berharap dengan kehadiran karya ini dapat membawa manfaat dalam memperkaya diskursus (wacana) intelektual, khususnya dalam studi Islam.

Akhirnya hanya Allah Swt, Penulis memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungan-Nya...*Amin*

Semarang, 28 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIMPIN ZALIM

A. Makna Dan Pengertian Pemimpin Zalim.....	18
1. Pengertian Pemimpin.....	18
2. Pengertian Zalim.....	32
3. Macam-macam dan kreteria pemimpin zalim.....	34

B. Dasar-Dasar Hukum Pemimpin Zalim.....	38
C. Pendapat Para Ulama' Terhadap Pemimpin Zalim.....	40

BAB III RIWAYAT IBNU TAIMIYAH DAN PEMIKIRANNYA

A. Biografi Ibnu Taimiyah.....	45
B. Pola Pikir Dan Karya Ibnu Taimiyah.....	56
C. Aktivitas Ibnu Taimiyah Dalam Masyarakat.....	64
D. Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim.....	76
a. Dasar Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim.....	76
b. Sikap Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim.....	83
c. Hukum Melawan Pemimpin Zalim.....	91

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG PEMIMPIN ZALIM

A. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim.....	97
B. Analisis Metode Istinbat Hukum Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim.....	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	130
B. Saran-Saran.....	132
C. Penutup.....	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral, bukan sebuah dokumen hukum. Meskipun demikian ia juga mengandung beberapa pernyataan-pernyataan hukum yang penting seperti masalah minuman keras, zina, pencurian dan lain-lain. Bagi umat Islam, syari'ah mencakup semua aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak, bahwa sejatinya hukum syari'ah bukanlah hukum yang mengandung prinsip khusus dan aturan rinciannya langsung diwahyukan kepada Allah kepada Nabi Muhammad Saw.¹

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Allah Swt menciptakannya dengan tangan (kekuasaan)-Nya sendiri, meniup ruh dari-Nya kepadanya, memerintahkan sujud semua malaikat kepadanya, menundukkan semua apa yang ada di langit dan bumi kepadanya, menjadikannya sebagai khalifah-Nya di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, dan supaya ia dapat meraih dengan semaksimal kemampuannya akan kesejahteraan kehidupan materiil dan spiritualnya.

¹ M. Harir Murzaki, "Reinterprestasi Hukum Pidana Islam" dalam *Cendikia Jurnal Kependudukan dan Kemasyarakatan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 3, No. 2, 2005, hlm.93-94

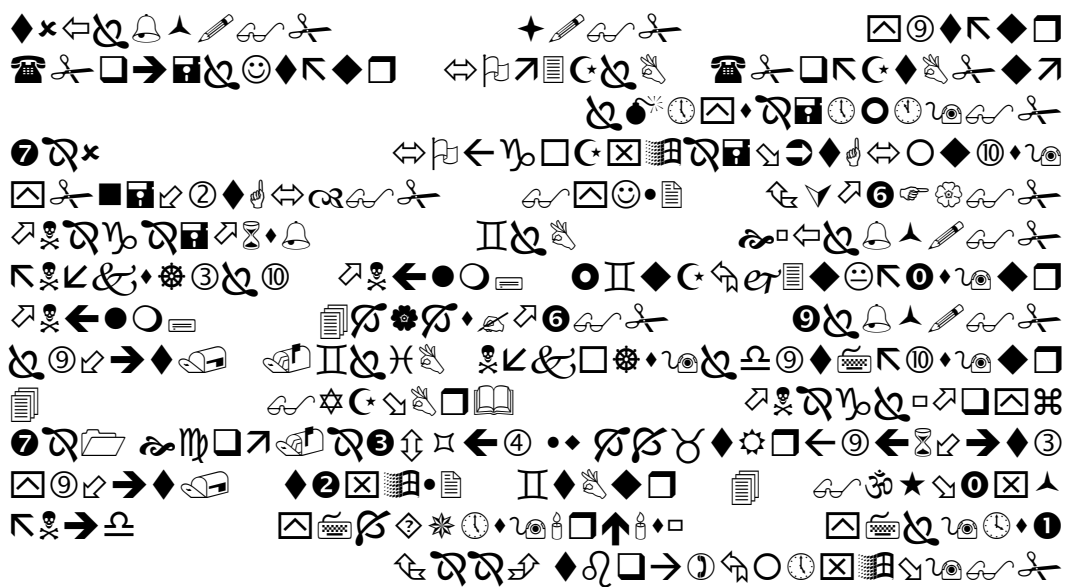
Akan tetapi seringkali antara manusia dengan sesamanya mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga tidak jarang sering terjadi benturan antara beberapa kepentingan tersebut. Ketidaksepadanan kepentingan ini jika dibiarkan akan menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat, dimana yang kuat menindas yang lemah, oleh karenanya dalam kehidupan dalam konsep Islam beda kepentingan itu diatur menjadi suatu rahmat.

Dimana Islam adalah agama sekaligus ideologi. Adapun pemerintahan dan Negara bagian yang tidak dapat di pisahkan dari eksistensinya. Perbedaan pendapat tentang Negara dan pemerintahan di kalangan pemikir muslim, juga disebabkan oleh perbedaan perpektif mereka tentang esensi kedua konsep tersebut. Sebagian memandang bahwa keduanya Negara dan pemerintah berbeda secara konseptual, pemerintah adalah corak kepemimpinan dalam mengatur kepentingan orang banyak (berhubungan dengan metode atau strategi politik),² Sedangkan negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Eksistensi Negara, dalam hal ini meniscayakan adanya perpaduan antara kebebasan subyektif (*subjective liberty*), yaitu kesadaran dan kehendak individual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan kebebasan objektif (*objective liberty*), yaitu kehendak umum bersifat mendasar.³

² Inu Kencana Syafie, "*Al Qur'an dan Politik*", Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-1,1996, hlm.135

³ M Din Syamsuddin, "*Etika Agama Dalam Masyarakat Madani*", Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002. hlm 57.

Al-Qur'an dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya "Negara" dan menggariskan pula tujuan daripada Negara. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan kenegaraan, sebagaimana halnya perintah yang serupa juga ditujukan kepada segenap kaum Muslim dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 55:



Artinya : "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik." (Q.S. An-Nur:55)⁴

⁴ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan". Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000. hlm. 285

Dalam ayat diatas tertera janji kepada Mukmin yang berbakti akan diangkat menjadi pemimpin dunia (*khalifah*) agamanya (Islam) akan kekal abadi, kehidupan cemas akan diganti dengan kehidupan damai bahagai, ini semua tidak akan dapat berlaku tanpa adanya Negara dan pemerintahan.

Mendirikan pemerintahan adalah fardhu bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sedangkan melaksanakannya seperti hukumnya melaksanakan fardhu yang lain, yang telah difardhukan oleh Allah. Bagi kaum muslimin adalah sesuatu yang pasti, dimana tidak lagi ada pilihan dan santai dalam rangka menegakannya. Mengabaikan pelaksanaannya merupakan kemaksiatan yang paling besar. Dimana Allah akan mengazab dengan adzab yang paling pedih.⁵

Harus diketahui, bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin direalisasikan, kecuali adanya “Kepemimpinan”. Sedangkan seluruh anak adam, mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini pasti butuh seseorang pemimpin yang mengadakan.⁶

Menurut Muhammad Tholhah Hasan bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dan hak untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang

⁵ Taqiuddin An-Nabhani, "*Nidhomul Hukmi Fi-Islam*", Terj. Moh. Magfur Wahid, "*Sistem Pemerintahan Islam*", Jatim: Al-Izzah, cet. 1 1997, hlm. 39

⁶ Ibnu Taimiyah, "*Al-Siyasah Al-syar'iyah Fi Islahir Raa'i War Ra'iyah*", Terj. Rofi' Munawwar, "*Siyasah Syari'ah Etika Politik Islam*", Surabaya: Risalah Gusti, Cet. ke-1, 1995, hlm. 119

lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang di kehendaki oleh pemimpin tersebut melalui kepemimpinannya.⁷

Dan mentaati pemimpin adalah wajib hukumnya dalam Islam selama itu tidak untuk bermaksiat pada Allah.⁸ Sedangkan bagi mereka (Pemimpin) yang berhianat dari amanah (berbuat maksiat) pada Allah, maka diperbolehkan untuk tidak mentaati seperti hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ إِمَامٌ جَائِرٌ.

Artinya : “Makhluk yang paling dicintai Allah adalah imam yang adil, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim.”⁹

Dari hadis di atas, tidak boleh mentaati seorang hamba apapun jabatannya kalau untuk melakukan maksiat kepada Allah. Masyarakat hanya boleh taat sama seorang hamba golongannya kalau untuk melakukan kebaikan yang tidak menyalahi perintah Allah Swt.

Apabila ditemukan seseorang pemimpin yang sudah tidak taat dengan perintah Allah, maka boleh melakukan pemberontakan terhadapnya, bahkan jauh

⁷ Muhammad Tholhah Hasan, “Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia” Jakarta: Penerbit Lantabara Press, 2005, hlm 247

⁸ Abul A’al Al-Maududi, “Khalifah dan Kerajaan”, Penerbit Mizan, Bandung, 1998. hlm 81

⁹ Ibnu Taimiyah, *op.cit.* hlm. 21

dari itu Imam Hanifah mengatakan bahwa kepemimpinan orang zalim itu adalah batal.¹⁰

Karena kepemimpinan tersebut merupakan suatu amanah Allah, dan sekaligus amanah sekelompok orang yang harus dijalankan dengan baik dan dengan seadil mungkin, apabila seseorang tidak biasa melaksanakan amanah tersebut, yang sesuai dengan ajaran agama artinya ia sudah melakukan kesalahan kepada Allah, dan manusia dan sikap untuk menegakkan keadilan dan mencegah segala bentuk kemungkaran atau kezaliman sesuai dengan Firman Allah, dalam Surat Ali Imran (3): 104. yang berbunyi :



Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”¹¹

Maka dari itu seseorang muslim di haruskan mempunyai keberanian dalam melakukan kritikan ataupun cara-cara lain yang di tujukan terhadap penguasa zalim dan setiap orang di haruskan memerangi suatu kezaliman karena mengucapkan kata yang benar (*haq*) atau melakukan kretikan dengan cara lain dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di depan pemimpin yang berbuat zalim adalah merupakan suatu tindakan jihad yang sangat disukai

¹⁰ M.Yusuf Musa. “Politik dan Negara dalam Islam”, Yogyakarta: Penerbit Pustaka SLI, 1991. hlm. 336

¹¹ Departemen Agama RI, *op cit.* hlm. 93

oleh Allah. Mengatakan kebenaran atau melakukan perlawanan di depan pemimpin yang zalim memang suatu resiko yang sangat besar, karena hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang melakukannya. Rasulullah Saw tetap memberikan suatu kemungkinan bagi siapa saja yang merasa tidak takut melakukannya. Sebab pada dasarnya setiap manusia itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah.¹²

Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin walaupun hanya terhadap diri kita sendiri dan mempunyai kewajiban untuk memerangi kezaliman dan kemungkaran walaupun hal itu dianggap memberontak yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini karena setiap kita adalah pemimpin. Yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dan perdamaian demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

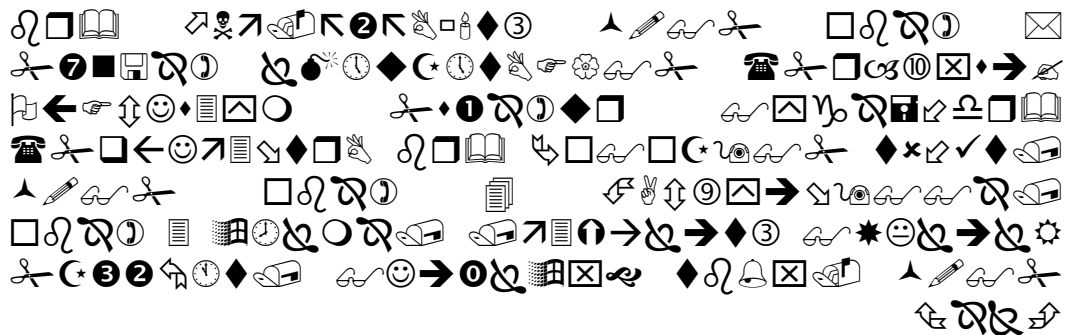
Tindakan seperti itu, dalam bahasa politik dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pemberontakan terhadap pemimpin. Pemberontakan atau makar dalam hal ini adalah bertujuan untuk menegakkan suatu kebenaran dan keadilan atau upaya menghilangkan kezaliman pemimpin.

Ibnu Taimiyah adalah tokoh besar bermazhab Hambali. Begitu ayahnya meninggal, ia menggantikan kedudukannya baik sebagai pendidik maupun mufti. Ia tokoh puncak dalam keilmuan dunia keilmuan, amaliyah, kezuhudan, keberanian, kemuliaan, kerendahan hati, kesabaran, kewibawaan, keagungan,

¹² Muahammad Fu'ad Abdul Baqi, *"Al-Lu'lu' Wal-Marjan"*, (Terjm, H. Salim Bahreisy), Surabaya: Bina Ilmu, 1996. hlm 709

keikhlasan, dan keteguhannya dalam mempedomani hadis-hadis Nabi Saw. Ibnu Taimiyah dianggap sebagai pedang yang terhunus dihadapan para penentang agama dan menggetarkan nyali para ahli bid'ah.¹³

Orientasi pemikiran politik Ibnu Taimiyah itu didasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa':58.



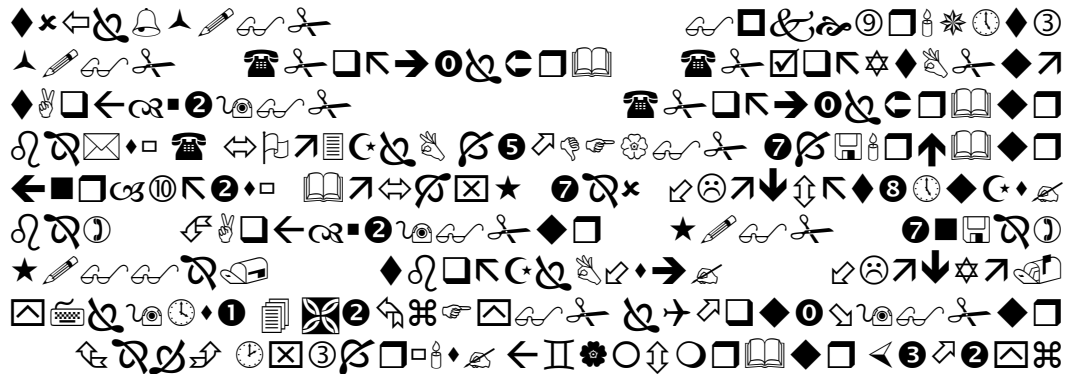
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’:58).¹⁴

Ulama berpendapat bahwa ayat diatas diturunkan kepada para pemimpin. Oleh karena itu, wajib bagi mereka menyampaikan amanat kepada ahlinya. Kemudian apabila mereka memutuskan antara manusia untuk memutuskan secara adil.

¹³ M. Arskal Salim, “Etika Intervensi Negara Perspektif politik Ibnu Taimiyah”, Jakarta: Logos, Cet ke-1, 1999, hlm. 3

¹⁴ Departemen Agama RI. *op cit* ,hlm 69

Adapun pandangan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai ketaatan kepada pemimpin didasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59:



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." ¹⁵

Ayat di atas turun untuk rakyat. Oleh karena itu, wajib bagi mereka untuk taat kepada pemimpin yang melaksanakan hal tersebut dalam membagi memutuskan dan lainnya. Kecuali apabila pemimpin itu memerintahkan untuk maksiat kepada Allah, maka tidak ada taat bagi makhluk dalam bermaksiat kepada khaliknya. Kemudian apabila kalian semua bertentangan dalam sesuatu maka kembalikanlah hal tersebut kepada Allah dan sunnah Rasul Nya.¹⁶

Adanya kesewenang-wenangan penguasa dalam sebuah pemerintahan, sistem pemerintah yang arogan pada masa itu (abad VII H), membuat Ibnu Taimiyah bangkit untuk memberikan pemikiran-pemikirannya. Walaupun pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut banyak menimbulkan pro dan

¹⁵ Ibid, hlm. 69

¹⁶ Ibnu Taimiyyah, "al-Siyasah al-Syar'iyah", Daral-Kitab al-Arabi, Kairo, hlm 9.

kontra dikalangan elit politik, namun hal itu tidak menyurutkan semangat Ibnu Taimiyah untuk menyeru dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* ditengah-tengah kekuasaan yang ada pada masa itu.

Pada bulan Sya'ban 726 H/ Juli 1326 M, Ibnu Taimiyah menulis tafsir al-Qur'an dan karangan yang termasyhur dibidang politik yaitu "*al-Siyasah al-Syar'iyah*" dengan menyatakan sebuah riwayat tentang kewajiban adanya seorang pemimpin yaitu:

سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إِمَامٍ حَائِرٍ أَصْلَحَ مِنْ لَيْلَةٍ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ.¹⁷

Artinya : "*Enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan.*"

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa penting adanya pemerintahan karena Allah, memerintahkan kepada manusia untuk *beramar ma'ruf* dan *nahi munkar* misi atau tugas itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kekuasaan dan pemerintahan yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan itu. Ia juga berpendapat bahwa keberadaan dan kewajiban kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik (harta rakyat) dan lebih jauh dari itu juga untuk menjamin hukum Allah di muka bumi ini (*khalifatullah*) di muka bumi ini, bahkan ia lebih jauh berpendirian keberadaan kepala negara

¹⁷ *Ibid*, hlm 137.

meskipun zalim lebih baik bagi rakyat dari pada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara.¹⁸

Satu hal lagi yang cukup menarik, Ibnu Taimiyah mendambakan di tegakkannya keadilan semakin kuat, sehingga dia cenderung untuk beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara tidak adil sekalipun Islam.¹⁹ Pernyataan diatas merupakan pencerminan dari kekhawatiran Ibnu Taimiyah terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dan kekacauan terhadap stabilitas politik di negara tempat ia hidup yang masih sarat dengan kerawanan dan kekacauan.

Namun Ibnu Taimiyah membuat perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan yaitu kita boleh mengingkari perintah yang tidak baik dari seorang imam dan menderita hukuman karenanya, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk melawannya selama ia melakukan sholat.²⁰

Oleh karena itu apabila terjadi pengingkaran atau pemberontakan sekalipun dilakukan terhadap penguasa yang zalim, tentu akan mengakibatkan kekosongan pemerintahan yang akibatnya *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* susah untuk dapat dilaksanakan dengan semestinya. Agaknya pendapat Ibnu Taimiyah ini sangat

¹⁸ Munawir Sjadzali, "Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran", Jakarta: Penerbit UI-Press, 1993, hlm. 89

¹⁹ *Ibid*, hlm 89-90

²⁰ Qamaruddin Khan, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah", Bandung: Pustaka Salman, ITB, 1983, hal. 284-285

aktual sekali jika dikaji ulang pada saat sekarang dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas negara.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas menggugah hati penulis untuk meneliti hal-hal diatas dengan secara mendalam yang dituangkan ke dalam bentuk kajian ilmiah (Skripsi) dengan judul: **Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Maka yang jadi rumusan masalah penulisan ini sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pendapat dan kreteria pemimpin zalim dengan dasar *Istinbat* hukum menurut Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim dengan konsep siyasah Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang pendapat dan kreteria pemimpin zalim dengan dasar Pertimbangan *Istinbat* hukumnya menurut Ibnu Taimiyah.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim terhadap konsep siyasah Islam.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²¹ Beberapa kajian dan penelitian mengenai pemimpin zalim:

1. Qamaruddin Khan yang menulis buku "*Pemikiran Ibnu Taimiyah*" di dalam buku tersebut dibahas bahwa Ibnu Taimiyah dengan tegas menyarankan agar tata politik yang kuat ditegakkan untuk mendukung syari'ah dan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok-pokok syari'ah.
2. M. Arskal Salim dalam buku yang berjudul *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Dalam buku tersebut dibahas tentang pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara dalam pembangunan ekonomi sesungguhnya mempunyai keunikan.
3. Khalid Ibrahim Jindan dalam buku yang berjudul *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*. Dalam buku ini dibahas pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah terhadap hakekat dan perilaku pemerintahan Islam dikaitkan dengan tiga faktor utama, pertama, konteks sejarah yang mengitari kehidupan Ibnu Taimiyah. Kedua, tradisi pemikiran politik Islam yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, dan tauladan negara Islam yang mula-mula. Ketiga, teori-teori politik Islam yang telah mapan seperti sunni tentang khilafah, teori syi'ah tentang imamah dan teori khawarij tentang pemberontakan.

²¹ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet, ke 4, 1997, hlm. 112

4. J. Suyuti Pulungan yang menulis buku “*Fiqih Siyasah, ajaran, sejarah dan pemikiran*” di dalam buku tersebut dibahas pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah terhadap wajibnya adanya pemerintahan.

5. Muhammad Ashif dalam skripsi yang berjudul *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (studi analisis kewajiban mendirikan pemerintahan dalam kitab As-Siyasah Asy-Syari'ah)* tahun 2007 (NIM : 2103158). Dimana ia lebih menfokuskan Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai kewajiban mendirikan pemerintahan.

Dari uraian di atas, kesimpulan yang diambil, bahwa beberapa tulisan yang ada di atas mengkaji tentang masalah kewajiban adanya pemerintahan. Oleh karena keberadaan kepala negara meskipun zalim lebih baik bagi rakyat dari pada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara.

Untuk itu penulis dalam skripsi ini berusaha menjelaskan mengenai pendapat Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim. Yang mana pendapat Ibnu Taimiyah mengenai bentuk perlawanan rakyat terhadap pemimpin zalim dan dampak terjadinya gangguan dan kekacauan terhadap stabilitas politik apabila terjadinya perlawanan terhadap pemimpin zalim.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulisan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan kajian pustaka yaitu cara penulisan, mereduksi dan menyajikan data-data.²² Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang menjadi obyek kajian, yang sesuai dengan pokok bahasan maka Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*).

2. Sumber Data

Dalam rangka penyempurnaan kajian ilmiah ini maka untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan kajian ilmiah ini adalah:

- a) Sumber Data Primer: yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang asli dari karya-karya Ibnu Taimiyah yang membahas tentang penguasa zalim secara langsung seperti *Al-Siyasah Al-Syari'ah fi Islahi Al- Ra'i wa Al-ra'iyah dan Majmu' fatawa*.

²² Noeng Muhadjir, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996 , hlm 21.

b) Sumber Data Sekunder : yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang dibahas. Misalnya buku: Islam dan tata negara karangan Munawir Sjazali, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah karangan Qamaruddin Khan, Khalid Ibrahim Jindan tentang teori pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah dan fiqh Siyasah, sejarah, ajaran dan pemikiran karya J. Suyuti Pulungan atau tulisan lain yang terkait dengan pembahasan penelitian. Selanjutnya penulis gunakan penyempurnaan dalam penyelesaian kajian ilmiah ini, metode ini disebut *Library Research*.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode sebagai berikut:

a) Deskriptif Analitis

Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²³ Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atau suatu pertanyaan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Metode ini sangat berguna untuk menggambarkan pemikiran Ibnu Taimiyah

71. ²³ Consuelo G. Sevilla dkk, “*Pengantar Metode Penelitian*”, Jakarta : UI Press, 1993, hlm

tentang pemerintahan pemimpin yang zalim dan serta menganalisisnya dari beberapa segi, sehingga diketahui arah dan kecenderungan pemikirannya.

b) Metode Hermeneutika

Pada dasarnya tugas dari hermeneutika adalah membawa keluar makna internal dari suatu teks beserta isi untuk diaktualisasikan ke dalam zamannya. inilah yang selanjutnya dipahami bahwa fungsi manusia secara umum sebagai “ *an is interpretaer being*” yaitu sebagai makhluk penafsir. Sehingga variable yang di gunakan dalam kajian hermeneutik ini mempunyai tiga cakupan utama sebagai vitalnya, hermeneutik itu sendiri yang disebut dengan *hermeneutic of circle*, yaitu: *the world of text* (dunia teks), *the world of the author* (dunia pengarang) dan *the world of the reader* (dunia pembaca).²⁴

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang terpadu mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam.

BAB I : Bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

²⁴ Komarudin Hidayat, “*Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*”, (Jakarta: Paramadina , 1999), hlm.3

BAB II : Memaparkan gambaran umum tentang pemimpin zalim. Bab ini memuat pengertian pemimpin zalim, dasar-dasar hukum pemimpin zalim dan pendapat para ulama' terhadap pemimpin zalim.

BAB III: Akan memaparkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam. Bab ini memuat Geografi, Pola pikir serta Karya-karyanya dan segala aktivitas Ibnu Taimiyah dalam masyarakat. pemimpin zalim yang meliputi dasar pemikiran, sikap dan hukum melawan pemimpin zalim.

BAB IV : Merupakan analisis poin-poin yang akan dianalisis adalah pendapat Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim dan istinbat hukum pendapat Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim.

BAB V : Penutup yang memuat kesimpulan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIMPIN ZALIM

A. Makna dan Pengertian Pemimpin Zalim

1. Pengertian Pemimpin

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar "pimpin" yang artinya "bimbing" atau "tuntun". Kemudian dari kata "pimpin" lahir kata kerja "memimpin" yang artinya suatu kegiatan membimbing, menunjukkan jalan atau menuntun, dan bentuk kata bendanya adalah "pemimpin" yaitu orang yang melaksanakan memimpin, menunjukkan jalan atau orang yang membimbing. Perkataan lain yang disamakan pengertiannya adalah mengetuai, mengepalai, memandu, menguasai, dan melatih.¹

Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap dan pemberani berperang).²

Sedangkan kepemimpinan itu sendiri artinya kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang-orang. Menggerakkan dan mengarahkan orang, berarti telah berlangsungnya hubungan manusia (*human relation*), yaitu menggerakkan

¹ Purwadarna, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hlm. 769

² Ngilim Purwanto dkk, "*Administrasi Pendidikan*", Jakarta: Mutiara, 1984, hlm. 38.

dan mengarahkan (si pemimpin) dengan yang digerakkan dan diarahkan (yang dipimpin), sehingga dalam banyak hal si pemimpin sifatnya mengajak dan mempengaruhi yang di pimpin dengan suka rela dan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama.³

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna. Pembahasan tentang masalah kepemimpinan, sebenarnya sudah banyak diulas dalam buku-buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang kepribadian dan sifat seorang pemimpin mulai dari zaman nabi hingga saat ini.⁴

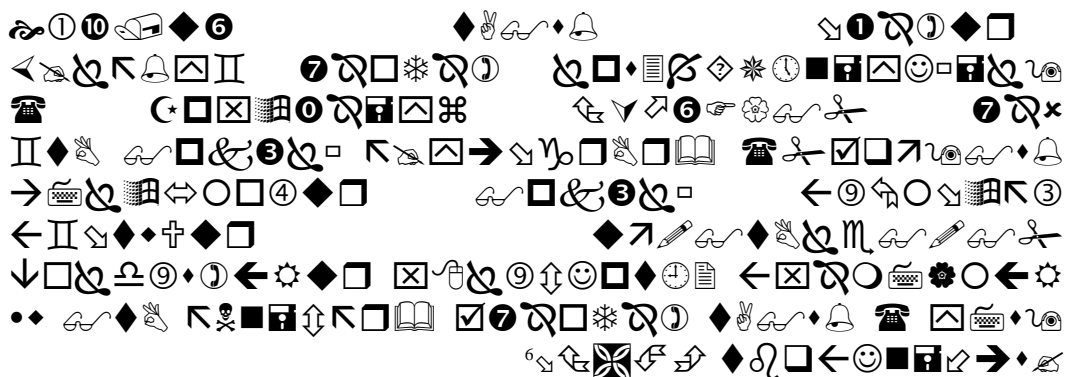
Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut *leader*, kegiatannya disebut kepemimpinan atau *leadership*. Perkataan khalifah yang telah banyak disinggung dalam uraian-uraian terdahulu pada dasarnya berarti pengganti atau wakil. Pemakaian perkataan khalifah setelah Rasulullah Saw wafat, terutama bagi keempat orang Khalifathur-Rasyidin, menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan “*Amir*” yang jamak nya *umara* disebut juga penguasa. Oleh karena itu kedua perkataan tersebut dalam Bahasa Indonesia disebut pemimpin, yang cenderung berkontasi sebagai pemimpin formal. Konotasi tersebut terlihat pada bidang yang dijelajahi di dalam tugas pokoknya, yang menyentuh tidak saja

³ Pamudji, “*Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*”, cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm. 60

⁴ Mar’at, “*Pemimpin dan Kepemimpinan*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 7

aspek-aspek keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga aspek-aspek pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Namun tidak disangkal bahwa perkataan khalifah di dalam al-Qur'an mencakup pula maksud Allah Swt untuk menyatakan pemimpin yang bersifat nonformal. Sehubungan dengan itu berfirman Allah Swt di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:



Artinya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Firman Allah di atas jelas tidak sekedar menunjuk pada para khalifah pengganti Rasulullah Saw, tetapi adalah penciptaan Nabi Adam dan anak cucunya yang disebut manusia dan dibebani tugas untuk memakmurkan bumi. Tugas yang disandangnya itu menempatkan setiap manusia sebagai pemimpin, yang menyenyuh dua hal penting dalam kehidupan di muka bumi. *Tugas pertama*

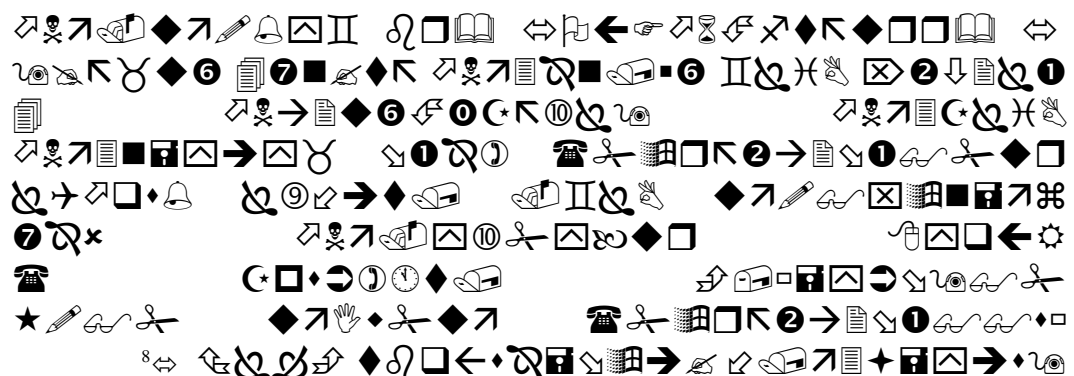
⁵ Hadari Nawawi, "Kepemimpinan Menurut Islam", Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Th 1993. hlm 16.

⁶ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan". Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000. hlm.6

adalah menyeru atau menyuruh orang lain berbuat amal makruf. *Tugas kedua* adalah melarang atau menyuruh orang lain meninggalkan perbuatan munkar. Dengan kata lain tugas manusia tidak lain selain melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Swt dalam semua aspek kehidupannya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di dalam sebuah masyarakat.⁷

Kedua tugas tersebut dimaksudkan Allah Swt dalam kalimat yang berbeda seperti telah dikatakan di atas, bahwa setiap manusia sebagai pemimpin berkewajiban memakmurkan bumi, dengan berbuat amal kebaikan bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Manusia diciptakan sebagai khalifah atau pengganti, merupakan makhluk yang mewakili Allah Swt dalam melaksanakan kepemimpinannya melalui kegiatan-kegiatan yang diridhai Nya.

Allah Swt berfirman di dalam surat Al-A'raaf ayat 69:



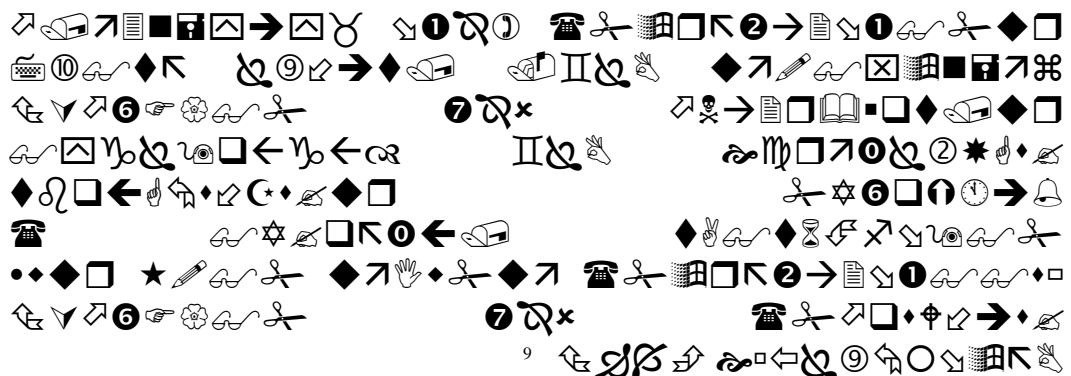
Artinya : “Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum

⁷ Hadari Nawawi, *op.cit*, hlm 16

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm126

Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Demikian pula di dalam surat Al-A'raaf ayat 74 yang mengatakan sebagai berikut:



Artinya : “Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”

Dari kedua firman tersebut jelas bahwa setiap manusia berkewajiban menjalankan kepemimpinan karena telah diberi kekuasaan untuk berbuat amal makruf demi terwujudnya kemakmuran di muka bumi.¹⁰

Oleh karena itu secara *spiritual*¹¹ kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Swt, baik secara bersama-sama maupun perseorangan. Dengan kata lain kepemimpinan adalah kemampuan mewujudkan semua kehendak Allah Swt yang telah diberitahukan-Nya melalui Rasul-Nya yang terakhir Muhammad Saw.

⁹ *Ibid*, hlm 127

¹⁰ Hadari Nawawi, *op.cit*, hlm 17

¹¹ *Spiritual* : kejiawaan, rohani, batin dan moral

Kepemimpinan dalam arti spiritual tiada lain daripada ketaatan atau kemampuan mentaati perintah dan larangan Allah Swt dan Rasulullah Saw dalam semua aspek kehidupan.

Adapun pengertian pemimpin menurut *empiris*¹² adalah kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarah kehidupan manusia sudah sangat banyak pengalaman kepemimpinan yang dapat dipelajarinya. Pengalaman itu perlu dianalisis, untuk mendapatkan bukti-bukti yang berharga dan dapat dimanfaatkan, dalam usaha mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan diredhai Allah Swt pada masa sekarang dan masa datang. Pengertian seperti itulah yang dimaksudkan sebagai pengertian kepemimpinan yang bersifat empiris.¹³

Untuk memahami pengertian kepemimpinan secara empiris tersebut, maka akan dimulai dari segi terminologi. Kepemimpinan secara *etimologi* (asal kata) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “pemimpin” . Dengan mendapat awalan Me menjadi “memimpin” maka berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. Adapun perkataan lain yang disamakan pengertiannya adalah “mengetahui atau mengepalai, memandu dan melatih dalam arti mendidik atau mengajari supaya dapat mengajarkan sendiri.”perkataan memimpin bermakna sebagai kegiatan, sedang yang melaksanakan disebut pemimpin. Dengan kata lain pemimpin atau penguasa adalah orang yang memimpin, mengetahui dan mengepalai.¹⁴

¹² *Empiris* : berdasarkan pengalaman (terutama yang di peroleh dari penemuan, percobaan , pengamatan yang telah di lakukan) semisal Ilmu Menejemen.

¹³ Hadari Nawawi, *op.cit*, hlm 18

¹⁴ *Ibid*

Menurut Muhammad Tholhah Hasan bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dan hak untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana yang di kehendaki oleh pemimpin tersebut melalui kepemimpinannya.¹⁵

Menurut Murthada Munthahari pemimpin adalah orang yang membuat mudah para pengikutnya dalam mencapai tujuan yang diperlukan.¹⁶

Al Mawardi mengatakan Pemimpin Negara bertujuan menjaga agama dan mengatur dunia, sedangkan mengangkat orang yang akan melaksanakannya adalah wajib hukumnya.¹⁷

Sayid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan sebagaimana yang dikutip A.Hasjmy bahwa pengangkatan imam atau pemimpin, artinya pemberian mandat kepadanya untuk memerintahkan umat, hukumnya wajib atas kaum muslimin, tidak saja menurut akal, bahkan menurut syar'i.¹⁸

Jika kepemimpinan lebih memiliki arti luas, pemimpin merupakan spesifikasi dari kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, pemimpin bias diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok, dapat dianggap seorang pimpinan atau pemimpin. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu. Menurut Veithzal Rifai, Pemimpin

¹⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *"Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia"* Jakarta:Penerbit Lantabara Press,2005, hlm 247

¹⁶ Murthada munthahari, *"Imamah dan Khilafah"*, Terj, Satrio pinandito," Imamah dan Khilafah",Jakarta:CV.Firdaus,Cet-I, 1991, hlm 8

¹⁷ Imam al Mawardi, *"Al-Ahkaamus Sulthaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyah"*, Terj, Abd Hayyie al Kattani, *"Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam"*, Jakarta, Gema Insani Press. 2000 hlm 3

¹⁸ A. Hasjmy,"*Di mana letak Negara Islam*",Surabaya: Bina Ilmu,1982, hlm.23

yang efektif adalah yang (1) bersikap luwes, (2) sadar mengenai diri, kelompok dan situasi, (3) memberi tahu bawahan tentang setiap persoalan dan bagaimana pemimpin pandai dan bijak menggunakan wewenangnya, (4) mahir menggunakan pengawaasan umum di mana bawahan tersebut mampu dan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang ditentukan.¹⁹

Untuk dapat memenuhi seseorang dijadikan sebagai pemimpin dibutuhkan tiga hal penting: *Pertama*, kekuasaan yang dimaksud adalah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberi wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. *Kedua*, kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga seorang pemimpin mampu mengatur orang lain dan orang tersebut patuh pada orang yang memimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. *Ketiga*, kemampuan yaitu seorang pemimpin mempunyai segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau ketrampilan teknis maupun sosial atas perintahnya yang dianggap melebihi dari kemampuan orang biasa.²⁰

Sebagaimana definisi yang dijelaskan oleh Kartini Kartono bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga ia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan usaha bersama guna mencapai satu tujuan tertentu. Jadi pemimpin harus memiliki satu atau beberapa kelebihan dibandingkan dengan lainnya,

¹⁹ Veithzal Rivai, “*Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 8.

²⁰ Kartini Kartono, “*Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*”, cet. Ke-7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.28.

sehingga ia mendapat pengakuan dan respek dari para pengikutnya serta dipatuhi segala perintahnya.²¹

Adapun beberapa istilah pemimpin dalam Islam yang dipakai untuk kepala atau pemimpin bagi gelar simbolik utama yang digelarkan kepada orang yang melaksanakan tugas kepemimpinan adalah imam, khalifah dan amir. Meskipun ada beberapa istilah lain yang mempunyai arti kepala atau pemimpin, seperti rais, syaikh, dan sultan.²²

Gelar rais dan syaikh pernah disandang bagi orang yang mempunyai pengaruh paling besar bagi kabilah suku Quraisy, dan gelar ini mempunyai posisi tertinggi.²³ Namun gelar Syaikh tersebut meluas menjadi Syaikh al Islam, dan gelar ini hanya lazim digunakan oleh para ulama fikih dan pemimpin tarekat, dan bagi orang yang memberi fatwa (mufti).²⁴ Sedangkan kata sulthan merupakan derivasi dari kata salatha yang berarti *سلطه الله فنسلط عليهم*.²⁵ Yang artinya memaksa atau dan sehingga memberikan otoritas kepada Allah untuk menguasai. Gelar ini pernah dipakai oleh penguasa muslim secara resmi semenjak abad ke-11 pada dinasti Abbasiyah. Pada mulanya gelar sulthan hanya jabatan bagi seorang yang menduduki jabatan gubernur, dan masih di bawah kekuasaan Khalifah, namun jabatan sulthan semakin besar kekuasaannya bahkan

²¹ *Ibid*, hlm. 44.

²² Badri Yatim, “*Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 11.

²³ *Ibid*

²⁴ Tim Penulis IAIN Syahid, “*Ensiklopedi Islam Indonesia*”, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 876.

²⁵ Ibnu al Mandzur, “*Lisan al Arab*”, jilid 7 Beirut: Dar al Fikr, t.th. hlm. 320-321

melebihi jabatan khalifah. Pada akhirnya sulthan benar-benar berkuasa penuh atas daerah dan wilayahnya dan berada di atas kekuasaan khalifah.²⁶

1. Imam

Sebutan gelar Imam menurut Quraish Shihab kata imam berasal dari kata (*amma ya'ummu*) yang berarti menuju, menumpu dan meneladani, dari kata yang sama lahirlah kata (*um*) yang berarti “ibu” dan (*imam*) yang artinya “pemimpin”, karena keduanya sama-sama menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan bagi semua masyarakatnya.²⁷

Namun Fakhruddin al Razi dalam tafsirnya berpendapat bahwa kata imam, jika diithlaqkan, maka yang ditunjuk hanyalah petunjuk ke arah kebaikan, karena jika menunjuk makna kejahatan, niscaya diberi keterangan yang menunjuk pada makna tersebut.²⁸ Kata Imam dalam shalat dengan khalifah sering disejajarkan karena kedudukan seorang imam dalam hal kepemimpinan harus diikuti, tentunya imam yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.²⁹

Kata imam banyak terdapat dalam al Qur'an seperti S. Yasin: 12, *Imam al mubin*, kata imam ini artinya kitab induk yakni al Qur'an yang memberi petunjuk, S. Al Baqarah: 124 berarti Nabi Ibrahim yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin bagi umat manusia, S. al Hijr: 79, berarti jalan umum, S. Hud: 17 berarti pedoman, S. al Furqan: 74 berarti pemimpin dalam hal kebaikan, S. al

²⁶ *Ibid*, hlm. 291.

²⁷ Quraish Shihab, “*Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*”, Bandung: Mizan, cet. Ke-8, 1998, hlm. 325.

²⁸ Al Razi, “*Tafsir al Razi*”, Beirut: Dar al Fikr, jilid 1, t.th. hlm. 710.

²⁹ Ali Abd. Raziq, “*al Islam wa Ushul al Hukm*”, al Qahirat, 1925, hlm. 3

Qashash: 5 berarti pemimpin yang mempunyai arti luas. Namun dalam S. at Taubah: 12 yang memakai kata jamak yakni *a'immat* yang menunjuk pada pemimpin orang-orang kafir, sedangkan dalam S. al Anbiya': 72-73 berarti pemimpin-pemimpin spiritual (*Rasul*) yang dibekali wahyu oleh Allah untuk mengajak manusia mengerjakan kebaikan, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. S. al Sajdah: 24 berarti para pemimpin yang memberi petunjuk berdasarkan perintah Allah.³⁰

Dengan demikian kata imam yang dimaksud pemimpin dalam arti luas atau bersifat umum adalah pemimpin yang mengurus masalah pemerintahan (politik) saja, atau pemimpin yang mengurus masalah agama saja. Namun kata imam yang mempunyai arti khusus hanya menunjuk pemimpin spiritual yang bertugas untuk misi keagamaan saja. Akan tetapi dalam kenyataan sejarah Nabi Muhammad Saw. selaku pemimpin agama bagi umatnya untuk melaksanakan tugas kerasulannya, dalam perkembangannya pada periode Madinah Nabi Muhammad Saw. melaksanakan tugas-tugas politik dan pemerintahan, sekaligus sebagai kepala negara bagi masyarakat Madinah.³¹

2. Khalifah

Khalifah berasal dari kata *khalafa yahklufu khilaafatan* artinya menggantikan³² yakni orang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Kata ini mengalami perkembangan arti, baik secara umum

³⁰ Suyuti Pulungan, "*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*", cet, ke- 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 60.

³¹ *Ibid*, hlm. 61.

³² Mahmud Yunus, "*Kamus Bahasa Arab-Indonesia*", Jakarta: Hidakarya, 1989, hlm 120

maupun secara khusus, dalam kamus dan ensiklopedi berbahasa Inggris khalifah berarti wakil (*deputy*), pengganti (*successor*), penguasa (*vicegerent*), title bagi pemimpin tertinggi bagi komunitas muslim (*title of the supreme head of the Muslim Community*).³³

Dalam kenyataan sejarah Islam, khalifah adalah pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab terhadap umatnya agar manusia mengikuti undang-undang-Nya. Dengan demikian khalifah merupakan gelar bagi pemimpin tertinggi bagi masyarakat Muslim, lebih khusus ia sebagai pengganti Nabi dalam urusan agama dan urusan politik.

Dalam al Qur'an kata khalifah disebutkan dalam S. al Baqarah: 30 yang berarti Nabi Adam dan keturunannya sebagai pengganti makhluk lain untuk memakmurkan dan melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi. Dalam S. Shad: 26 Allah menunjuk kepada Nabi Daud sebagai pemimpin, dalam S. al Nur: 55 Allah menjadikan penguasa pada orang yang beriman dan beramal saleh, dalam S. al An'am: 133 dan 165, S. Hud: 57, S. Fathir: 39, S. al A'raf: 69 dan 74 mempunyai arti pengganti bagi generasi berikutnya.³⁴

Awal penyebutan gelar khalifah pertama kali dalam Islam adalah gelar yang diberikan kepada Abu Bakar, ketika ia terpilih dalam bai'at as Tsaqifah.³⁵ Tugas yang diberikan adalah untuk menggantikan Rasulullah Saw, dalam memimpin dan memelihara kemaslahatan umat Islam. Kemudian gelar Khalifah berkembang menjadi titel bagi pemimpin tertinggi untuk umat Islam. Lebih khusus khalifah

³³ Van Donzel, et. al. (eds), "*First Encyclopadia of Muslim*", Vol. IV, Leiden: Brill, 1978 hlm. 881.

³⁴ Suyuti Pulungan *op. cit*, hlm. 50-53.

³⁵ Ibnu Khaldun, "*al Muqaddimat*", Beirut: Dar al Fikr, hlm. 156.

berarti sebagai pengganti Nabi dalam urusan masalah agama dan urusan pemerintahan. Dalam urusan agama yang dimaksud bukan untuk meneruskan dalam menerima wahyu, karena setelah Rasulullah wafat otomatis wahyu berhenti, dan tidak dapat digantikan oleh siapa pun.³⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kata khalifah yang digunakan dalam al Qur'an mempunyai pengertian sebagai berikut

- 1) Manusia dijadikan oleh Tuhan sebagai pengganti makhluk pendahulunya.
- 2) Umat manusia seluruhnya dijadikan oleh Tuhan sebagai penguasa bumi dan kepada mereka diberikan kemampuan untuk mengolah dan melaksanakan hukum menurut batas-batas yang ditetapkan oleh Tuhan.
- 3) Orang yang memiliki kekuasaan sebagai anugerah dari Allah untuk memobilisasi sumber daya alam.
- 4) Tuhan menjadikan manusia dari satu generasi ke generasi umat secara bergantian untuk menguji siapa di antara umat-umat itu yang paling baik karya dan amal perbuatannya untuk dijadikan contoh atau teladan.
- 5) Orang-orang mukmin akan dikaruniai kekuasaan oleh Allah bila mereka benar-benar taat dan banyak berbuat amal saleh.³⁷

3. Amir

Kata amir derivasi dari kata *amara ya'muru amran* artinya perintah dan bentuk fa'ilnya adalah amir yang berarti orang yang memerintah, pemimpin (*qa'id, za'im*). Menurut istilah, amir didefinisikan dengan "seorang penguasa yang melaksanakan urusan untuk kepentingan kelompoknya". Bentuk pluralnya adalah

³⁶ Suyuti Pulungan, *op. cit.* hlm. 57

³⁷ *Ibid*, hlm. 53

umara', dalam al Qur'an hanya terdapat kata *ulil amri* yang mempunyai arti pemimpin atau orang yang berpengetahuan,³⁸ namun kata *amir* lebih banyak terdapat dalam hadis.³⁹

Istilah *amir* digunakan untuk gelar jabatan-jabatan penting dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam, seperti *Amir al mukminin*, *Amir al Muslimin*, *Umara'*, dan *Amir* saja. Oleh karenanya, kata *amir* seringkali digunakan untuk kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer, seperti *Amir al jaisy* atau *amir al Jund* sebutan bagi komandan divisi militer.⁴⁰

Pertama kali yang mendapat gelar *Amir al mukminin* adalah Umar bin Khattab.⁴¹ Berkenaan dengan ini Ibnu Khaldun berkata: *Amir al mukminin* adalah gelar khalifah. Gelar ini suatu gelar yang baru yang diadakan semenjak zaman khulafa'. yang sebelumnya menamakan komandan pasukan dengan gelar *Amir*, dan kata yang sinonim dengan itu adalah *Amil*.⁴²

2. Pengertian Zalim

Zalim dalam tata bahasa (Arab) berasal dari pada huruf yaitu: ظَلَمَ — يَظْلِمُ — ظُلْمًا yang bermaksud gelap.⁴³ Dari segi istilah: Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim adalah setiap orang yang tidak adil kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain.

³⁸ Ibnu al Manzhur, *op. cit*, jilid 4, hlm. 31

³⁹ Suyuti Pulungan, *op. cit*, 65.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Teungku Hasbi as Shiddieqi, "*Islam dan Politik Bernegara*", Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 40.

⁴² Ibnu Khaldun, *op. cit*, hlm. 189.

⁴³ Mahmud Yunus, *op.cit*, hlm 248

Menurut Murtadho Muthahhari pengertian zalim dalam bahasa sehari-hari adalah orang zalim hanyalah orang yang menyimpang hak-hak orang lain. Tetapi menurut terminologi Qur'ani orang yang zalim adalah orang yang tidak adil terhadap diri sendiri.⁴⁴

Adapun menurut Abdul Rosyid bahwa zalim adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seperti mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal, mencelakakan, membunuh orang lain, memfitnah dan memutuskan tali persaudaraan.⁴⁵

Pemimpin yang zalim boleh dikategorikan sebagai pemimpin yang zalim pada diri sendiri serta menzalimi orang lain kerana seorang pemimpin yang zalim tidak mungkin hanya menzalimi orang lain tetapi tidak menzalimi diri sendiri.

⁴⁴ Murtadho Muthahhari, *op.cit* . hlm. 141

⁴⁵ Abdul Rosyid, "*Aqidah Akhlak*", Semarang, PT. Toha Putra, 2003, hlm 84

Oleh itu orang yang zalim pada diri sendiri dengan sengaja melakukan maksiat dan sesungguhnya azab yang pedih ke atas mereka.⁴⁶

Adapun Bentuk kezaliman di bagi dalam tiga bagian:

1. Zalim kepada Allah Swt

Yaitu perbuatan zalim yang berdasarkan perintah dan larangan Allah Swt.

Seperti : melanggar perintah dan larangan Nya, Syirik dan lain-lain

2. Zalim terhadap diri sendiri

Yaitu perbuatan zalim yang berasal dari diri sendiri.

Seperti: Minum khamer, berzina itupun jika dampaknya tidak meluas kemasyarakat lainnya.

3. Zalim kepada Orang Lain

Yaitu perbuatan yang berakibatkan orang lain merugi.

Seperti: Mencuri, memeras harta orang lain, merusak barang orang lain dll.⁴⁷

3. Macam-macam dan Kreteria Pemimpin Zalim

Kedudukan pemimpin sebagai penerus tugas rasul untuk menegakkan hukum Islam merupakan hal yang sangat penting, terlebih pemimpin yang mengurus masalah pemerintahan. Karena kepala negara adalah seorang yang ditunjuk untuk memikul tugas dan tanggung jawab atas masyarakat yang dipimpinnya, juga mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya, baik di bidang struktur pemerintahan, politik, sosial, kesejahteraan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Seorang kepala negara juga harus bisa memberikan contoh terbaik (teladan), karena Ia sebagai tumpuan pandangan dan sumber harapan bagi anggota masyarakatnya agar negaranya menjadi lebih baik. Maka terhadap orang yang akan menduduki jabatan penting itu ditetapkan syarat-syarat berat, baik syarat yang berdasarkan dalil yang berlandaskan nash-nash yang pasti (dalil naqli, al Qur'an dan Hadis), maupun yang berdasarkan dengan dalil-dalil 'aqli. Sehingga para juris Sunni mencita-citakan terwujudnya pelaksanaan syari'at Islam, keadilan, dan kesejahteraan rakyat melalui kekuasaan politik dalam pemerintahan, hal ini tercermin dalam syarat-syarat yang mereka kemukakan.⁴⁸

Pentingnya posisi dan kedudukan pemimpin, mendorong para ulama menetapkan beberapa kriteria (syarat-syarat) seorang pemimpin tanpa memandang siapa dan dari golongan mana ia berasal, asalkan ia mampu

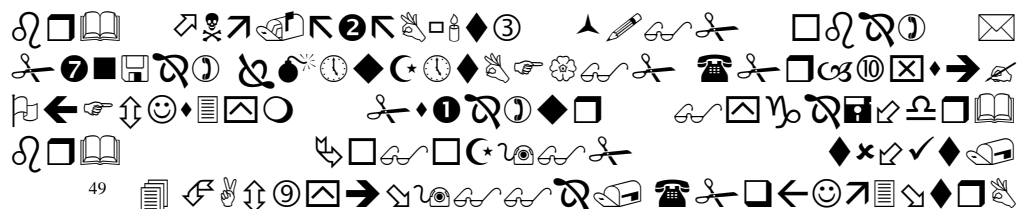
⁴⁷ Abdul Rosyid. *op cit*, hlm 86

⁴⁸ Imam al Mawardi, "*Al-Ahkaamus Sulthaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyah*", *op.cit.* hlm 6

menjalankan kepemimpinannya, maka ia bisa maju tampil untuk menjadi pemimpin, dengan catatan ia memiliki profesionalisme, sifat adil, jujur, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap yang dipimpinnya, mempunyai kewibawaan serta kemampuan untuk memimpin

Menurut al Mawardi, seorang kepala negara harus memiliki tujuh syarat sebagai berikut:

1. keseimbangan (*al-adalah*) ,dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:



Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Panca indranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya, sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.

⁴⁹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*” *op.cit*, hlm 69

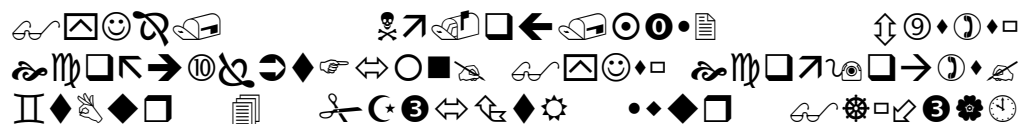
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan.
6. Keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Mempunyai garis keturunan dari Quraisy.⁵⁰

Adapun istilah Pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dan hak untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut melalui kepemimpinannya.⁵¹

Sedangkan zalim adalah Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim adalah setiap orang yang tidak adil kepada diri sendiri atau kepada orang lain.

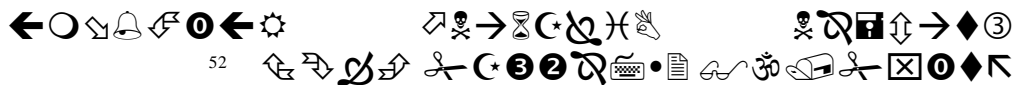
Dalam kriteria (syarat-syarat) Kepala Negara di atas terdapat enam macam kreteria pemimpin zalim yaitu :

1. Kezaliman (*al-dhulma*) yang memenuhi semua kreteria yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perbuatan zalim itu sangat dibenci Allah Swt. Karena akibatnya merugikan manusia dan Allah telah memuliakan manusia antara satu dengan lainnya. Sehingga seseorang tidak boleh berbuat aniaya terhadap orang lain. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Furqon ayat 19:



⁵⁰ Imam al Mawardi, *op.cit*, hlm 18

⁵¹ Muhammad Tholhah Hasan, *op.cit*, hlm 247

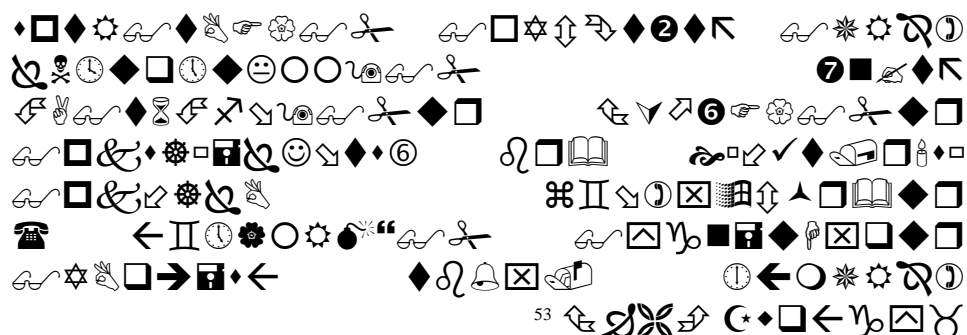


Artinya: Maka Sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan Maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar.

Dalam Firman Allah di atas jelas sekali melarang orang berbuat zalim, Bahkan Allah akan memasukan seseorang yang berbuat zalim ke api neraka. Artinya Allah sangat benci dan marah kepada orang yang selalu berbuat aniaya

2. Bodoh (*jahil*) yaitu kurangnya ilmu pengetahuan yang membuatnya tidak dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dalam kebijakan hukum.

Allah Swt berfirman dalam surat Al ahzab ayat 72:



Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.”

Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan.

⁵² Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahan” . *op cit*, hlm 288

⁵³ *Ibid*, hlm 341

3. Fasiq (berdosa) yaitu suatu perbuatan yang melanggar perintah dan larangan Allah Saw
4. Cacat pancaindra, dari pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya. Sehingga ia tidak dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.
5. Ia mempunyai rasa takut dan bimbang dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menimbulkan kebijakan pemerintah yang kacau dan niscaya akan timbul kelemahan-kelemahan pada segi-segi tertentu.
6. Memiliki sikap lemah yang membuat pertahanan rakyat atau stabilitas Negara berantakan. Dalam lingkup kepemimpinan perang, tentu saja penguasa lebih diprioritaskan seorang pemimpin yang mempunyai sikap pemberani dan kuat dalam fisik, dan sekalipun kualitas dalam beragama tidak terlalu tinggi, daripada orang yang berfisik lemah sekalipun dia saleh. Karena kelemahannya akan berdampak luas bagi umat muslimin.⁵⁴

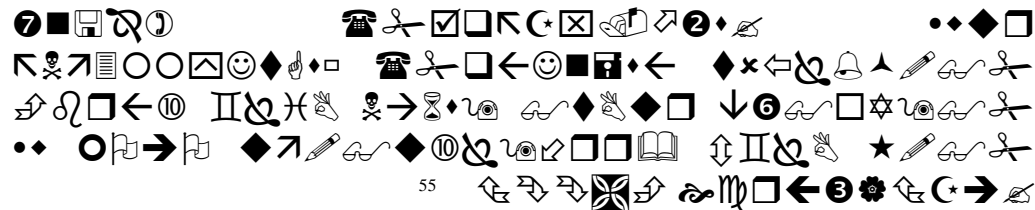
B. Dasar-Dasar Hukum Pemimpin Zalim

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar hukum mengenai pemimpin zalim menurut hukum Islam adalah :

⁵⁴ Lihat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Negara menurut Imam Mawardi dalam , *Al-Ahkaamus Sulthaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyah*, Terj, Abd Hayyie al Kattani, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam" Jakarta, Gema Insani Press. 2000 . adalah bentuk lawan kata dari pada pemikiran Imam Mawardi dalam menentukan kriteria atau macam-macam penguasa adil.

1) Al Qur'an

firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Hud ayat 113:



Artinya : “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim (kalau kamu berlaku demikian yakni cenderung) api neraka akan membakar kamu sedangkan kamu tidak ada sebarang pertolongan pun selain dari Allah. Kemudian dengan sebab cenderung itu kamu tidak akan mendapat pertolongan.”

2) Al-Hadis

Hadis Nabi diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar dari

Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَعْطَى إِمَامًا صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً فُؤَادِهِ فَلْيُطِئْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ

آخِرُهُ يُنَازِعُهُ فَاصْرُؤْهُ عُنُقَ الْآخِرِ.

Artinya : “Barang siapa yang telah memberikan kepercayaan kepada Imam (pemimpin) dengan kedua tangan nya dgn sepenuh hatinya maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya. apabila datang orang lain yang menentanginya dan melawannya maka pukullah lehernya.”⁵⁵

Rasullulah Saw bersabda:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مِنْ خَرَجِ مَنْ السُّلْطَانِ سَبَرَامَاتٍ مِيتَةٍ جَاهِلِيَةٍ.

Artinya : “Barang siapa yang tidak menyenangi pemimpin, maka kita dianjurkan untuk bersabar, karena bagi orang yang keluar dari

⁵⁵ Ibid, hlm 186

⁵⁶ Imam Muslim, “Shahih Muslim”, Beirut-Lebanon : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, t,th, hlm 72

muslim dengan golongan kaum tujuan untuk tidak menta'ati imam maka matinya dianggap seperti matinya kaum jahiliyah."⁵⁷

Dari ayat dan hadis yang telah di kemukakan di atas, telah jelas sekali berisi perintah untuk tunduk kepada Allah, Rasul dan ulil amri (pemerintah). Dan pembangkangan terhadap ulil amri (pemerintah) yang sudah di sepakati keabsahannya merupakan tindakan pengingkaran terhadap perintah dan perturan pemerintah itu termasuk kepada tindak pidana.

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa apabila kita tidak menyenangi pemimpin, maka kita dianjurkan untuk bersabar, karena bagi orang yang keluar dari golongan kaum muslim dengan tujuan untuk tidak mentaati imam maka matinya dianggap seperti matinya kaum jahiliyah.

C. Pendapat Para Ulama' tentang Pemimpin Zalim

Dalam ensiklopedi Islam bahwa pengertian ulama adalah "Orang-orang yang sangat tahu" dan "Orang-orang yang banyak ilmunya", demikian menurut arti lugawi. Sedangkan dalam pengertian istilah yang berkembang dikalangan pemahaman umat Islam, "*Ulama*" diartikan sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam dan ia mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta *berakhlakul karimah* dan ia sangat berpengaruh ditengah-tengah masyarakat.⁵⁸

Dari pengertian ulama di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁵⁷ Imam Bukhari , "*Shahih Bukhari*", Terj. Zainuddin Hamidy, Nasharuddin Thaha dan Rahman Zainuddin Jakarta: Penerbit Wijaya, 1981, hlm 125

⁵⁸ Departemen Agama RI, "*Ensiklopedi Islam*", Jakarta: CV. Anda Utama, hlm. 1249

1. Ulama adalah orang yang mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah Swt yang kemudian disebut “*Ulumudin*” maupun ilmu pengetahuan yang bersumber dari hasil penggunaan potensi akal indra manusia dalam memahami ayat kauniah yang kemudian disebut “*Ulumul Insaniah*” atau “*al-Ulum*” (sain).

2. Ulama sebagai pewaris para nabi yang mengemban tugas meneruskan perjuangannya dan penerima tantangan seperti yang dialami oleh yang mewariskannya.⁵⁹

Sejak kelahiran Islam sampai dewasa ini, eksistensi Ulama tetap diakui. Namun demikian, pengertian ulama yang baku belum ditemukan. Akibatnya penggunaan kata ulama yang tidak sesuai dengan Al qur'an dan As sunnah masih sering ditemukan ditengah masyarakat.

Ditengah masyarakat dewasa ini dikenalkan lima macam ulama, yaitu ulama plus, ulama pulus, ulama dunia, ulama akhirat dan ulama dunia akhirat. Sosok ulama yang terahir sangat dibutuhkan umat karena ia mampu menuntun masyarakat kepada kebahagiaan di dunia akhirat.⁶⁰

Adapun pendapat ulama yang mendasari untuk memerangi pemimpin zalim adalah:

Imam Abu Hanifah berkata :

“Apabila kita temukan seseorang pemimpin yang sudah tidak taat dengan perintah Allah, maka kita boleh melakukan pemberontakan terhadapnya, bahkan

⁵⁹ *Ibid*, hlm 1250

⁶⁰ Badruddin Hsubky, “*Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*”, Jakarta: PT Gema Insani Press, 1995, hlm 81

jauh dari itu Imam Hanifah mengatakan bahwa Kepemimpinan orang zalim itu adalah batal.”⁶¹

As-syahid Imam Hassan Al-Banna berkata:

“Apabila ia (pimpinan) abai, maka hendaklah dinasihatinya dan ditunjukinya, seterusnya digulingkan dan disingkirkan, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam penderhakaan kepada Allah””⁶²

An-Nawawi berkata:

“Berkata Al-Qodli ‘Iyadl; para ulama’ berijma’ bahwasanya kepemimpinan itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan jika seorang pemimpin itu kafir, ia dipecat – sampai perkataannya – jika pemimpin itu kafir, atau mengganti syari’at atau dia berbuat bid’ah, maka gugurlah kekuasaannya dan gugur pula kewajiban taat kepadanya. Dan kaum muslimin wajib untuk mencopot kekuasaannya lalu menggantinya dengan imam yang ‘adil jika hal itu memungkinkan’.”⁶³

Pendapat para ulama di atas sebagaimana seseorang muslim di haruskan mempunyai keberanian dalam melakukan kritikan ataupun cara-cara lain yang di tujuan terhadap pemimpin zalim dan kita di haruskan memerangi suatu kezaliman karena mengucapkan kata yang benar (haq) atau melakukan kretikan dengan cara lain dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di depan pemimpin yang berbuat zalim adalah merupakan suatu tindakan jihad yang sangat disukai oleh Allah Swt. Mengatakan kebenaran atau melakukan perlawanan di depan pemimpin yang zalim memang suatu risiko yang sangat besar, karena hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang melakukannya.

⁶¹ M.Yusuf Musa. “Politik dan Negara dalam Islam”, Yogyakarta: Penerbit Pustaka SLI, 1991. hlm. 336

⁶² <http://hanifah.multiply.com/journal/hem/2007/11/25/kaedah-dalam-memperbetulkan-pemerintah-penguasa>, di down load tanggal 21/3/08.

⁶³ Ibid

Dan bahwa semua adalah pemimpin walaupun hanya terhadap diri sendiri dan mempunyai kewajiban untuk memerangi kezaliman dan kemungkaran walaupun hal itu dianggap memberontak yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini karena setiap manusia adalah pemimpin. Yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dan perdamaian demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun pendapat ulama yang mendasari untuk tidak memerangi pemimpin zalim adalah:

Al`Aini berkata:

*“Tidak harus menggulingkannya (penguasa) dari kekuasaan disebabkan itu (fasiq dan zalim).”*⁶⁴

Al-Kirmani berkata:

*“Para fuqaha telah berijma’ bahawa pemimpin mutaghallib (yang merampas kuasa dan dilantik bukan dari perlantikan rakyat), wajib mentaatinya selama mana dia mendirikan solat berjamaah dan jihad, kecuali jika berlaku kekufuran yang sohih. Pada ketika itu, tidak wajib mentaatinya, bahkan wajib bermujahadah terhadapnya bagi yang mampu.”*⁶⁵

Asy-Syaukani berkata;

*“Tidak harus melawan para pemimpin dengan pedang, selama mana mereka mendirikan solat.”*⁶⁶

⁶⁴ <http://sauqiy.wordpress.com/2007/11/20/kapan-kewajiban-memerangi-penguasa-murtad>.
di down load pada tanggal 21/3/08.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

Pendapat para ulama di atas berdasarkan juga pada larangan ke atas umat Islam untuk saling berperang antara satu sama lain. Jumhur para ulama mengatakan bahwa pemimpin tidak dicopot atau digulingkan karena fasiq, zalim dan tidak menunaikan hak-hak, dan ia tidak diturunkan dari jabatannya dan tidak boleh keluar memberontak ke atasnya dengan hal-hal itu, akan tetapi wajib menasihatinya dan menakut-nakutinya berdasarkan hadis yang ada dalam masalah itu.

Walaupun sebahagian ulama mengatakan bahawa penentangan boleh dibuat jika pemimpin melakukan kekufuran yang tsabit dengan dalil yang nyata, namun jelas dari pandangan mereka bahawa tentangan bersenjata adalah suatu yang tidak digalakkan sama sekali kerana ia sering mengakibatkan pertumpahan darah, kerusakan dan mudharat yang lebih besar.

Tidak dinafikan terdapat pandangan beberapa ulama yang mengharuskan penentangan bersenjata bahkan menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Namun pandangan jumhur yang dinyatakan di atas lebih kuat dan dekat pada kebenaran.

BAB III

RIWAYAT IBNU TAIMIYAH DAN PEMIKIRANNYA

A. Biografi Ibnu Taimiyah

Pada saat agama Islam menghadapi gejolak yang luar biasa, baik yang disebabkan karena perpecahan intern umat Islam sendiri atau karena permusuhan dengan barat (Nasrani) lahirlah seorang bayi yang kelak ditakdirkan Allah menjadi seorang intelektual muslim terkemuka dan oleh banyak orang disebut-sebut sebagai seorang *mujaddid* (pembaharu), dia adalah Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Taqiyyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Al-Khadhri bin Muhammad bin Al-Khadhri bin Ali bin Abdullah, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah.¹

Ia lahir di Harran, sebuah kota kecil beberapa kilometer dari kota Damaskus pada hari Senin, 10 Rabi'ul Awwal, 661 Hijriah (12 Januari 1263 Miladiah).² Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang amat terpelajar dan sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. Ayahnya adalah Syihabuddin Abdul Halim bin Abdus Salam (627-682 H) adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan di Masjid Jami' Damaskus. Ia bertindak sebagai khatib dan Imam.³

¹ Sebagaimana di nukil oleh Qamaruddin Khan, "*Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*", Bandung: Pustaka Salman, ITB, 1983. dari Qomaruddin khan diambil dalam buku Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharim Al-Maslul 'Ala Syatim Al-Rasul*, Beirut-Lebanon : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah,t,th, hlm 5.

² Ibnu Taimiyah, "*Al-Furqan Baina Auliya Al-Rahman Wa Auliya AL-Syaithan*", Terj. Pustaka Panjimas, " Al-Furqan Antara Kekasih Allah Dan Kekasih Syaitan, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1989, Cet Ke-1, hlm vi.

³ Ali Hasan, "*Perbandingan Mazhab*", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, Cet Ke-4, hlm 282.

Para sejarawan berbeda pendapat tentang ibunya. Sebagian mengatakan bahwa ibunya adalah orang Arab, sedang pendapat lain mengatakan bahwa ibunya adalah orang Kurdi, ia sangat berperan dalam mendidik dan mengembangkan dirinya.⁴

Kakeknya yang bernama Majuddin Abi Al-Barakat Abdus Salam bin Abdullah (590-620 H), oleh Al-Syaukani (1172-1250 H) dinyatakan sebagai seorang mujtahid mutlak. Ia juga seorang alim terkenal ahli tafsir (*mufasssir*), ahli al-hadis (*muhaddis*), ahli ushul al-fiqh (*ushuli*), ahli fiqh (*al-faqih*), Ahli Nahwu (*an-nahwiyy*), dan beliau juga seorang pengarang (*mushannif*)⁵ Al-khatib Fakhruddin paman Ibnu Taimiyah dari pihak bapak adalah seorang cendekiawan muslim populer dan seorang pengarang yang produktif pada masanya. Dan Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim (692- 727 H), adik laki-laki Ibnu Taimiyah yang juga ternyata dikenal sebagai ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kewarisan Islam (*faraidh*), ilmu-ilmu al-hadis (*ulum al-hadis*), dan ilmu pasti (*al-riyadiyah*).⁶

Diri kutipan di atas dapatlah kita pastikan bahwa keturunan Ibnu Taimiyah adalah keturunan orang yang berpendidikan, dimulai dari kakeknya, ayahnya, pamannya dan adik nya adalah ulama' yang cukup terkenal dan cukup disegani pada massanya, sehingga lingkungan keluarganya mampu menjawab dan menangkis pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang sangat majemuk.

⁴ Ibnu Taimiyah, "*Tafsir Al-Kabir*", Jilid 1, Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t,th, hlm 37, lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah*, Juz 2, Beirut- Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1987, hlm 601.

⁵ Muhammad Amin, "*Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*", Jakarta : INIS, 1991, hlm 8.

⁶ *Ibid*

Di Damaskus Ibnu Taimiyah mulai belajar dari ayahnya sendiri kemudian dilanjutkan dengan berguru atau belajar pada Ali Zainal ibn al-Maqoddisi, Najam Al-Din ibn Asaki, Zainab binti Makki, dan ulama'-ulama' terkemuka pada saat itu.⁷

Semenjak kecil Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang anak yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, tinggi kemauan dalam studi, tekun dan cermat dalam memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat (pendirian), ikhlas dan rajin dalam beramal shaleh, rela berjuang dan berkorban untuk jalan kebenaran.⁸

Ketika berumur enam tahun, ia dibawa ayahnya Syekh Syihabuddin Abdul Halim bin Abdus Salam ke Damaskus bersama saudaranya. Di sana ia berdomisili dan dari ulama di kota itu ia mempelajari dan mendalami berbagai cabang ilmu keislaman. Dalam bidang hadis ia belajar antara lain kepada Ibnu Abdul Daim seorang ahli hadis kenamaan di negeri itu, dari Syekh Syamsuddin al-Hambali, Syekh Jalaluddin al-Hanafi, dan lain-lain. Kemudian ia mendalami ilmu fikih, bahasa arab, tafsir dan usul fikih.⁹

Ia terkenal sebagai seseorang yang sangat kuat hafalannya. Diriwayatkan bahwa tak satu huruf pun al-Qur'an dan hadis yang telah dihafalnya lupa. Dari kecil dia terkenal rajin menghadiri diskusi-diskusi ilmiah. Berkat keuletan dan ketekunannya, dalam usia tujuh tahun ia sudah menghafal al-Qur'an dengan amat baik dan lancar. Selain itu, penguasaannya yang prima terhadap berbagai ilmu yang diperlukan untuk memahami al-Qur'an menyebabkan ia tampil

⁷ Munawir Sjadzali, *"Islam and Govermental Sistem"*, Jakarta: INIS, Th, 1991, hlm, 56.

⁸ *Ibid.*

⁹ Harun Nasution, *"Ensiklopedi Islam Di Indonesia"*, Jakarta: Jambatan, 1992, hlm.384

sebagai ahli tafsir, disamping juga ahli al-hadis. Keahliannya dalam bidang al-hadis ini tampak terlihat sejak masa kecil. Suatu ketika, salah seorang gurunya mendiktekan 11 matan al-hadis kepadanya, ketika ia disuruh mengulangi al-hadis tersebut, ia telah menghafalnya. Ia juga mempelajari berbagai kitab al-hadis *Al-Jami' Bain as- Shahihain*, karya Imam Al-Hamidi, merupakan kitab al-hadis pertama yang dihafalnya. Selanjutnya ia mempelajari berbagai kitab-kitab al-hadis termasyhur seperti *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Jami' Al- Tirmizi*, *Sunan Abi Daud*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan An-Nasa'i*, dan *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*.¹⁰

Sebagai ilmuwan Ibnu Taimiyah mendapatkan reputasi sebagai seseorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani, serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam bidang tafsir, al-hadis, teologi dan fiqh, khususnya fiqh Hambali. menurut Syaukani, pada waktu itu, setelah Ibnu Hazm, tidak ada seseorang yang tingkat keilmuannya setinggi Ibnu Taimiyah. Kalau saja belum terjadi salah pengertian tentang kata istilah “*fundamentalisme*“, dia dapat dimasukkan dalam kategori golongan fundamentalis, yang mendambakan kembali pada kemurnian ajaran Islam sesuai dengan kandungan al-Qur'an dan al-hadis. Dia penentang keras terhadap setiap bentuk *khurafat* dan *bid'ah* atau inovasi terhadap agama. Dengan sikapnya yang demikian itu, dia dimusuhi oleh

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, Jilid 6, Jakarta : PT Intermasa, 1997, Cet Ke-1, hlm 624

banyak kelompok Islam, dan kerap kali berlawanan pendapat dengan kebanyakan ulama ahli hukum.¹¹

Pada umur sembilan belas tahun ia telah mulai mengarang dan memberi fatwa. Ketika Ibnu Taimiyah berusia dua puluh satu tahun, ia telah menyelesaikan pendidikannya dan menjadi ulama' yang disegani, pada waktu itu ayahnya telah meninggal dunia, namun demikian jabatan maha guru dibidang hadis, suatu gelar yang dipegang oleh ayahnya di berbagai madrasah terkemuka di Damaskus, berangkat dari sinilah tampaknya karir Ibnu Taimiyah selalu meningkat dari tahun ke tahun namanya menjadi terkenal dan dalam waktu yang singkat ia telah menjadi masyhur melebihi ulama'-ulama' lainnya, yang terkemuka pada saat itu seperti Ibnu Daqiq al-Id , Kamaluddin al-Zimlikani al-Zahabi.¹²

Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang terpelajar dan terhormat. Ibnu Taimiyah memperoleh pendidikannya di tengah lingkungan keluarga sendiri yang secara turun-menurun, merupakan tokoh-tokoh cerdik pandai. Selain belajar dari lingkungan keluarga sendiri, ia pun pergi belajar kepada sejumlah ulama terkemuka di kota Damaskus pada masa itu.

Meskipun Ibnu Taimiyah besar dalam naungan keluarga bermazhab Hambali, wawasannya sangat luas meliputi mazhab-mazhab hukum lainnya. Bahkan itu saja, pengetahuannyapun menjangkau soal filsafat, sufisme, kalam, mantik, sastra, sejarah dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

¹¹ Munawir Sjadzali, *"Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan pemikiran"*, Jakarta : UI-Pess, 1993, Edisi Ke-5, hlm 80.

¹² Qomaruddinkhan, *"Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah"*, Bandung: PT, Pustaka Salman, 1983, hlm, 15-16.

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai pemikir yang tidak menentang ijihad empat mazhab, tetapi mengambil pendapat para imam itu dengan menyebut perbedaan atau kesepakatan pendapat diantara keduanya, baru kemudian dipilih yang paling kuat menurut pendapatnya. Ibnu Taimiyah menulis masalah-masalah fihiyyah yang ia himpun dari berbagai pendapat dalam fiqh Islam tanpa terikat oleh mazhab tertentu, dengan judul pilihan-pilihan masalah fiqh. Tulisannya mengherankan sebagian orang karena di dalamnya Ibnu Taimiyah memberikan kemudahan bagi umat, padahal selama ini banyak orang mengenal tokoh ini sebagai orang yang kaku dan keras (dalam masalah Hukum), sehingga dengan buku ini sirnalah citra tersebut.¹³

Tidak mengherankan apabila terdapat banyak pertentangan antara Ibnu Taimiyah dengan ulama-ulama semasanya, karena kemunculannya telah membawa pemikiran-pemikiran yang ulama-ulama waktu itu menganggapnya tidak sejalan dengan pemikiran yang telah lama merekawarisi dari pendahulu. Ia mengumandangkan agar umat Islam kembali kepada al-Qur'an dan hadis serta mencontoh para sahabat dan salaf saleh, Ia menginginkan pemurnian agama. Hal yang paling ditekankannya dalam usaha pemurniannya ialah agar umat Islam membuang jauh sifat fanatisme dan kejumudan.¹⁴

Sebagai ulama' Ibnu Taimiyah mempunyai pengetahuan yang luas mengenai ilmu rijalul hadis (*perowi hadis*) mengenai hadis-hadis yang di dalamnya semuanya dikembalikan (dirujukkan) kepada kitab hadis yang enam.

¹³ Untuk lebih jelasnya lihat Abdul Ghaffar Aziz, "*Al-Islam Al-Siasi Baina Al-RAfidhina Lahu Al-Mughalina Fih*", Terj. Pustaka Firdausa "Islam politik, Pro Dan kontra, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993, Cet Ke-1, hlm 224.

¹⁴ Harun Nasution. *op, cit*, hlm. 384

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa setiap hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah bukanlah hadis, namun beliau mengatakan kekuasaan masih di tangan Allah Swt.¹⁵

Perpaduan antara kecerdasan otak dan ketekunan dalam belajar serta kepribadian nya yang dihiasi dengan akhlak yang mulia, ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi ulama' besar yang sangat berprestasi. Dalam pada itu ia dapat digolongkan sebagai salah seorang tokoh yang pemahaman keagamaannya boleh dikatakan mandiri dalam pengertian tidak mau terikat pada pemahaman siapapun dan aliran Islam yang manapun. Namun bersamaan dengan itu dia tidak menolak untuk menerima dan membela pendapat siapa dan aliran Islam manapun jika menurut penilaian nya sejalan dan sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁶

Ibnu Taimiyah menekuni setiap masalah dengan sepenuh hati dan dengan sedalam-dalamnya. Kadang-kadang untuk mempelajari satu masalah ia menghabiskan waktu sampai beberapa malam dan masalah tersebut tidak akan ditinggalkannya sebelum dapat dipecahkan dengan memuaskan, ia merenunginya dengan perenungan yang sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Saw dan kesimpulan-kesimpulanya selalu sesuai menurut akal pikiran dengan pertimbangan-pertimbangan dan membanding-bandingkan secara berulang-ulang sehingga kebenarannya tampak jelas di depan matanya. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang cendekiawan yang paling kritis dan paling kompeten yang dapat menyimpulkan peraturan-peraturan dan hukum dari

¹⁵ Qomaruddin khan, *op.cit*, hlm. 19

¹⁶ Jeje Abdul Rajak, "Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah", Surabaya : PT. Bina Ilmu. Th, 1999, hlm. 118.

hadis-hadis dan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁷ Karena semangatnya dalam pemikiran dan penyelidikan yang bebas dan segar, tidak terikat dengan pemikiran atau penyelidikan lain, maka dari itu ia dapat dikatakan sebagai Bapak Spiritual Modernis Islam di seluruh dunia pada massanya.¹⁸

Berpikir bebas merupakan suatu kualitas yang penting dalam perkembangan mental dan personalitas intelektual nya yang membuatnya lebih unggul dari tokoh-tokoh yang semasa dengannya. Apabila dihadapkan kepadanya sebuah masalah maka masalahnya itu akan dipelajari nya menurut al-Qur'an, hadis dan tradisi-tradisi (*asar*) dari orang-orang muslim yang saleh. Jadi ia tidak mengikuti pendapat-pendapat cerdik dan pandai pada masa itu atau pun pendapat-pendapat yang diyakini oleh banyak orang. Ia akan berpegang teguh kepada kesimpulan-kesimpulan yang diperolehnya di dalam mempelajari ajaran Islam yang murni, meskipun ia akan mendapat hujatan-hujatan yang sangat menyakitkan, namun ia tidak mau menarik kata-katanya kembali. Kualitas kepribadian seperti inilah yang menolong nya dalam perjuangan menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni. Ia meninjau berbagai masalah dengan caranya sendiri tanpa dipengaruhi oleh apapun kecuali al-Qur'an, as-Sunnah dan praktek-praktek para sahabat Nabi Saw, secara beberapa tokoh sesudah mereka. Demikianlah cara Ibnu Taimiyah memberi debu-debu *bid'ah* yang mengotori Islam selama beberapa abad.¹⁹

¹⁷ Qomaruddinkhan, *op. cit*, hlm. 27, 28

¹⁸ Ahmad Syafi'I Ma'arif, "*Islam dan Masalah Kenegaraan*", Jakarta: LP3ES, Th, 1996, hlm.

¹⁹ Qomaruddinkhan, *op.cit*, hlm, 28-29.

Ibnu Taimiyah tidak hanya seorang intelektual yang tinggi tetapi ia juga seorang yang gagah berani, kegagahan berani nya itu dipadukan dengan kesabaran dan ketabahan. Ia tidak puas dengan hanya duduk di dalam masjid untuk memberikan ceramah-ceramah atau fatwa-fatwa pada para murid-muridnya, atau menyibukkan dari di dalam diskusi-diskusi kesastraan.²⁰

Pada tahun 1313 M, Ibnu Taimiyah diperintah untuk memimpin peperangan ke Syiria, dan ia diangkat menjadi profesor pada sekolah tinggi, tetapi pada bulan Agustus 1318 M ia dilarang mengeluarkan fatwa. Meskipun demikian murid-muridnya dapat mengumpulkan fatwa-fatwanya yang kemudian dicetak di Mesir, yang merupakan peninggalan yang berharga. Di antara murid-muridnya yang menjadi sesepuh ulama ialah Imam Ibnu Qoyim al Jauziyah. Ia banyak mengarang buku bersama gurunya (Ibnu Taimiyah) di penjara Damaskus.²¹

Profesor yang berdarah pejuang dan berjiwa militer ini pernah ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melawan dan mengalahkan tentara Mongol yang telah berada di dekat Damaskus dalam suatu perang suci (*Holi War*). Ibnu Taimiyahlah yang menjadi panglima pasukan dan memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang di suatu tempat yang bernama Sahab, dekat ibukota Syiria sekitar tahun 1299 M.

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, di lokasi sosial dan dekadensi akhlak dan moral. Kekuasaan

²⁰ *Ibid*, hlm, 30.

²¹ Muslim Ishak, "*Sejarah dan Perkembangan Teologi Islam*", Semarang: Duta Grafika, 1988, hlm.

pemerintah tidak lagi berada di bawah kekuasaan khalifah yang bertahta di Baghdad melainkan pada penguasa-penguasa daerah atau wilayah baik yang bergelar sultan, raja atau amir, dan wilayah kekuasaan mereka dipersempit bahkan ada yang direbut oleh penguasa Tar Tar dari timur atau Crusades dari barat.²²

Jatuhnya Baghdad ke tangan Hulagu dari Tar Tar mengakibatkan umat Islam mengalami kemunduran, yang berarti berakhirnya dinasti Abbasiyah, yang merupakan puncak dari disintegrasi negara. Pada saat ini tarikat berkembang, sebagai kompensasi dan pelipur lara umat Islam yang mengalami kehancuran. Ibnu Taimiyah mulai melancarkan gerakan *farifikasi* (pemurnian) yang mengajak umat Islam kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, filsafat dan tasawuf ditentang, karena dirasakan telah mengantarkan umat Islam untuk menjauhi ajaran Islam yang benar. Gerakan inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab.²³

Ibnu Taimiyah hidup dibawah kekuasaan Mamluk, yang mana masyarakatnya pada masa itu sangat beraneka ragam baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran budaya, maupun hukum. Hal ini menimbulkan kerawanan perpecahan dalam kehidupan bernegara, yang lebih parah lagi pada waktu itu masalahnya bukan hanya banyak agama tapi juga banyaknya mazhab, termasuk juga mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.²⁴

²² Munawir Sjadzali, *op, cit*, hlm, 80

²³ Ahmad Azhar Basyir, "*Refleksi Atas Persoalan Keislaman*", Bandung: PT.Mizan, Th, 1996, hlm, 23.

²⁴ Munawir Sjadzali, *op, cit*, hlm, 81.

Kalau Ibnu Taimiyah sering masuk penjara pada saat itu tidak selalu disebabkan karena memusuhi penguasa, tetapi juga karena pengaduan dan tuntutan dari sekelompok ulama' dari golongan mazhab lain, terutama oleh ketajaman kritikan nya terhadap kebiasaan memuja para Nabi dan para wali. Ibnu Taimiyah berkeyakinan bahwa kebanyakan akidah kaum muslimin dan perbuatan-perbuatan mereka bertentangan dengan tauhid ibadah, seperti keyakinan terhadap syafa'at atau tawasul terhadap para wali.

Pada bulan Agustus 1302 M atau bulan Rajab 720 H, Ibnu Taimiyah ditangkap dan dimasukkan kembali ke dalam penjara yang terletak dalam benteng Damaskus setelah lima bulan delapan belas hari kemudian ia dibebaskan kembali, dan ia kembali beraktifitas seperti biasanya menjalankan tugasnya sebagai ulama'. Pada bulan sya'ban 726 H atau Juli 1328 M, Ia ditangkap kembali serta dimasukkan ke dalam penjara, keadaan ini dipergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir al-Qur'an dan berbagai karya lainnya, walaupun dengan demikian jiwanya sangat tersiksa ketika tidak diizinkan lagi untuk menulis, segala tinta yang tersedia, diatas meja kamar penjara nya kembali diambil semua oleh pemerintah, dua puluh hari kemudian ulama' besar, pahlawan besar yang berjuang di medan perang, dan berjihad dengan lisan maupun dengan tulisan melalui mata pena nya dan mata pedang nya itu berpulang ke rahmatullah meninggalkan dunia yang fana ini dalam penjara yang sempit itu, tersungkur diatas tikar sembahyang nya setelah beliau membaca

ayat suci al-Qur'an surat al-Qamar yang bertepatan pada tanggal 20 Zulqa'dah 728 H atau 26 September 1328 M.²⁵

B. Pola Pikir dan Karya-Karya Ibnu Taimiyah

1. Pola Pikir Ibnu Taimiyah

Pola pikir Ibnu Taimiyah adalah memurnikan ajaran Islam yang bersumberkan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul khususnya dalam memerangi *bid'ah* dan kepercayaan orang (pengkultusan) terhadap para Nabi dan wali, yang menjadi kepercayaan atau budaya masyarakat pada saat itu. Memerangi pemikiran orang-orang syi'ah yang menurut Ibnu Taimiyah pada umumnya mereka selalu memainkan peranan yang *destruktif* dan *negatif* di dalam sejarah Islam, mereka telah mencela sahabat-sahabat yang mulia, ulama'-ulama' terkemuka, ahli-ahli hukum, dan teolog-teolog muslim.²⁶

Maksud dari Ibnu Taimiyah yakni berusaha memperbaiki situasi masyarakatnya dan mengikis habis segala kebobrokan baik moral maupun sosial sebagai akibat dari berbagai malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Krusades yang tidak ada hentinya, dan serbuan bangsa Tar Tar.²⁷

Sesuai dengan sikapnya, Ibnu Taimiyah memasukkan kembali doktrin, keterlibatan Tuhan dalam tingkah laku (perbuatan) dan nasib manusia, dan dari doktrin ini ia langsung menyimpulkan ide tentang Tuhan sebagai pemerintah atau

²⁵ Firdaus A.N. "*Pedoman Islam dalam Bernegara*", Jakarta: PT. Bulan Bintang, Th, 1989, hlm, 246.

²⁶ Qomaruddinkhan, *op, cit*, hlm, 245.

²⁷ Munawir Sjadzali, *op.cit*, hlm, 82.

pembuat syari'at.²⁸ Selanjutnya ia terang-terangan menunjukkan pertentangan yang ada di dalam dasar antara rumusan-rumusan *teologi ortodok* (Sunni), dan praduga-praduga hukum.²⁹

2. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir Islam kenamaan, ia tidak hanya terkenal karena karisma, sistem berpikir serta pengaruhnya, melainkan ia juga seorang penulis yang produktif, hampir tidak dapat dibayangkan betapa tingginya disiplinnya pada waktu dicelah-celah kesibukannya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang digelutinya sebagai Dai, Ulama yang banyak dikunjungi orang, sebagai pejuang yang terjun ke kancah politik, ia pun masih dapat menyisihkan waktunya yang ada, untuk mengisi kegiatan mengarang dan menulis buku.

Dilihat dari hasil karya tulisnya, Ibnu Taimiyah tergolong sebagai penulis yang berhasil dan produktif. Karangan-karangannya tidak kurang dari lima ratus buah jilid buku, besar kecil, sampai dengan yang berjilid-jilid dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah (*teologi*), politik (*kenegaraan*), hukum maupun filsafat, Fazlur Rahman salah seorang pemikir Islam yang mengikuti gaya pikiran Ibnu Taimiyah dewasa ini.

Namun karena keterbatasan cakupan kajian karya ilmiah ini, maka penulis hanya dapat memaparkan sebagian kecil dari karya-karya Ibnu Taimiyah tersebut.

²⁸ Fazlur Rahman, "*Islam*", terjemahan Ahsin Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994, hlm, 162.

²⁹ *Ibid*, hlm, 163.

A. Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam Bidang Politik

1. As-Siyasah as-Syari'ah fii Islahir Ra'yi Wa Ra'iyah

Dari karya Ibnu Taimiyah diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kandungannya tidak hanya menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintahan, dan bagi rakyat memenuhi amanah, realisasinya dalam pembagian zakat, tetapi juga menegakan keadilan dan melaksanakan *hudud* (hukum-hukum yang harus ditegakkan terhadap kejahatan sesuai dengan al-Qur'an). Karya ini terdiri dari satu jilid yang berjumlah 190 halaman.

Dalam masalah pentingnya pemerintahan, Ibnu Taimiyah didalam buku ini, ia mengatakan bahwa untuk melaksanakan *amar ma'ruf dan nahi munkar* dalam menegakan keadilan dan keterjaminannya dalam melaksanakan ibadah (shalat, haji) dan mendorong orang yang teraniaya, semuanya itu tidak dapat terlaksana dengan baik kecuali dengan kekuasaan dan pemerintahan, karena itu ia mengatakan bahwa “ Sultan adalah bayangan Tuhan di bumi dan Enam puluh tahun di bawah pemerintahan yang zalim lebih baik dari pada semalam tanpa pemerintahan”.³⁰

2. Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah

Buku ini ditulis Ibnu Taimiyah sebagai jawaban sekaligus sebagai bantahan terhadap karya Jamaluddin al-Muthahar al-Hilli yang berjudul *Minhaj al-Karamah Fi Ma'arif al-Imamah* (jalan kemuliaan mengenai pengetahuan para Imam). Karya ini ditulis Jamaluddin untuk mempengaruhi raja-raja Mongol agar

³⁰ Ibnu Taimiyyah, “*al-Siyasah al-Syar'iyah*”, Mesir: Darul al kitab ala arabi, tt. hlm.162

menganut paham Syi'ah. Minhaj as-Sunnah di tulis oleh Ibnu Taimiyah untuk membendung meluasnya paham syi'ah dinegara-negara Islam sebelah Timur, buku ini terdiri dari empat *Volume*. *Volume* satu berjumlah 276 halaman, *Volume* dua berjumlah 262 halaman, *Volume* tiga berjumlah 278 halaman, *Volume* empat berjumlah 300 halaman. Yang di terbitkan oleh Darul al-Kitab al-Alamiyah, Bairut, Mesir.

Dengan disertai argumentasi yang logis, akurat, dan mendalam, Ibnu Taimiyah mematahkan dalil-dalil teori tersebut. Karena Ibnu Taimiyah sangat menentang konsep imamah syi'ah. Bahkan ia menganggapnya sebagai konsep irrasional dan berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.³¹

Keyakinan syi'ah bahwa imam adalah *ma'sum* dari dosa besar dan kecil serta imamah (kepemimpinan negara) merupakan masalah aqidah, hal inilah yang tidak dapat diterima oleh Ibnu Taimiyah. Didalam buku ini ia mengatakan “sekiranya masalah imamah merupakan bagian dari iman maka sudah tentu Nabi Saw, sudah menjelaskan pada generasi sesudahnya, “sebagaimana beliau menjelaskan masalah shalat, zakat, puasa dan haji. Juga sudah barang tentu beliau jelaskan pula masalah iman kepada Allah Swt, dan hari akhir, tetapi sayangnya masalah iman tidak ada penjelasannya secara mendetail didalam al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagaimana penjelasan prinsip-prinsip lainnya.³²

³¹ M. Arskal Salim, “*Etika Intervensi Negara Perspektif politik Ibnu Taimiyah*”, Jakarta: Logos, Cet ke-1, 1999, hlm. 42

³² Ibnu Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Riyadh: al-Riyad al-Hadisati, jilid I, tt. hlm 21.

B. Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam Bidang Hukum Islam

1. Majmu' Fatawa

Karya Ibnu Taimiyah ini terdiri dari 30 Volume, Karya ini sangat penting karena berisikan beberapa ratus keputusan hukum hasil Ijtihad Ibnu Taimiyyah.

Salah satu keputusan hukum Ibnu Taimiyah tersebut adalah tentang shalat *nisfu sya'ban* sendirian atau secara berjamaah sebagaimana yang dikerjakan oleh golongan salaf, maka hal itu merupakan hal yang baik.

Jika *nisfu sya'ban* itu dikerjakan di masjid dengan aturan-aturan tertentu, misalnya melaksanakan shalat tersebut seratus rakaat dengan membaca *surat Al-Ikhlash* seribu kali secara terus menerus, maka hal ini hukumnya *bid'ah*. Karena tidak ada seorangpun dari pemimpin-pemimpin Islam mengenalkan amalan ini karena tidak ada tuntutan dari Rasulullah Saw.³³

Ia juga menulis tentang masalah shalat sunnah lailatul qadar yang dilaksanakan setelah shalat tarawih pada bulan Ramadhan. Menurutnya, amalan ini merupakan amalan yang *bid'ah*. Karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad Saw, beliau juga para sahabat, tabi'in dan pemerintahan-pemerintahan Islam. Dalam hal tersebut hendaklah dicegah dan ditinggalkan.³⁴

³³ Ibnu Taimiyah, "*Majmu Fatawa*", Bairut: Darul Fikr 1920. Jilid I, hlm 146

³⁴ Ibnu Taimiyah, *op. cit*, hlm. 247

Disamping karya tersebut Ibnu Taimiyah menulis karyanya yang lain dalam bidang hukum Islam yaitu:

2. *Al-Qiyas Fi Syarh al-Islam*

3. *Risalah Khilaf al-Ummah Fi al-Ibadah*

4. *Al-Sarim al-Maslul 'al syatim al-Rasul*

Di dalam kitab ini menerangkan bahwa masuknya seseorang ke dalam Islam tidaklah menggugurkan hukuman atas tindakan yang telah diperbuatnya.

5. *al-Hisbah Fil-Islam*

Buku ini membahas cara penggunaan prinsip menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan, terutama sekali sehubungan dengan administrasi Negara. Dan juga berisi pernyataan- pernyataan mengenai hakikat dan fungsi Negara.³⁵

C. Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam Bidang Filsafat

1. *Al-Rad 'Ala al-Mantaqiyah*

Hal itu dapat dimengerti karena kitab-kitab tersebut karya lain-lainnya yang sejenis, iatulis sebagai koreksi dan kritiknya terhadap berbagai teori keagamaan yang menurut penilaiannya tidak benar.³⁶

³⁵ Qomaruddin Khan, *op. cit*, hlm. 6

³⁶ Nanang Fakhruddin, "*Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Al-Amwal Al-Sulthaniyyah* , Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang : Perpustakaan Fakultas syari'ah IAIN Walisongo, 2002, hlm 17.

2. An-Naqdu al-Mantiq

Bila diperhatikan karya-karya Ibnu Taimiyah yang ratusan jumlahnya, dapat kita lihat bahwa sesungguhnya Ibnu Taimiyah memiliki berbagai keahlian dalam berbagai disiplin dan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya ahli dalam bidang aqidah (*teologi*) saja, hukum dan filsafat tetapi juga ahli di bidang politik (*pemerintahan*).

D. Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam Bidang Aqidah (teologi)

1. Tawasul wal-Wasilah

Buku ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah dengan tujuan agar umat Islam menjauhi perbuatan-perbuatan *bid'ah*, seperti berziarah ke kuburan dengan tujuan meminta pertolongan atau syafa'at kepada roh yang sudah terkubur, sekalipun kuburan Nabi tetap syirik.³⁷ karena pada waktu itu kebanyakan aqidah dan amalan umat Islam bertentangan dengan *tauhid* dan *mu'amalah* (ibadah), seperti keyakinan terhadap *syafa'at* atau tawasul terhadap Wali-wali Allah.

Adapun intisari dari isi buku ini, yakni tawassul dibagi kedalam tiga macam. *Pertama* adalah berarti taat dan patuh, hal ini diwajibkan guna kesempurnaan iman. *Kedua* adalah Doanya dan syafa'atnya, ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, sewaktu diakhirat kelak. *Ketiga* berarti bersumpah pada Allah Swt, dan meminta dengan zatnya. Hal ini tidak pernah dilakukan baik pada waktu nabi masih hidup maupun setelah beliau wafat karena itu yang terahir ini tidak diperbolehkan.³⁸

³⁷ Ibnu Taimiyah, "*Tawasul Wal-Wasilah*", Terj. Halimuddin, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm 33

³⁸ Kesimpulan Penulis, Ibnu Taimiyah, "*Tawasul Wal-wasilah*", Terj, Halimuddin, Jakarta S.H. Bumi Aksara.,1990.

2. Al-Furqon Baina Auliyai al-Rahman Wa-Awliyah al-Syaitan

Didalam risalah ini, Ibnu Taimiyah selain menerangkan tentang kekasih Allah Swt, dan kekasih Syaitan, juga menerangkan tentang hakekat dan syari'at. Adapun hakekat yang dimaksud disini ialah hakekat agama Allah Swt. Meskipun setiap mereka mempunyai peraturan masing-masing. Sedangkan syariat adalah cara yang ditempuh dalam melaksanakan ibadah pada Allah Swt.

Inti dari buku ini adalah membahas tentang sifat-sifat dari kekasih Allah Swt, dan sifat-sifat dari kekasih syaitan dan menunjukkan suatu metode antara keduanya.³⁹ Karya Ibnu Taimiyah sudah diterjemahkan oleh Abdul Rahman Masykur, terbitan Pustaka Panjimas, Jakarta, tahun 1989, 187 halaman.

3. Al-Aqidah al-Wasiyah

Karya Ibnu Taimiyah ini merupakan pembahasan singkat mengenai dasar iman, ahli sunnah wal jama'ah menurut Ibnu Taimiyah, satu- satunya golongan yang akan terbebas dari kutukan Allah Swt.⁴⁰

4. Iq-Tida' al-Sirat al-Mustaqim

Ibnu Taimiyah menulis karya ini, sehubungan dengan sikap seseorang raja yang beragama Kristen yang berkuasa dipulau Cyprus, yang memperlakukan kaum minoritas muslim dengan sewenang-wenangan dan sangat kejam. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa minoritas muslim tidak dapat menunjukkan bagaimana sifat idealnya mereka, karena umat minoritas muslim harus berjuang untuk menjadi pihak mayoritas.

³⁹ Kesimpulan Penulis, Ibnu Taimiyah, "*al-Furqan Baina Awliyah al-Rahman Wa-Awliyah al-Syaitan*", Terj, Abdurahman Masykur, Jakarta: Pusta Pancimas, Th 1989.

⁴⁰ Qamaruddin Khan, *op. cit*, hlm. 319

Didalam buku ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Islam harus mempertahankan identitas mereka sebagai sebuah masyarakat agamis dan harus berhati-hati agar tidak hanyut kedalam kelompok agama lain dengan cara meniru tatacara kaum mayoritas, adapt-adat kebiasaan, kepercayaan dan keyakinan kelompok agama lain.⁴¹ Jelasnya, Ibnu Taimiyah menginginkan agar umat islam berpegang teguh pada ajaran agamanya kapan dan dimanapun berada , baik sebagai mayoritas ataupun sebagai minoritas.

5.Kitab al-Nubuwwah

Karya Ibnu Taimiyah ini adalah sebuah karyanya yang sangat kritis dalam ulasanya mengenai kenabian, mengenai sihir dan hal-hal yang gaib.

C. Aktifitas Ibnu Taimiyah Dalam Masyarakat

Dari studi kepustakaan ini, dan dengan membaca berbagai macam buku-buku karya Ibnu Taimiyah dan hasil karya-karya ulama' lain yang pembahasannya menyangkut diri Ibnu Taimiyah, maka penulis dapat menggambarkan dalam pikiran bahwa aktifitas Ibnu Taimiyah dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Pada Masa Penjajahan

Sepanjang abad Ke-13 Masehi adalah saat-saat dunia Islam sedang dilanda krisis kekuatan politik. Pada masa itu, dunia Islam tengah dihadapkan marabahaya, pasukan salib dari eropa sebagai cap baru bagi kaum kriesten

⁴¹ *Ibid*, hlm. 174

fanatik,⁴² tentara mongol yang mempercepat Invasinya ke dunia Islam dan disintegrasi politik dalam tubuh umat Islam.⁴³

Pasukan salib Kristen menyerbu Syiria dan Palestina, membantai kaum muslimin dan mendirikan negara-negara kecil di pesisir pantai laut tengah di bawah proteksi kerajaan Perancis dan Kerajaan Eropa lainnya. Di saat yang sama, dunia Islam secara politis juga sedang mengalami proses disintegrasi. Khalifah Abbasiyah di Bagdad tak lain merupakan wayang yang didalangi oleh dinasti Saljuq, sementara impereium Saljuq sendiri terpilah-pilah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tak henti-hentinya saling memerangi. Namun, marabahaya yang paling fatal adalah serbuan tentara Mongol.⁴⁴

Setelah hampir tujuh abad lamanya tumbuh dan berjaya meletakkan hegemoni politik global dengan wilayah yang dipenetrasinya meluas mulai dari semenanjung Siberia (Spanyol) di sebelah Barat hingga perbatasan Cina di sebelah Timur, dunia Islam tak berdaya menghadapi serangan tentara Mongol yang berhasil merebut Bagdad dan khalifah terakhir Abbasiyyah di Bagdad Al-Musta'sim tahun 656 H/1258 M.⁴⁵

Dapat dikatakan bahwa dunia Islam pada saat itu dalam keadaan krisis kekuasaan politik. Satu-satunya kekuasaan politik yang dapat bertahan adalah pemerintahan dinasti Mamluk di Mesir yang berdiri sejak tahun 1250 M. Dinasti inilah yang mempertahankan eksistensi kekuasaan politik dunia Islam

⁴² Carole Hillenbrand, "*The Crusade Islamic Perspectives*", Terj. Heryadi "Perang Salib Sudut Pandang Islam", Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet.ke-1, 2005, hlm 524

⁴³ C.E.Bosworth, "*The Islamic Dynasties*", Terj . Ilyas Hasan,"Dinasti-dinasti Islam", Bandung: Mizan, Cet.Ke-1, 1993, hlm 168

⁴⁴ M.Arskal Salim, *op.cit*, hlm.24

⁴⁵ C.E.Bosworth *op. cit*, hlm. 175

dari ancaman tentara salib dan serangan membabi buta yang dilancarkan oleh bangsa Mongol dan Mamluk yang memperoleh Prestasi yang besar di dunia Islam sebagai pemukul Mongol dan Kristen.⁴⁶

Dinasti Mamluk adalah pemerintahan Muslim yang paling unik di dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam. Bahkan, boleh jadi diantara semua kerajaan yang hadir di muka bumi ini. Hal itu di karena dinasti Mamluk adalah pemerintahan yang didirikan oleh bekas budak-budak militer. Status budak sangat diperlukan demi keberhasilan dalam struktur kekuasaan.⁴⁷

Di bawah kekuasaan Mamluk, Mesir dan Suriah mengalami kemakmuran ekonomi dan perkembangan pesat seni dan budaya, dengan prestasi-prestasi khusus dibidang-bidang seperti arsitektur, keramik dan karya artistic logam.⁴⁸ Dan mengenai hubungan antara kelompok agama dengan penguasa Mamluk, tak seperti biasanya, tampak erat. Dan tanpa bantuan kelompok-kelompok agama, sultan-sultan Mamluk tidak akan mampu mempertahankan kekuasaan mempertahankan kekuasaan mereka untuk waktu lama.⁴⁹

Ibnu Taimiyah yang hidup pada masa penjajah dan bangsa yang keras serta majemuk, yang terdiri dari masyarakat muslim dan non muslim. Dalam hal itu ia telah berhasil menggembleng (mendidik) masyarakat dan menggugah Sultan Mesir untuk masuk Islam dan ikut mengangkat senjata, dan ia pun ikut berperang mengusir para penjajah dari bangsa Mongolia. Sebagaimana disebutkan oleh Jamil Ahmad berbunyi Pada perang yang sangat dahsyat yang terjadi Marj as-

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 91

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 92

⁴⁹ Carole Hillenberand, *op. cit*, hlm. 287

Safar tahun 1304 M. Ibnu Taimiyah ikut berperang dan mengusir penjajah, sehingga pasukan bangsa Mongolia mengalami kerugian yang sangat berat pada waktu itu.

Setelah daerah-daerah kekuasaan Mamluk tenang, kembali permusuhan terhadap Ibnu Taimiyah dimulai kembali karena beberapa alasan :

1. Pasukan Mongol dapat dikalahkan dan didepak keluar terutama sekali berkat jasa-jasa Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu ia sangat dihormati oleh rakyat dan pemerintahan. Popularitas Ibnu Taimiyah ini menyalahkan api cemburu di dalam diri musuh-musuhnya yang menjadi semakin aktif untuk mendongkel posisinya.
2. Hampir semua para *Ulama* dan *Fuqaha* di gaji oleh Negara. Dengan demikian orang-orang yang disenangi sultan yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengangkatan para *Ulama* dan dalam penentuan besar gaji mereka. Akan tetapi Ibnu Taimiyah sendiri tidak pernah bekerja untuk Negara.
3. Ibnu Taimiyah sangat memusuhi *bid'ah*.
4. Ibnu Taimiyah sangat gigih memusuhi tokoh-tokoh mistik.
5. Ibnu Taimiyah tampil bertekad untuk membela metode yang dipergunakan oleh mazhab Hambali. Karena Ibnu Taimiyah berkeyakinan bahwa para pengikut mazhab Hambali adalah mengikuti Al-Qur'an dan as-Sunnah, di dalamnya memahami keyakinan (*aqqa'id*) maupun hukum (*furu'*).⁵⁰

⁵⁰ Qamaruddinkhan, *op.cit*, hlm. 21-24

Bagi Ibnu Taimiyah menentang orang-orang sesat dan kelompok ingkar adalah suatu kewajiban. Mereka juga diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, dan biasanya orang-orang yang melakukan kesesatan itu adalah mereka yang ragu tentang eksetensi hukum Islam. Sebagaimana diketahui, Ibnu Taimiyah yang selalu berusaha untuk mengusir penjajah moral maupun penjajah Negara yang datang dari kelompok muslim ataupun non muslim.

Di dalam beraktifitas, berpolemik dan berfatwa, Ibnu Taimiyah selalu berusaha untuk menggunakan kemerdekaan berpikiran dan kebebasan dalam berfatwa, ia tidak mau ada *intervenst*⁵¹ dari pihak mana pun, baik dari pemerintahan ataupun dari teman-teman yang sejawat dengannya, yang masih sama-sama berjuang, memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan krisis sosial, aqidah maupun berjuang dalam mengusir penjajah dari Negara yang mereka tempati pada masa itu (Damaskus).

2. Aktifitas Ibnu Taimiyah dalam Berpolemik dan Berfatwa

Di dalam aktifitasnya berpolemik dan berfatwa, sehingga dia harus ditangkap dan dipenjarakan tidak menjadikan Ibnu Taimiyah berhenti begitu saja dari kegiatannya, Ibnu Taimiyah pertama kali bentrok dengan penguasa Mamluk pada tahun 1294 M, tatkala berusia 32 tahun dan memimpin protes di Damaskus menentang khatib Kristen (*a clerk*)yang tuduh menghina Nabi Muhammad.

⁵¹ *Intenvensi* adalah gangguan atau campur tangan

Sekaligus khatib itu ditahan dan dihukum, Ibnu Taimiyah dan urung juga ikut tertawan lantaran dianggap menghasut rakyat.⁵²

Kerengganannya hubungannya dengan Negara bermula dari berbagai pendapatnya dalam masalah-masalah teologis tertentu. Pada tahun 1298 M ia mengemukakan pendapatnya tentang sifat-sifat Allah yang dianggap bertentangan dengan keyakinan ulama pemerintah di Damaskus dan Kairo. Pemerintah kemudian mengumpulkan wakil-wakil rakyat di dua kota itu dengan dipimpin ulama dan utusan-utusan pemerintah Mamluk yang terpandang untuk membahas pendapat Ibnu Taimiyah yang kontroversial itu. Tahun 1305 M, ia di bawa ke Kairo untuk dipenjarakan, sementara penguasa setempat menyebarkan pengumuman yang berisi ancaman hukuman mati bagi siapapun yang membela pendapat Ibnu Taimiyah.

Ia melalui kehidupan penjara itu selama satu setengah tahun sebelum dibebaskan kembali karena intervensi salah seorang pejabat tinggi Syria. Akan tetapi, kemerdekaannya kembali pupus setahun kemudian ketika tokoh-tokoh sufi Kairo menggugat kutukan Ibnu Taimiyah terhadap ittihadiah para sufi (para sufi yang menganut ajaran ittihad dengan Allah). Peristiwa ini membawanya kembali dalam kehidupan penjara untuk yang tiga kalinya.⁵³ Ia ditahan di sebuah istana di Alexandria selama dua tahun sampai dibebaskan oleh sultan Al-Malik An-Nashir.

⁵² Khalid Ibrahim Jindan, *"The Islamic Theory Of Government according To Ibnu Taimiyah"*, Terj. Rineka Cipta *"Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah"*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, Cet Ke-1, hlm 24.

⁵³ Kaum bangsawan di kairo memang mempunyai kepentingan sendiri dengan menjalin aliansi dengan para sufi. Puncak kejadian saat itu adalah antrik politik yang memaksa sultan Al- Nasir Ibn Qalawun turun tahta pada tahun 1308 M karena ulah al-Malik al-Muzaffar Baybars al-Jashangir, pengagum syeikh Nasr al-Manbijji, tokoh utama aliran Ibnu al-Arabi, dengan bantuan Negara, para sufi memulai merebut simpati kebanyakan masyarakat serta mempengaruhi cara berpikir mereka untuk kemudian menyalakan dendam dan api kebencian terhadap Ibnu Taimiyah.

Usai tiga tahun mengenyam kebebasan di kairo, yang dijalannya dengan kegiatan mengajar dan menulis. Ibnu Taimiyah kembali ke Syria pada tahun 1312 M. di negeri itu, ia memimpin masyarakat untuk tidak mengecam pemerintah sampai tahun 1318 M, ketika Al-Malik An-Nashir mengeluarkan larangan baginya untuk menyampaikan fatwa tentang masalah perceraian (*talaq*).

Para anggota dewan dikumpulkan dan memutuskan menjebloskan kembali Ibnu Taimiyah ke dalam penjara karena tidak mematuhi perintah penguasa. Meskipun enam bulan kemudian ia dibebaskan, masalah tersebut belum juga reda karena anggota-anggota dewan yang lain menebar fitnah yang menghasilkan tambahan hukuman penjara lima bulan pada tahun 1320 M. Ia dipenjarakan kembali setelah lima tahun mereguk kebebasan dengan fatwa-fatwanya tentang larangan berziarah kubur. Dewan hakim (*qhadi-qhadi*) diminta bersidang oleh sultan. Keputusan mereka adalah memenjarakan Ibnu Taimiyah.

Dapat dimengerti karena ketegasan nya dalam memberikan fatwa Ibnu Taimiyah kembali dimasukkan ke dalam penjara, bahkan disebutkan ke dalam sejarah, bahwa separuh dari kehidupannya dihabiskan di dalam penjara. Ibnu Taimiyah bahkan lebih berani mengatakan dengan lantang penjara adalah suatu surga yang sangat besar nilainya bagi saya.:

Andai kata benteng ini dihargai dengan separuh emas tidak akan membandingi syukurku kepada Allah Swt, atas nikmat-Nya atas terpenjaranya saya, atau ia mengatakan tidak bisa membatasi jasa-jasa mereka yang telah memenjarakan diriku yang telah banyak membawa kebaikan ke padaku.⁵⁴

⁵⁴ Firdaus A.N.*op.cit*, hlm, 246.

Ibnu Taimiyah mengatakan dari kutipan di atas bahwa penjara pun dapat dijadikan benteng atau dengan kata lain benteng dapat di jadikan surga kenikmatan karena di dalam penjara pun ia masih bisa berpolemik dan menentang penguasa, karena kebiasaan beliau yang demikian akhirnya pena dan alat-alat tulis lainnya diambil dengan paksa oleh penguasa negara. Hal ini baru dirasakan Ibnu Taimiyah sebagai siksa batin yang sangat pedih, sementara usianya yang telah lanjut itu menyebabkan badan nya yang telah tua tambah lemah. walaupun dengan demikian jiwanya sangat tersiksa ketika tidak diizinkan lagi untuk menulis, segala tinta yang tersedia, diatas meja kamar penjara nya kembali diambil semua oleh pemerintah, dua puluh hari kemudian ulama' besar, pahlawan besar yang berjuang di medan perang, dan berjihad dengan lisan maupun dengan tulisan melalui mata pena nya dan mata pedang nya itu berpulang ke rahmatullah meninggalkan dunia yang fana ini dalam penjara yang sempit itu, tersungkur diatas tikar sembahyang nya setelah beliau membaca ayat suci al-Qur'an surat al-Qamar yang bertepatan pada tanggal 20 Zulqa'dah 728 H atau 26 September 1328 M.⁵⁵

Adapun ungkapan Ibnu Taimiyah sebelum ajalnya berpulang ke Rahmatullah yang kemudian terkenal sampai sekarang yaitu :

*“Orang yang dipenjara ialah ia yang di penjara syaitan, orang yang terkurung ialah orang yang dikurung syaitan. Dan yang di penjara yang sebenarnya adalah yang dipenjara akn hawa nafsunya. Bila orang-prang yang memenjarakan saya ini tahu bahwa saya dalam penjara merasa bahagia dan merasa merdeka, maka mereka pun akan dengki atas kemerdekaan saya ini , dan akhirnya mereka tentulah mengeluarkan saya dari penjara ini.”*⁵⁶

⁵⁵ Ibid, 247

⁵⁶ www.islam-blogsome.co./islam/2005/12/10/penjara-Ibnu-Taimiyah di down load pada tanggal 24/3/08 di semarang.

Wafat Ibnu Taimiyah disambut dengan derai air mata ratusan ribu para pendukungnya. Mereka yang menghantarkan jenazahnya ke pemakaman itu bahkan menyajikan berbagai ragam tanda penghormatan yang ditentang oleh Ibnu Taimiyah (ketika masih hidup) karena dianggap sebagai takhayul. Konon katanya, makamnya Ibnu Taimiyah merupakan satu diantara pusat penziarahan yang dikeramatkan untuk mendapatkan berkah keajaibannya. Ringkas kata Ibnu Taimiyah, begitu tulis Macdonald, Ibnu Taimiyah adalah “seorang ulama yang amat terkemuka”.⁵⁷

Menjelang ajal nya akan di jemput, menteri negara Samsuddin datang membesuk Ibnu Taimiyah untuk minta maaf kepadanya, maka Ibnu Taimiyah berkata:

*Saya telah menghalalkan dan memaafkan semua kesalahan orang yang telah memasukkan diriku ke dalam penjara yang tidak memahami apa yang ada dalam diriku. Apakah artinya saya memaafkan Sultan Mu'azzam dan Nasir, yang hanya akan menambah hasutan bagi orang yang mendengarkan-nya saya. Saya menegaskan kembali bahwa saya menghalalkan dan memaafkan semua orang yang menyangkut diri saya, kecuali orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya.*⁵⁸

Di dalam beraktifitas Ibnu Taimiyah melakukan perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan. Sebagaimana disebutkan oleh Abu A'la al-Maududi:

1. Mengkritik logika dan filsafat Yunani, karena pengaruhnya bukan dari Timur saja.
2. Menyajikan dalil dan bukti yang nyata, dalam meluruskan aqidah.
3. Memberantas taqlid buta, menciptakan metode yang baru dalam mengajarkan hukum syara' yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu.

⁵⁷ Lihat Ghufrani A. Mas'adi (ed), “*Ensiklopedia Islam*”, Jakarta : PT Intermasa, 1993, Cet Ke-1, hlm 156.

⁵⁸ Firdaus A.N. *op. cit*, hlm. 246

4. Dalam berjihad tidak pernah menodai para pejuang, bahkan mengkritik nya secara *konstruktif*⁵⁹ yang sesuai dengan bimbingan Islam.⁶⁰

3. Aktifitas Ibnu Taimiyah dalam Rangka Membersikan I'tiqad Umat Islam

Ibnu Taimiyah besar dalam naungan keluarga bermazhab Hambali, wawasannya sangat luas meliputi mazhab-mazhab hukum lainnya. bahkan itu saja, pengetahuannya pun menjakau soal filsafat, sufisme, kalam, mantik, sastra, sejarah dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Mazhab Hambali yang dianut Ibnu Taimiyah, dengan pendekatan-pendekatan tradisional dan penekan pada kemurnian Islam yang terkontaminasi oleh perubahan-perubahan.⁶¹ Tidak mengherankan apabila terdapat banyak pertentangan antara Ibnu Taimiyah dengan ulama-ulama semasanya, karena kemunculannya telah membawa pemikiran-pemikiran ulama-ulama waktu itu menganggapnya tidak sejalan dengan pemikiran yang telah lama mereka warisi dari pendahulu. Ia mengumandangkan agar umat Islam kembali kepada al-Qur'an dan hadis serta mencontoh para sahabat, salaf saleh. Ia menginginkan pemurnian agama. Hal yang paling ditekankannya dalam usaha pemurniannya ialah agar umat Islam membuang jauh sifat fanatisme dan kejumudan.⁶²

Di antara pokok-pokok pemikiran Ibnu Taimiyah adalah: kritikan terhadap perilaku dan praktek-praktek kaum muslimin. Dalam bidang fiqh ia menentang

⁵⁹ *Konstruktif* adalah bersifat membina, memperbaiki, membangun dsb

⁶⁰ Abu A'la al-Maududi, "*Sejarah Pembaharuan dan Kembali ke Alam Pikiran Agama*", Dep. RI. Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 104.

⁶¹ Carole Hillenbrand. *op, cit*, hlm. 287

⁶² Harun Nasution. *op, cit*, hlm. 384

segala fuqaha di dalam berbagai masalah sampai kepada *furu'* ia sangat mencela sekali terhadap *taassub* (fanatik) dan taqlid terhadap imam mazhab tertentu.⁶³

Ibnu Taimiyah merupakan ulama' muslim yang berani dan juga sangat keras dalam menentang *bid'ah* dan *khurafat*. Ia memerangi orang yang tidak sepaham dengannya melalui pena dan diplomasi. Ia berkeyakinan bahwa pena lebih tajam daripada pedang.⁶⁴

Ibnu Taimiyah seorang cendekiawan muslim yang mampu menangkap getaran-getaran penyakit yang diidap oleh umat Islam pada umumnya. Berbagai gejala penyimpangan hidup yang dikerjakan oleh kebanyakan umat di dunia Islam sudah sangat menyolok. Ketauhidan yang menjadi inti ajaran Islam dan yang ditekan-tekan oleh Rasulullah telah terselubungi oleh berbagai macam *khurafat* (tahayul), syirik dan faham kesufian yang telah jauh menyimpang dari prinsip ajaran Islam.

Kaum muslimin mulai sibuk menghias diri dengan berbagai macam azimat, penangkal penyakit. Mereka sangat menggemari ziarah ke kubur-kubur orang keramat tidak untuk ingat mati (*lizikril maut*) melainkan untuk meminta barakah dan syafa'at. Mereka puja orang-orang yang sudah mati tersebut sebagai manusia suci dan diyakini dapat menjadi perantara (*washilah*) antara dirinya dengan Allah. Sementara itu pula kaum muslimin sudah acuh tak acuh dan tidak menaruh

⁶³ M.Yusron Asmuni, "Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 53-5

⁶⁴ Imam Munawir, "Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa", Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm. 409-414

kepedulian sama sekali tentang nasibnya di dunia ini. Gejala semacam itu menampilkan wajah Islam yang tidak sedap dan menawan.⁶⁵

Ibnu Taimiyah dalam rangka membersihkan *I'tiqad* umat, selalu berupaya untuk melenyapkan kemungkaran-kemungkaran dan menyingkirkan segala bentuk kemunafikan dalam agama. Ia pun kadang-kadang langsung terjun sendiri dan terkadang berombongan dengan para pengikutnya untuk membersihkan *I'tiqat* umat.

Penjajah yang cukup panjang hingga menjadikan Negeri Bagdad umumnya dan umat Islam khususnya dalam kejumudan. Ibnu Taimiyah dalam langkah pembaharuannya di bidang *Bid'ah* dan *Khurafat*, ia banyak ditentang oleh para ulama' pada masanya. Ibnu Taimiyah benar-benar mengutuk bagi orang-orang yang melakukan *Bid'ah* dan *Khurafat*.

Sikap hidup dan pendirian Ibnu Taimiyah dalam bidang agama sangat tegas yakni orang Islam haruslah berakidah dan beribadah seperti apa yang diajarkan oleh al-Qur'an dan hadis Nabi, tidak boleh melebihinya dan juga tidak boleh menguranginya. Sikap beragama seperti yang dimaksudkannya adalah sikap beragama para sahabat dan tabi'in, yang kedua generasi pertama itu biasa disebutnya sebagai para salaf. Ibnu Taimiyah secara umum dapat dikatakan sebagai ulama yang mengabdikan hidupnya untuk menghidupkan Sunnah Nabi dan berusaha keras menghancurkan (melalui lisan dan tulisan pandangan dan perbuatan yang dinilainya *bid'ah*).⁶⁶

⁶⁵ Musthofa Kamal Pasha, Ahmad Adaby Darban, "*Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Ideologis)*", Yogyakarta, LPPI, 2000, hlm. 18

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, "Sejarah Perkembangan dan Pemikiran dalam Islam (Bagian Pertama: Pemikiran Theologi)", Jakarta: Beunebi Cinta, 1987, hlm. 123

D. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Pemimpin Zalim

1. Dasar Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Pemimpin Zalim

Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai tokoh yang berhak menyandang gelar sebagai “*mujtahid*” dalam berbagai tulisan atau pun dalam kuliah- kuliahnya dengan lantang menyeru dan mengajak umat Islam di seluruh dunia Islam untuk kembali berpegang teguh pada ajaran al-Qur’an Karim dan as- Sunnah as-Syarif dengan murni dan penuh tanggung jawab dalam menata seluruh aspek kehidupannya baik untuk orang seorang, berkeluarga, bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara.⁶⁷

Islam menuntut umatnya agar melakukan amar makruf dan nahi munkar tanpa pandang bulu. Bahkan Islam menjadikan tugas mengislah pemimpin dan pemerintahan sebagai satu jihad yang utama. Karena kepemimpinan tersebut merupakan suatu amanah Allah Swt dan sekaligus amanah sekelompok orang yang harus dijalankan dengan baik dan dengan seadil mungkin, apabila seseorang pemimpin tidak bisa melaksanakan amanah tersebut, yang sesuai dengan ajaran agama artinya ia sudah melakukan kesalahan kepada Allah Swt, dan manusia dan sikap untuk menegakkan keadilan dan mencegah segala bentuk kemungkaran atau kezaliman. sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surat Ali Imran : 104 yang berbunyi :



⁶⁷ Musthofa Kamal Pasha, Ahmad Adaby Darban, “*Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Ideologis)*”, Yogyakarta, LPPI, 2000, hlm. 18

⁷⁰ Abul A'al Al-Maududi, *"Khalifah dan Kerajaan"*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998. hlm 81



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁷¹

Sedangkan bagi mereka (Pemimpin) yang berhianat dari amanah (berbuat maksiat) pada Allah, maka kita diperbolehkan untuk tidak mentaati seperti hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ إِمَامٌ جَائِرٌ.⁷²

Artinya : *“Makhluk yang paling dicintai Allah adalah imam yang adil, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim.”*

Dari hadis di atas tidak boleh mentaati seorang hamba apapun jabatannya kalau untuk melakukan maksiat kepada Allah. Manusia hanya boleh taat sama seorang hamba golongannya kalau untuk melakukan kebaikan yang tidak menyalahi perintah Allah Swt.

Kezaliman telah terjadi secara meluas, mulai dari kalangan atas (pemimpin) hingga kalangan bawah (rakyat biasa), dengan merancukan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama. Mereka mengambil sesuatu yang diharamkan, ironisnya sesuatu yang seharusnya di patuhi justru mereka tentang dan tinggalkan.⁷³

⁷¹ Departemen Agama, *op.cit.* hlm 69

⁷² Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, *op.cit.* hlm. 21

⁷³ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syari'ah*, *op.cit.* hlm 39-40

Dimana dan kapan saja, kebaikan selalu berpasang dengan kejahatan, kezaliman dan kesewenang-wenangan yang melanggar hak-hak manusia.⁷⁴ Kezaliman telah terjadi secara meluas, mulai dari kalangan atas (pemimpin) sampai pada kalangan bawah (rakyat biasa), dengan merancukan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama. Mereka mengambil sesuatu yang dilarang dan diharamkan, ironis nya sesuatu yang seharusnya dipatuhi justru ditentang dan ditinggalkan. Ilustrasi tersebut dapat dilihat dari terjadinya kezaliman diantara kalangan militer dan para petani, dengan cara meninggalkan jihad yang seharusnya ditunaikan. Para pemimpin sibuk memperkaya diri dari rizki yang dianugerahkan Allah Swt, untuk semua hamba-Nya yang ada dimuka bumi ini. Mata hati dan pikiran mereka telah dibutakan oleh harta yang melimpah, sehingga kewajiban yang harus ditunaikan mereka tinggalkan, sedangkan yang seharusnya mereka tinggalkan justru dikerjakan.⁷⁵

Harus diketahui, bahwa pemimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya “kepemimpinan”. Sedangkan seluruh anak Adam, mustahil mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini sudah pasti butuh seseorang pemimpin untuk mengendalikan.⁷⁶

Rasulullah Saw bersabda :

حدثنا علي بن بحر, ثناحاتم بن إسماعيل, ثنا محمد بن عجلان, عن نافع, عن أبي

⁷⁴ Mustafa Masyhur, “*Tentang Kezaliman*”, Jakarta: Gema Insani Press, 1990, hlm. 7

⁷⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syari’ah*, op.cit, hlm 42-43

⁷⁶ Ibnu Taimiyah, “*Al-Siyasah Al-syar’iyyah Fi Islahir Raa’i War Ra’iyyah*”, Terj. Rofi’ Munawwar, “*Siyasah Syari’ah Etika Politik Islam*”, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. ke-1, 1995, hlm. 119

سلمة, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ, قَالَ نَافِعٌ : فَأَقْلَنَّا لِأَبِي سَلَمَةَ :

فَأَنْتَ أَمِيرُنَا {رواه ابو دود}

Artinya : “Diberitakan dari Ali ibn Bahr, Hatim ibn Ismail, Muhammad ibn Ajlan, dari Nafi, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Apabila ada tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaknya mereka menjadikan salah satu sebagai Amir (pemimpin). “ Nafi berkata : ucapkanlah kepada Abi Salamah : Kamu sebagai pemimpin kita. (H.R Abu Daud dari Abu Hurairah).”⁷⁷

Dari sini Rasulullah Saw. mewajibkan salah seorang menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil dan bersifat mendadak (yakni dalam berpergian), sebagai isyarat dan perhatian akan pentingnya hal itu pada semua bentuk perkumpulan lain yang lebih besar. Juga karena Allah Swt telah mewajibkan *amar ma'ruf dan nahi munkar*. Sedangkan proyek besar itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya *quwwah* (otoritas) dan *imarah* (kepemimpinan). Demikian pula seluruh rangkain ibadah yang diwajibkan oleh-Nya seperti jihad, menegakkan keadilan, haji, melakukan upacara-upacara ritual, membela yang teraniaya dan menegakkan hukuman-hukuman. Tidak mungkin itu semua terealisasikan kecuali dengan adanya *quwwah* dan *imarah*.⁷⁸

Tatkala moral (mental) pemimpin dan rakyat telah berubah menjadi zalim, maka adalah kewajiban bagi setiap individu masing-masing untuk menunaikan kewajiban yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan ia harus

⁷⁷ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq Al-Azdi, “Sunan Abi Daud”, Jilid 2, cet. Ke 1, Mustafa al-babi al-Halabi wa auladihi, th 1952, hlm. 34

⁷⁸ Ibnu Taimiyah *Al-Siyasah Al-syar'iyah*, op.cit, hlm. 8

menjauhi apa yang diharamkan Allah Swt, dan sebaliknya sekali-kali ia tidak boleh mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah.

Kadang-kadang masyarakat diuji dengan adanya para pejabat yang menolak segala bentuk hadiah. Semua itu bertujuan untuk menarik simpati dari rakyatnya, dimana pada saat yang sama para pejabat tersebut mengabaikan kewajiban kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Model pejabat seperti inilah yang telah menjual akhirat nya dengan godaan-godaan duniawiyah semata dan benar lah bahwa manusia yang paling celaka adalah manusia yang telah menjual akhirat nya dengan duniawiyahnya.

Para pemimpin zalim pun juga bertindak sewenang-sewenang, menindas tanpa memperdulikan perjalanan umat manusia. Bahkan ia berbuat dosa karena kezaliman nya itu seperti berzina, homo seksual, atau yang sejenisnya minum khamer dan mendera seorang muslim tanpa alasan yang jelas dan benar, zalim dalam bidang keuangan dengan jalan penyimpangan atau pengkhianatan, korupsi dan lain-lainnya.⁷⁹

Pemimpin zalim menurut Ibnu Taimiyah adalah pemimpin yang melakukan sebagian dosa, namun bukan menolak hukum Allah Swt, serta tidak bermaksud menggantikan hukum Allah Swt tersebut.

Adapun Bentuk kezaliman itu dalam pandangan Ibnu Taimiyah terbagi ke dalam tiga bagian, *Pertama* zalim terhadap sesama manusia seperti mengambil harta orang lain, dengki dan lain-lain. *Kedua* zalim terhadap diri sendiri seperti

⁷⁹ Sebagaiman di nukil oleh M. Arskal Salim dalam “*Etika Intervensi Negara Perspektif politik Ibnu Taimiyah*”, Jakarta: Logos, Cet ke-1, 1999, M. Arskal Salim mengutip Ibnu Taimiyah, “*Al-Amru bil Mu’ruf Wa an-Nahyi Anil Mungka*,” Terjemahan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani, 1993, hlm. 8

minum khamer, berzina itupun jika dampaknya tidak meluas ke masyarakat lainnya. *Ketiga* mencakup kedua-duanya, seperti kejahatan kekuasaan, untuk kepentingan minum khamer dan berzina.⁸⁰

Kemudian beliau menganjurkan agar umat Islam mengikuti pemimpin yang fasiq dan jahil memerintahkan dan adil dan memberikan perintah yang sesuai dengan perintah-perintah Allah Swt.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa penting adanya pemerintahan karena Allah, memerintahkan kepada manusia untuk *beramar ma'ruf* dan *nahi munkar* misi atau tugas itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kekuasaan dan pemerintahan yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan itu. Ia juga berpendapat bahwa keberadaan dan kewajiban kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik (harta rakyat) dan lebih jauh dari itu juga untuk menjamin hukum Allah di muka bumi ini (*khalifatullah*) di muka bumi ini, bahkan ia lebih jauh berpendirian keberadaan kepala negara meskipun zalim lebih baik bagi rakyat dari pada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara.⁸¹

Ibnu Taimiyah juga menganggap bahwa sultan atau kepala negara adalah bayangan Allah di bumi, dengan arti bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi.

Satu hal lagi yang cukup menarik, Ibnu Taimiyah mendambakan di tegakkannya keadilan semakin kuat, sehingga dia cenderung untuk beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 48

⁸¹ Munawir Sjadzali, *op.cit* hlm. 89

Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara tidak adil sekalipun Islam.⁸²

Pernyataan di atas merupakan pencerminan dari kekhawatiran Ibnu Taimiyah terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dan kekacauan terhadap stabilitas politik di negara tempat ia hidup yang masih sarat dengan kerawanan dan kekacauan.

Oleh karena itu apabila terjadi pengingkaran atau pemberontakan sekalipun dilakukan terhadap penguasa yang zalim, tentu akan mengakibatkan kekosongan pemerintahan yang akibatnya *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* susah untuk dapat dilaksanakan dengan semestinya. Agaknya pendapat Ibnu Taimiyah ini sangat aktual sekali jika dikaji ulang pada saat sekarang dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas negara.

Dari uraian yang telah diungkapkan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemimpin yang zalim menurut Ibnu Taimiyah itu adalah penguasa yang melakukan sebagian dosa yang karenanya berhak secara mutlak disebut zalim seperti minum khamer, berzina atau mendera orang muslim tanpa adanya alasan yang benar dan jelas atau mengabaikan penetapan hukum yang berdasarkan syari'at Islam dalam suatu kejadian namun bukan menolak hukum Allah Swt. Sedangkan dalam hal-hal tertentu ia masih mempergunakan hukum yang diturunkan Allah Swt, di tengah-tengah manusia.

2. Sikap Ibnu Taimiyah terhadap Pemimpin Zalim

⁸² *Ibid*

Dalam masalah menyikapi pemimpin zalim Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemberontakan dengan senjata (gerakan militer) terhadap penguasa zalim tidak pernah dibenarkan oleh agama sekali pun dilakukan sebagai reaksi terhadap pemimpin zalim atau kejahatan sebagian oknumnya.⁸³ Bahkan ia juga menganjurkan juga agar umat Islam mengikuti pimpinan yang tidak adil dan licik jika suasana menghendakinya demikian sebagai satu-satunya figur yang mampu mempertahankan persatuan dan kenyamanan dalam keberagaman masyarakat.⁸⁴

Ibnu Taimiyah mengambil gambaran figur komandan menurut pandangan Imam Ahmad atas pertanyaan mengenai dua figur komandan perang, dimana yang satu kuat namun pendosa, sedangkan yang lain saleh tetapi fisiknya lemah. Maka, siapakah yang lebih tepat dijadikan komandan perang diantara keduanya ? Kemudian Imam Ahmad mengemukakan pendapat, “ perihal komandan yang kuat namun pendosa, maka kekuatannya itu untuk menguntungkan kaum Muslimin, sedang kesukaannya untuk berbuat dosa hanyalah berdampak bagi diri sendiri. Sementara komandan yang saleh namun lemah, maka kesalehannya itu hanya berindikasi bagi diri sendiri, sedangkan kelemahannya akan berdampak luas bagi kaum Muslimin.⁸⁵ Kekuatan dalam lapangan kepemimpinan tentu harus sesuai dengan bidangnya. Kekuatan dalam pimpinan perang umpamanya, yang dibutuhkan adalah kekuatan dan keberanian hati tampil ke medan perang dan mahir melakukan siasat.⁸⁶

⁸³ Ibnu Taimiyah, “*Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah*”, Makktabah al-Riyadl al-Hadisah Jilid IV, hlm. 135

⁸⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *op.cit*, hlm. 124

⁸⁵ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah as-Syari'ah*, *op.cit* hlm. 14

⁸⁶ J. Suyuthi Pulungan. “*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*”, cet, ke- 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 257

Sehubungan itulah, Khalid bin Walid senantiasa diangkat oleh Rasulullah sebagai komandan perang sejak kelahiran Islam. Beliau bahkan bersabda: “*Sesungguhnya Khalid adalah pedang yang dihunuskan Allah kepada kaum musyrikin.*”⁸⁷ Walaupun dalam keseharian Khalid bin Walid terkadang juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Rasul Saw. Bahkan suatu ketika, Rasulullah Saw, menengadahkan kedua tangan beliau ke langit seraya berdoa, “*Ya Allah aku berlepas diri kepada-mu dari apa yang diperbuat Khalid.*” Peristiwa ini berkenaan dengan tindakan Khalid ketika di utus oleh Rasul Saw. kepada suku Jadzimah, ternyata dia melakukan serangkaian tindakan pembunuhan dan mengambil harta kekayaan mereka secara syubhat. Tindakan Khalid ini sangat bertentangan dengan perintah Rasul Saw, bahkan dia sudah diperingatkan para sahabat agar tidak melakukan perbuatan itu. Akibatnya, Rasulullah pun pada akhirnya harus membayar *diyat* (denda) atas pembunuhan tersebut dan menjamin untuk mengembalikan harta mereka.⁸⁸

Namun demikian, Rasulullah Saw tetap berkenan mengangkat Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Sebab, untuk masalah yang satu ini dia lebih layak daripada yang lainnya.⁸⁹

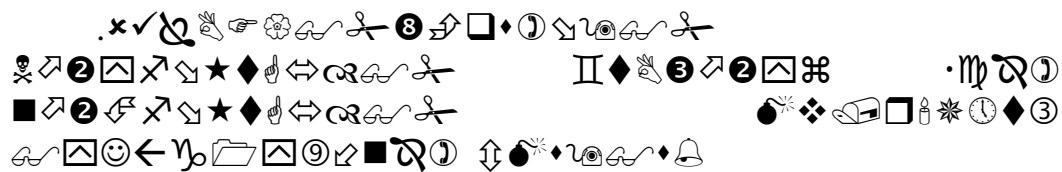
Adapun hal yang cukup menarik, Ibnu Taimiyah mendambakan di tegakkannya keadilan semakin kuat, sehingga dia cenderung untuk beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa

⁸⁷ Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhori, “*Shahih Bukhori*”, Jilid 5, Terj Ahmad Sunarto, dkk, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993, hlm 90.

⁸⁸ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah as-Syari'ah*, op.cit hlm. 14-15

⁸⁹ *Loc.cit*, hlm.15

Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara tidak adil sekalipun Islam. sebab yang dibutuhkan umat adalah keadilan dan kesejahteraan yang menyeluruh, bukan figur maupun sosok tertentu. Ibnu Taimiyah mengambil sumber al-Qur'an Surat . al Qashas: 26 yang berbunyi:



Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik engkau tugaskan adalah orang kuat lagi dipercaya”.⁹⁰

Mempunyai kekuatan dalam lapangan kepemimpinan, seperti dalam memimpin perang, mengatur strategi, memberikan kebijaksanaan yang tepat dan terarah sesuai dengan keadilan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan Ibnu Taimiyah tidak menetapkan bagi seorang kepala negara harus dari suku Quraisy, karena masalah ini terjadi ikhtilaf.⁹¹

Namun Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kepala Negara harus memenuhi lima persyaratan:

1) Berilmu pengetahuan, yang dengannya ia mampu melakukan hukum-hukum yang berlaku.

2) *Al Kifayat*, yaitu kemampuan melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang-undang, mampu memainkan strategi dalam berperang, memobilisir umat untuk ikut berperang, sanggup memelihara tugas-tugas politik dan siasat, berdiplomasi, mengetahui *ashabiat* (solidaritas kelompok) mampu

⁹⁰ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*” . *op cit*, hlm 310

⁹¹ Ibnu Taimiyah, *loc.cit*, hlm. 15.

melindungi agama, bersedia jihad melawan musuh menegakkan hukum, mengelola kepentingan umum.

3) Berlaku adil.

4) Sehat panca indera.

5) Keturunan Quraisy.⁹²

Namun untuk persyaratan terakhir Ibnu Khaldun mengadakan rasionalisasi, menurutnya berdasarkan fakta sejarah bahwa suku Quraisy saat itu adalah suku arab terkuat, tangguh dan terkemuka, mereka mempunyai solidaritas kelompok yang kokoh sehingga membuatnya berwibawa dalam memelihara keutuhan persatuan umat Islam. Sehingga seorang pemimpin yang berasal dari suku tersebut mampu mengurus negara secara efektif. Akan tetapi jika ada suku lain yang lebih terkemuka dan berwibawa, maka mereka yang lebih berhak dalam kepemimpinan, sehingga persyaratan tersebut dipahami secara simbolis.⁹³

Menurut al Mawardi, seorang kepala negara harus memenuhi kualifikasi adil, mempunyai kompetensi ijtihad, sempurna dan sehat panca indra, tidak cacat fisik, mempunyai visi kemaslahatan sosial, tegas dan pemberani, serta mempunyai garis keturunan dari Quraisy. Ia juga dikenai beberapa syarat yang dimiliki oleh seorang *qadhi*, seperti merdeka, baligh, berakal, berpengetahuan luas, serta sempurna secara fisik, seperti pendengaran, penglihatan, serta lisan

⁹² Ibnu Khaldun, "*al Muqaddimat*", Beirut: Dar al Fikr, hlm. 193-194.

⁹³ *Ibid*

agar dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya dan sehat badan, sehingga tidak terhambat dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin.⁹⁴

Ibnu Taimiyah mempunyai berbagai alasan untuk menentang sikapnya itu yang nanti *revolutioner*.⁹⁵ Ia mengajukan alasan bahwa melakukan perlawanan terhadap kezaliman atau korupsi pemimpin, itu dapat menggiring kita kepada kezaliman atau kejahatan yang lebih besar karena munculnya perpecahan dikalangan masyarakat karena bermunculan nya fitnah. Oleh karena itu jika dipastikan melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang zalim dapat menimbulkan pertikaian penduduk, situasi demikian yang dianggap nya terhindarkan akan ada perlawanan antara pemimpin yang didukung oleh sebagian masyarakat dengan masyarakat yang sudah tidak taat lagi, maka hendaklah masyarakat (*muslim*) mempertahankan apa yang telah dimiliki ketimbang memulai sesuatu tindakan yang dapat menimbulkan suasana yang lebih buruk.⁹⁶

Pendapat ini juga didukung oleh beberapa hadis Rasulullah Saw, dibawah ini

Rasullulah Saw bersabda:

من كره من أميره شيئاً فليصبر فاءنه من خرج من السلطان سبرات مية جاهلية.

Artinya : “Barang siapa yang tidak menyenangi pemimpin, maka kita dianjurkan untuk bersabar, karena bagi orang yang keluar dari golongan kaum muslim dengan tujuan untuk tidak mentaati imam maka matinya dianggap seperti matinya kaum jahiliyah.”⁹⁷

⁹⁴ Imam al Mawardi, “*Al-Ahkaamus Sulthaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyah*”, Terj, Abd Hayyie al Kattani, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*”, Jakarta, Gema Insani Press. 2000 hlm 16-17

⁹⁵ *Revolutioner* : cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar.

⁹⁶ Ibnu Taimiyah, “*minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah*”, Maktabah al-Riyad al-Hadist Jilid IV, hlm. 87

⁹⁷ Imam Bukhari “*Shahih Bukhari*”, Terj. Zainuddin Hamidy, Nasharuddin Thaha dan Rahman Zainuddin Jakarta: Penerbit Wijaya, 1981, hlm 125

Dari hadis Ibnu Abbas di atas dijelaskan bahwa apabila kita tidak menyenangi pemimpin, maka dianjurkan untuk bersabar, karena bagi orang yang keluar dari golongan kaum muslim dengan tujuan untuk tidak mentaati imam maka matinya dianggap seperti matinya kaum jahiliyah. Ibnu Jabar mengomentari hadis di atas bahwa yang dimaksud dengan memisahkan diri dari jama'ah adalah menguraikan *bai'at* yang diperoleh penguasa walaupun dengan satu tindakan yang minimal, hal itu dikiaskan dengan kata “*sejengkal*” karena mengambil tindakan semacam itu akan mengakibatkan pertumpahan darah tanpa alasan kebenaran.⁹⁸

Dari hadis di atas kemudian dilanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Auf ibn Malik, yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : حَيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ, وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَتَلْعَنُونَكُمْ, قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ : لَا, مَا قَامُوا مِنْكُمْ الصَّلَاةُ, رواه مسلم

Artinya : “Auf bin Malik R.A berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Sebaik-baik pemimpinmu ialah yang kamu cintai dan cinta pada kamu, dan kamu doakan, dan mereka doakan kamu. Dan sejahat-jahat pemimpinmu ialah mereka yang kamu benci dan membenci kamu, sahabat bertanya: boleh kah kami menentang (melawan) mereka? Jawabnya: tidak, selama mereka tetap menegakan sholat.”⁹⁹

⁹⁸ Umar Abdurrahman, “*Tipe-tipe Penguasa dan Statusnya dalam Islam*”, Solo: CV. Pustaka Mantik, 1990, hlm. 33

⁹⁹ Imam Nawawi, “*Riadlus Shalihin*”, Terj Salim Bahreisy, Bandung: PT. Al-Ma’arif. Tt. hlm.481

Kalau penulis mengambil pelajaran dari hadis tersebut di atas bahwa setiap orang dianjurkan dalam memilih pemimpin yaitu orang yang dicintai dan disayangi dan diapun menyayangi dan mencintai kita pula, dan tatkala semua warga mendoakannya diapun mendoakan nya, dan apabila sebaliknya diapun melakukan hal yang sebaliknya pula. Tetapi Rasulullah Saw, menegaskan bahwa tidak boleh membenci dirinya, yang boleh benci adalah bahwa sesungguhnya tidak boleh membenci dirinya, yang boleh di benci adalah perbuatannya.

Hadis-hadis inilah yang dijadikan alasan oleh Ibnu Taimiyah agar kaum muslimin tetap sabar dalam menghadapi penguasa yang zalim dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun juga.¹⁰⁰

Ibnu Taimiyah menyadari bahwa kaum muslimin berbeda pendapat mengenai kepatuhan kepada seorang imam yang fasiq dan bodoh, jika ia memberikan perintah-perintah yang sesuai dengan perintah Allah Swt. Menurut Ibnu Taimiyah mengenai masalah ini, ada tiga macam pendapat. Pendapat yang *Pertama* atau yang tidak dapat diterima oleh *ahlu sunnah* adalah bahwa semua perintah dan ketetapan yang diberikan oleh imam harus ditolak sedangkan ia sendiri harus diingkari secara terang-terangan. Pendapat yang *Kedua* atau yang paling tepat menurut pandangan *ahlu sunnah* dan *fuqaha'* adalah bahwa seorang imam akan dita'ati dalam segala hal sesuai dengan prinsip keta'atannya kepada Allah Swt. Pendapat yang *Ketiga* menyatakan bahwa kita harus membuat perbedaan diantara imam yang tertinggi (*al-Imam al-A'zam*) dengan imam-imam yang lain, yang terakhir ini boleh diingkari apabila mereka tidak cakap, tetapi

¹⁰⁰ Qomarudin Khan, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah", Bandung: Pustaka Salam, ITB, 1983, hlm. 283

pendapat yang ketiga ini ditolak oleh Ibnu Taimiyah karena penggeseran seorang pejabat yang dipercayai oleh pemimpin tertinggi akan menimbulkan konflik dan perang saudara (*fitnah*), dan dengan demikian kejahatan yang lebih kecil akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar. Jadi menurut Ibnu Taimiyah yang terbaik adalah pendapat yang kedua.¹⁰¹

Mengingkari imam hanya boleh apabila keputusan-keputusannya terang-terangan bertentangan dengan ketetapan yuridis yang berdasarkan teks-teks yang tegas di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Rasulullah Saw bersabda: Jika Ada seorang yang menyuruh mu untuk mengingkari Allah Swt, maka janganlah kamu mentaatinya.¹⁰²

3 Hukum Melawan Pemimpin Zalim

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa menyelesaikan perkara yang timbul diantara orang banyak, wajib diselesaikan menurut hukum dengan cara yang adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁰³ Hukuman (*had*) merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah Swt agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan-Nya.¹⁰⁴

Berhukum diantara manusia ini maksudnya adalah menegakkan hukum-hukum dan hak-hak mereka. Dalam hal ini terdapat dua kategori. *Pertama* adalah sanksi hukum dan hak-hak yang terkait kepada individu-individu tertentu, akan

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 284

¹⁰² *Ibid*, hlm. 285

¹⁰³ J. Suyuti Pulungan. *op.cit*, hlm 274

¹⁰⁴ Muhammad Ashif, "*Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintahan Islam (studi analisis kewajiban mendirikan pemerintahan dalam kitab As-Siyasah Asy-Syari'ah)*", Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang : Perpustakaan Fakultas syari'ah IAIN Walisongo, 2007, hlm 67-68

manfaat dan tujuan penegakannya itu bagi sekalian kaum muslimin atau segolongan mereka. Artinya semua berkepentingan agar sanksi hukum dan hak-hak ini ditegakkan. Kreteria *pertama* itu dinamakan sebagai sanksi hukum dan hak-hak dari Allah Swt, Seperti hukuman yang dijatuhkan terhadap perampok di jalanan, pencuri dan sejenisnya. Juga seperi hukum atas kekayaan Negara, tanah wakaf, wasiat umum dan lainnya. *Kedua* adalah macam cara itu masing- masing mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri.

Ibnu Taimiyah membuat perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan. Kita boleh mengingkari perintah yang tidak baik dari seorang imam dan akan menderita hukum karenanya, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk melawan nya selama ia melakukan shalat. Mungkin saja seorang imam baik atau jahat, tetapi betapapun demikian seseorang tidak diperbolehkan mengangkat senjata untuk menggulingkan nya. Bahkan seorang imam yang berkulit hitam dan berwajah buruk sekalipun harus ditaati.¹⁰⁵

Semua ini mengacu dari sabda Rasulullah Saw bersada, “*Shalat itu adalah tiang agama.*” Karena apabila seorang pajabat mau menegakan tiang agama , maka salatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.¹⁰⁶

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ

فَلَيْسَ مِنَّا " .

¹⁰⁵ Qomarudin Khan, *op.cit*, hlm.148

¹⁰⁶ Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah Sayr'iyah*, *op.cit*, hlm 20

*Artinya : “Dari abu Musa RA dari Nabi Saw, beliau bersabda: Barang siapa yang menghadapkan senjata kepada kita, maka orang itu bukan termasuk dalam golongan kita.”*¹⁰⁷

Kalau penulis mengambil pelajaran dari hadis tersebut di atas bahwa setiap muslim dianjurkan untuk tidak boleh mengangkat senjata kepada sesama Muslim, karena Rasulullah menggolongkan orang tersebut bukan termasuk golongan umat Islam.

Dalam kitab Ibnu Taimiyah Majmu Fatawa, ditemukan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan pemberontakan bila memenuhi beberapa kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Keluar dari Imam

Keluar dari imam (penguasa) di sini maksudnya adalah menentang imam atau menentang segala yang telah diwajibkan bagi diri mereka (orang-orang) yang keluar dari imam.¹⁰⁸

2. Ingin menumbangkan Imam

Yang dimaksud dengan keluar ingin menumbangkan imam (penguasa) itu adalah orang-orang yang keluar dari imam yang berniat untuk menggulingkan kepemimpinannya dengan segala kekuatan yang telah dipersiapkan dan disusun dengan matang, namun apabila orang-orang tersebut tanpa adanya kekuatan yang tersusun secara matang dan teratur, maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan tindakan pemberontakan.¹⁰⁹

3. Bermaksud melanggar ketentuan Imam

¹⁰⁷ Zainuddin Hamidi, *op.cit*, hlm 128

¹⁰⁸ Ibnu Taimiyah, "*Majmul Fatawa*", Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, Th 1987 jilid III, hlm. 443

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 444

Bermaksud melanggar ketentuan Imam ini adalah disyaratkan bahwa perbuatan itu dilaksanakan beramai-ramai dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengadakan pemberontakan dan mereka menginginkan terjadinya pemberontakan secara umum. Namun apabila keluarnya orang beramai-ramai itu dengan tidak ada maksud dan tujuan (memberontak) tidaklah perbuatan tersebut dianggap sebagai pemberontakan.¹¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Taimiyah perbuatan itu baru dapat dikatakan tindakan pemberontakan, apabila telah memenuhi tiga kriteria sebagai berikut :

1. Keluar dari Imam
2. Ingin menumbangkan Imam
3. Bermaksud melanggar ketentuan Imam

Namun apabila kriteria-kriteria tersebut diatas tidak ditemukan pada suatu tindakan, maka perbuatan itu belum dapat diklasifikasikan kepada tindakan pemberontakan.

Dalam masalah menyikapi penguasa zalim Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemberontakan dengan senjata (gerakan militer) terhadap penguasa zalim tidak pernah dibenarkan oleh agama sekalipun dilakukan sebagai reaksi terhadap penguasa zalim atau kejahatan sebagian oknum nya.¹¹¹ Bahkan ia juga menganjurkan juga agar umat Islam mengikuti pimpinan yang tidak adil dan licik

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 446

¹¹¹ Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah*, *op.cit* hlm. 135

jika suasana menghendaki nya demikian sebagai satu-satunya figur yang mampu mempertahankan persatuan dan kenyamanan dalam keberagaman masyarakat.¹¹²

Allah Swt telah mengutus Rasul-Nya untuk menyuruh manusia supaya melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Di dalam perbuatan manusia terkandung kebaikan dan kejahatan dan sesuatu perbuatan dianggap baik apabila lebih banyak mengandung kebaikan dan dianggap jahat apabila banyak mengandung kejahatan. Maka seorang khalifah seperti Yazid Abdul Maliki al-Mansur atau yang lain-lain naik ke atas takhta, maka hal itu dapat diterima atau ditentang, tetapi orang-orang menyangka bahwa menentang itu adalah harus dilakukan dengan pedang, sesungguhnya mereka mempunyai pendapat yang salah karena di dalam pertentangan yang seperti itu lebih banyak terkandung kejahatan dari pada kebaikannya, lagi pula jarang terjadi pemberontakan menimbulkan lebih banyak kebaikan dari pada kejahatan.

Demikianlah yang dialami oleh orang-orang yang memberontak Abdul Malik si Iraq, oleh Ibnu al-Muhallab yang memberontak melawan ayahnya di Khurasan, oleh Abu Muslim yang memberontak melawan pemerintah Umayyah di Khurasan juga dan oleh orang-orang yang memberontak melawan al-Manshur di Madinah dan Basrah.¹¹³ Walaupun seandainya para pemberontak ini adalah manusia-manusia yang saleh, paling lurus dan dapat dikatakan ahli-ahli surga, namun dosa mereka karena pemberontakan itu tidak dapat dihapuskan. Sejarah

¹¹² Khalid Ibrahim Jindan , *op.cit*, hlm. 124

¹¹³ Qomaruddin Khan, *op, cit*, hlm. 287

telah membuktikan kebenarannya bahwa tidak ada kebaikan yang ditimbulkan oleh pemberontakan itu baik untuk agama maupun untuk dunia.¹¹⁴

Kejujuran seorang imam tidak perlu melebihi seorang saksi biasa (yang menurut hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat yang ketat). Seorang saksi memberikan informasi mengenai sesuatu hal yang tidak diketahui dan apabila ia tidak jujur maka kebenaran informasi nya tidak dapat diuji, tetapi apabila seorang imam memberikan perintah, dengan gampang kita dapat melihat apakah perintahnya itu mentaati atau mengingkari Allah Swt. Dengan alasan seperti inilah, Allah Swt berfirman: “Apakah seorang yang aniaya (zalim) menyampaikan berita kepada kamu maka telitilah berita itu dengan sejelas-jelasnya”. Jadi perbuatan seorang imam dapat di kritik namun otoritas nya tidak dapat ditentang.¹¹⁵

Pelaksanaan sebuah fungsi sosial tidak perlu dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan batin atau moral pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian ia mengemukakan perbedaan penting diantara kehidupan pribadi seorang imam dengan akibat-akibat yang akan dipikulnya sendiri, dan sikap-sikap imam terhadap masyarakat dimana ia bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum di dalam masyarakat dan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹¹⁶

¹¹⁴ Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah, *op, cit*, Jilid II, hlm. 241

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 88

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG PEMIMPIN ZALIM

A. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Pemimpin Zalim

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Pemimpin zalim adalah pemimpin yang melakukan sebagian dosa, namun bukan menolak hukum Allah Swt, serta tidak bermaksud menggantikan Hukum Allah Swt tersebut.¹ Adapun Bentuk kezaliman itu dalam pandangan Ibnu Taimiyah terbagi ke dalam tiga bagian, *Pertama* zalim terhadap sesama manusia seperti mengambil harta orang lain, dengki dan lain-lain. *Kedua* zalim terhadap diri sendiri seperti minum khamer, berzina itupun jika dampaknya tidak meluas ke masyarakat lainnya. *Ketiga* mencakup kedua-duanya, seperti kejahatan kekuasaan, untuk kepentingan minum khamer dan berzina.²

Dalam pernyataan Ibnu Taimiyah di atas bahwa pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang melakukan sebagian dosa yang karenanya berhak secara mutlak disebut zalim seperti minum khamer, berzina atau mendera orang muslim tanpa adanya alasan yang benar dan jelas atau mengabaikan penetapan hukum yang berdasarkan syari'at Islam dalam suatu kejadian namun bukan menolak hukum Allah Swt. Sedangkan dalam hal-hal tertentu ia masih mempergunakan hukum yang diturunkan Allah Swt, di tengah-tengah manusia.

¹ Sebagaimana di nukil oleh M Arskal Salim , *Etika Intervensi Negara Perspektif politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, Cet ke-1, 1999, M Arskal mengambil dalam buku Ibnu Taimiyah, "*Al-Amru bil Mu'ruf Wa an-Nahyi Anil Mungka*," Terjemahan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani, 1993, hlm. 8

² *Ibid*, hlm. 48

Dan menurut pandangan Ibnu Taimiyah, bahwa pemimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya “kepemimpinan”. Sedangkan seluruh anak Adam, mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini sudah pasti butuh seseorang pemimpin untuk mengendalikan.³

Rasulullah Saw bersabda :

حدثنا علي بن بحر, ثنا حاتم بن إسماعيل, ثنا محمد بن عجلان, عن نافع, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا
 أَحَدَهُمْ, قَالَ نَافِعٌ : فَأَقُولُنَا لِأَبِي سَلَمَةَ :
 فَأَنْتَ أَمِيرُنَا {رواه أبو دود}

*Artinya : “Diberitakan dari Ali ibn Bahr, Hatim ibn Ismail, Muhammad ibn Ajlan, dari Nafi, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Apabila ada tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaknya mereka menjadikan salah satu sebagai Amir (pemimpin). “ Nafi berkata : ucapkanlah kepada Abi Salamah : Kamu sebagai pemimpin kita. (H.R Abu Daud dari Abu Hurairah) ”.*⁴

Hadis di atas bila dipahami lebih jauh, sesungguhnya jika dalam kelompok kecil, manusia saja di perlukan seorang pemimpin, secara logis tentu saja kelompok manusia yang lebih besar (rakyat) lebih memerlukan seorang pemimpin untuk mengatur urusan kehidupan mereka. Dari sini Rasulullah Saw.

³ Ibnu Taimiyyah, “*Al-Siyasah Al-syar’iyyah Fi Islahir Raa’i War Ra’iyyah*”, Terj. Rofi’ Munawwar, “Siyasah Syari’ah Etika Politik Islam”, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. ke-1, 1995, hlm. 119

⁴ Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats bin Ishaq Al-Azdi, “*Sunan Abi Daud*”, Jilid 2, cet. Ke 1, Mustafa al-babi al-Halabi wa auladihi, th 1952, hlm. 34

mewajibkan salah seseorang menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil dan bersifat mendadak (yakni dalam berpergian), sebagai isyarat dan perhatian akan pentingnya hal itu pada semua bentuk perkumpulan lain yang lebih besar.

Sedangkan proyek besar itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya *qawwah* (otoritas) dan *imarah* (kepemimpinan). Demikian pula seluruh rangkaian ibadah yang diwajibkan oleh-Nya seperti jihad, menegakkan keadilan, haji, melakukan upacara-upacara ritual, membela yang teraniaya dan menegakkan hukuman-hukuman. Tidak mungkin itu semua terealisasikan kecuali dengan adanya *quwwah* dan *imarah*.⁵ Dari sinilah ada sebuah riwayat Ibnu Taimiyah yang mengatakan :

سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ.⁶

Artinya : “Enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan.”

Menurut penulis riwayat di atas menjelaskan makna yang penting dalam konteks pemerintahan yaitu tentang kewajiban adanya Kepala Negara (penguasa), karena dalam kata سِتُّونَ سَنَةً (*enam puluh tahun*) mengandung arti lama seorang pemimpin berkuasa. Adapun kata إِمَامٌ جَائِرٌ berasal dari kata إِمَامٌ yang mempunyai arti kata imam atau ikutan⁷ sedangkan kata جَائِرٌ adalah (*isim fa'il*) dari kata

⁵ Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-syar'iyah*, op.cit, hlm. 8

⁶ *Ibid*, hlm 137.

⁷ Mahmud Yunus, “*Kamus Bahasa Arab-Indonesia*”, Jakarta: Hidakarya, 1989, hlm, 48

dasar جار - يجور - جورا Yang mempunyai arti kata menyimpang, menganiaya dan

bertindak zalim.⁸ Jadi إِمَامٌ جَائِرٌ adalah pemimpin yang bertindak zalim. Untuk

kata صَلَاحٌ adalah (isim tafdhil) dari kata dasar صَلَاح - يصلح - يصلح

Yang mempunyai arti kata baik, bagus.⁹ Dalam kalimat di atas menunjukkan

adanya kemaslahatan yang dilebihkan dalam mengandung sebuah kewajiban.

Sedangkankan arti لَيْلَةٍ dalam kamus bahasa arab mengandung arti semalam¹⁰

dan arti pada سُلْطَانٌ merupakan derivasi dari kata salatha yang berarti : السلاطه

القهر: وقد سلطه الله فنسلط عليهم Yang artinya memaksa atau dan sehingga memberikan

otoritas kepada Allah untuk menguasai.¹¹ Yang artinya memaksa atau dan

sehingga memberikan otoritas kepada Allah untuk menguasai.

Yang dimaksudkan Ibnu Taimiyah dalam riwayat di atas adalah kekuasaan pemimpin yang dipimpin pemimpin zalim selama enam puluh tahun lebih baik dari pada semalam (sesaat) tanpa adanya seorang pemimpin. Yakni adanya kemaslahatan dalam sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin zalim selama enam puluh tahun dibandingkan semalam tanpa adanya sebuah pemerintahan. Oleh karena itu manusia bila dibiarkan tanpa pemimpin akan menghasilkan kemudlaratan dan kemusnahan bagi manusia. Menolak

⁸ Ahmad Warson Munawwir, "Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia", Yogyakarta:PP al munawwir, 1984 hlm, 239

⁹ Ibid, hlm 843

¹⁰ Mahmud Yunus ,*op.cit*, hlm 408

¹¹ Ibnu al Mandzur, "Lisan al Arab", jilid 7 Beirut: Dar al Fikr, t.th. hlm. 320-321

kemudlaratan yang diperkirakan akan timbul dalam suatu hal yang diwajibkan menurut agama.

Kemudlaratan-kemudlaratan itu tidak akan dapat dihindari, melainkan dengan adanya seseorang kepala Negara meskipun zalim Maka betapa penting adanya kepala Negara adalah suatu hal yang diharuskan (diwajibkan). Sebagaiman Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Artinya : “Diberitakan dari Musadda, yahya bin said, abdillah , dari Nafi, dari Abdullah Ra, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : diwajibkan mendengarkan dan mentaati bagi setiap muslim, sesuatu di senangi maupun di benci selagi tidak diperintahkan berbuat maksiat, apabila di perintahkan berbuat maksiat maka tidaklah kamu mendengarkan dan mentaati.¹²

Melihat hadis di atas, maka kewajiban itu bukan berarti melihat orangnya akan tetapi melihat kepada orientasi kebijakannya pemimpin., Baik warga Negara itu suka maupun tidak suka asalkan tidak di perintahkan untuk berbuat maksiat. Jadi ada dasarnya hadis di atas menjelaskan tidak melihat sosok pemimpin akan tetapi melihat kebijakan seorang pemimpin

Adapun Rasulullah Saw Bersabda:

إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ رَيْبَةً.

¹² Imam Bukhori, “Shahih Bukhori”, jilid IV, Bairut: Dar Al fikr, tt hlm, 234

Artinya : “Dengarkanlah dan taatilah oleh kalian sekalipun yang dijadikan penguasa untuk kalian adalah seorang budak habasah (eteopia) yang kepalanya (rambutnya) seakan-akan buah kismis.”¹³

Maka wajib untuk membentuk sebuah *imarah* dalam rangka realisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada-Nya dalam *imarah*, yakni dengan menaati Allah dan mentaai Rasulullah adalah sebuah taqarub yang paling utama. Sementara merusak *imarah* sebagai realisasi taqarub adalah manakala muncul sebagian besar manusia yang ambisi terhadap *imarah* tadi atau terhadap harta kekayaan.¹⁴

Adapun pandangan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai ketaatan kepada pemimpin didasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa': ayat 58-59:

وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذَا قُوَّةٍ وَهُدًى مُّبِينٌ ۚ فَإِذَا دَعَا إِلَى فِتْنَةٍ فَانصُرُوا خُلَفَاءَكُمْ وَاصْطَبِرُوا ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحِيمُ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

¹³ Ibnu Kastir, “*Tafsir Ibnu Kastir*”, jilid II, terj DR. Abdullah bin Abdurrahman bin Ishak alu Syaikh. Jakarta, pustaka Imam Syafii, 2006 hlm, 234

¹⁴ Munawir Sjadzali, “*Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran*”, Jakarta: Penerbit UI-Press, 1993, hlm. 89

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ﴿58﴾ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” ﴿59﴾ (QS. An-Nisa':58-59).¹⁵

Dari dua ayat yang dikutip Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Siyasah al-Syar'iyat fi Islah al-Ra'iy wa al Ra'iyat* menjelaskan ada empat poin materi yaitu *pertama*, perintah menunaikan amanat, *kedua*, perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum, *ketiga*, perintah taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri, dan *keempat*, perintah menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikannya kepada Allah Swt dan Rasul- Nya.¹⁶

Menurut catatan penulis, dalam ayat di atas Ulama berpendapat ayat pertama diturunkan kepada para pemimpin atau penguasa. Kemudian apabila mereka memutuskan antara manusia, maka seharusnya dengan putusan yang adil.


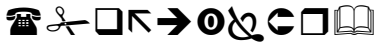







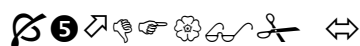

Adapun ayat kedua di turunkan untuk rakyat. Oleh karena itu, wajib bagi mereka untuk taat kepada pemimpin yang melaksanakan segala hal tersebut dalam membagi, memutusi dan lainnya. Kecuali apabila pemimpin itu memerintahkan untuk maksiat kepada Allah, maka tidak ada taat bagi makhluk dalam bermaksiat kepada khaliknya. Kemudian apabila kalian semua bertentangan dalam sesuatu maka kembalikan hal tersebut kepada Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Apabila pemimpin tidak memerintahkan hal tersebut, maka taatlah kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena hal

¹⁵ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*” . Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000. hlm.6

¹⁶ M. Arskal Salim. “*Etika Intervensi Negara*”, Jakarta: logos wacana ilmu, 1999, hlm 77

tersebut merupakan taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana apa yang di perintahkan Allah dan Rasul-Nya.¹⁷

Adapun lafad **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ** dalam tafsir Qurtubi diterangkan bahwa lafad ini ditunjukkan kepada pemimpin atau penguasa muslim secara umum yaitu Nabi dan seterusnya yang diberi sebuah kekuasaan. akan tetapi pendapat yang lebih jelas hal ini umum bagi setiap manusia yang memperoleh kekuasaan dengan melaksanakan amanat dalam pembagian harta, menolak kezaliman dan adil dalam memutuskan.¹⁸

Dalam lafad  
 
 dalam tafsir Fakhrur Razzi bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib berkata kewajiban bagi seorang imam untuk menghukumi apa yang diturunkan oleh Allah dan menyampaikan amanat apabila hal tersebut dilakukan maka kewajiban bagi rakyat untuk mendengarkan dan menaati . Dan lafad  
 menunjukkan wajib mengikuti kitab al-Qur'an dan as-Sunnah. lafad  
 menunjukkan bahwasanya berkumpulnya umat itu menjadi hujjah, dan dalil hal tersebut bahwasanya Allah Swt telah

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, op.cit, hlm 9

¹⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-anshari, “*Jamiul Ahkamil Qur'an*”, Bairut: Jilid 3, Darut Fikr, Cet.ke-1, 2005, hlm 177

memerintahkan untuk taat kepada pemimpin atas jalan yang pasti. Sebagian dari perintah taat kepada Allah harus menjaga jauh dari kesalahan.¹⁹

Lafad *فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ* menunjukkan bahwa Qiyas itu menjadi hujjah. Apabila kalian bertentangan dalam sesuatu yang hukumnya tidak disebut dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' maka wajib mengembalikan hukum tersebut kepada hukum yang nyata yaitu Qiyas.²⁰

Ibnu Taimiyah juga menganggap bahwa sultan atau kepala negara adalah Bayangan Allah di bumi, dengan arti bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi.²¹ (*"Inna al-Sultan zhill Allah Fi al-Ard"*) Di bagian lain Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa seorang pemimpin merupakan duta Tuhan atas hamba-hamba-Nya, tetapi di saat yang sama pemimpin juga adalah wakil para hamba (*"al-wulad Nuwwah Allah ala Ibadih wa wukala' al-Iba 'ala Nufusihim"*) Sehingga Ia menganggap bahwa kekuasaan yang diembannya adalah atas kehendak Tuhan dan Tuhan pula yang memberi kekuasaan kepadanya. Dalam ilmu tata Negara bahwa penguasa yang mengklaim dirinya bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan dan atas kehendak Tuhan, dan Tuhan pula yang memberi kekuasaan kepadanya, teori ini disebut dengan teori ketuhanan.²²

Adapun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada sebuah pemerintahan muslim berlaku zalim, dengan kata-katanya Ibnu Taimiyah mengungkapkan "sesungguhnya Tahun menolong pemerintahan yang adil meskipun kafir, tetapi tidak menolong

¹⁹ Muhammad Ar-Razzi Fakhrur Razzi bin Dhiyauddin Umar, *Tafsir Fakhrur Razzi al-Tafsir kabir wa mafatihul Ghaib*, Jilid 4, Bairut: Darut Fikri, Cet.ke-1, 2005, hlm 124

²⁰ *Ibid*, hlm 127

²¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-syar'iyah*, op.cit, hlm. 162

²² Soehino, *"Ilmu Negara"*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 152-153.

pemerintahan yang zalim walaupun muslim. Maka keadilan walaupun dengan kekafiran memungkinkan kehidupan dunia yang terus berkesinambungan, akan tetapi kezaliman sungguhpun dengan keislaman tak akan mampu melestarikan kehidupan di dunia ini.²³

Menurut catatan penulis, dorongan utama kehidupan politik adalah adil. Ini karena arti dari adil dan tidak adil tergantung kepada pengetahuan, oleh karena itu, seluruh agama tidak ada apa-apanya tanpa adanya pengetahuan dan keadilan. Sementara dalam arti kata pengetahuan dan keadilan yaitu kebodohan dan kezaliman.

Dalam ungkapan Ibnu Taimiyah di atas, bahwa ia ingin mengatakan “pemerintahan yang adil walaupun kafir itu jauh lebih baik daripada seorang pemerintahan yang zalim sekalipun muslim”. Dengan mengungkapkan hal itu, Ibnu Taimiyah sesungguhnya hendak mengajukan pandangan bahwa esensi (bentuk dan nilai) lebih penting daripada simbol.

Bagi Ibnu Taimiyah, Negara tak lain Instrumen yang mewujudkan keadilan sosial. Maka apapun label, simbol dan bentuk yang dipakai oleh sebuah Negara dan pemerintahan, jauh berguna bagi terwujudnya cita-cita keadilan adalah sebuah bentuk Islami dan wajib didukung. Sebaliknya, suatu Negara pemerintahan dengan label, simbol dan bentuk apa pun cenderung selalu melecehkan cita-cita keadilan dan kepentingan rakyat adalah bentuk tidak Islami dan tidak perlu ditaati.²⁴

²³ Sebagaimana di nukil oleh M Arskal Salim, “*Etika Intervensi Negara Perspektif politik Ibnu Taimiyah*”, Jakarta: Logos, Cet ke-1, 1999, hlm. 80 dalam kitab Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam aw wazifah al-Hukumah al-Islamiyah*, ttp: Dar al katib al-arabi tth.

²⁴ M Arskal Salim. *op.cit*, hlm. 80

Dalam hal pengingkaran dan pemberontakan Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa manusia boleh mengingkari perintah yang tidak baik dari seorang imam dan menderita hukuman karenanya, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk melawannya selama ia melakukan sholat.²⁵ Alasan Ibnu Taimiyah menolak pemberontakan karena perlawanan kezaliman pemimpin dapat mengingkari kepada kezaliman atau bencana yang lebih besar, karena munculnya perpecahan (*fitnah*) di kalangan masyarakat. Umat Islam lebih baik mempertahankan apa yang telah di miliki ketimbang memulai suatu tindakan yang dapat menimbulkan suasana yang lebih buruk.

Menurut penulis, pada dasarnya kepemimpinan tersebut merupakan suatu amanah Allah, dan sekaligus amanah sekelompok orang yang harus dijalankan dengan baik dan dengan seadil mungkin, apabila seseorang tidak biasa melaksanakan amanah tersebut, yang sesuai dengan ajaran agama artinya ia sudah melakukan kesalahan kepada Allah, dan sikap manusia adalah menegakkan keadilan dan mencegah segala bentuk kemungkaran atau kezaliman sesuai dengan Firman Allah, dalam Surat Ali Imran (3): 104. yang berbunyi :



²⁵ Qomaruddinkhan, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah", Bandung: PT, Pustaka Salman, 1983, hlm *Ibid*, hlm 285

*Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”*²⁶

Firman Allah di atas berangapan bahwa seseorang muslim di haruskan mempunyai keberanian dalam melakukan kritikan ataupun cara-cara lain yang di tujukan terhadap pemimpin zalim dan kita di haruskan memerangi suatu kezaliman karena mengucapkan kata yang benar (*haq*) atau melakukan kretikan dengan cara lain dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di depan pemimpin yang berbuat zalim adalah merupakan suatu tindakan jihad yang sangat disukai oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعِزَّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

*Artinya : “Dari Abi Sa’id Al-Khudri R.A berkata: Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa di antaramu melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya (mencegah) dengan tanganya (kekuasaan), jika ia tidak sanggup maka dengan lidahnya (nasihat). Jika tak sanggup juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju, tinggalkan). Dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”*²⁷

Dalam hadis di atas bahwa ada tiga tingkatan manusia menghadapi kemungkaran yaitu *Pertama*, بِيَدِهِ (dengan kekuasaan) atau kewenangan yang dimiliki, Dalam hal ini melakukan perlawanan (pemberontkan atau makar) di depan pemimpin yang zalim memang suatu resiko yang sangat besar, karena hal

²⁶ Departemen Agama RI, *op cit.* hlm. 93

²⁷ Imam Nawawi, “*Hadis Arbain Annawawiyah*”, Terj Aminah Abd Dahlan, Bandung: PT al-Ma’rif, 2008, hlm 84.

itu dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang melakukannya. *Kedua* **فِيلْسَانِهِ** dengan nasihat (lisan) yakni melakukan dengan kritikan (oposisi) dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di depan pemimpin yang berbuat zalim bukan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. *Ketiga* **فَيْئَلِيهِ** dengan hati (diam) yakni kaum muslimin tetap sabar dalam menghadapi pemimpin yang zalim dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun juga.

Perlu digaris bawahi, bahwa sikap-sikap yang berbentuk kekuasaan (peperangan dan pemberontakan) terhadap pemimpin zalim sekaligus akan berdampak kekosongan dalam kepemimpinan dan dalam hubungan dengan rakyat akan membebankan kepada rakyat terhadap peperangan antar saudara, menimbulkan kesengsaraan dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa penentangan boleh dibuat jika pemimpin melakukan kekufuran yang tsabit dengan dalil yang nyata, namun jelas dari pandangan mereka bahwa tantangan bersenjata adalah suatu yang tidak digalakkan sama sekali kerana ia sering mengakibatkan pertumpahan darah, kerusakan dan mudharat yang lebih besar.

Adapun bentuk penyelesain terhadap pemimpin dengan bentuk kritikan (dengan lisan) yang harus tetap dilakukan didalam kerangka menegakkan kebenaran bukan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Kemudian, apabila tindakan oposisi tidak dapat bergulir maka di anjurkan untuk bersabar (dengan hati), karena bagi orang yang keluar dari golongan kaum muslim dengan

tujuan untuk tidak mentaati imam maka matinya dianggap seperti matinya kaum jahiliyah.

Pada dasarnya memerangi pemerintah (pemberontakan) adalah bentuk kemudharatan yang sangat besar dan kemudharatan lebih besar daripada manfaatnya. Sebab segala perilaku peperangan antar saudara tersebut akan menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia (rakyat) secara umum dan oleh karena itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *“Segala bentuk Kemudharatan harus di hilangkan”*.²⁸

Kaidah fiqhiyah di atas mengajarkan segala bentuk kemudharatan harus di hilangkan. yakni tindakan perlawanan terhadap penguasa zalim yang terjadi dalam suatu negara itu akan mendatangkan kemudharatan bagi rakyat.

Sedangkan mengenai sholat dalam pandangan Ibnu Taimiyah tentang pemberontakan pemimpin zalim adalah bentuk tolak ukur ketaatan manusia kepada Allah Swt yakni melaksanakan sholat, apabila sholat itu baik maka semuanya akan baik akan tetapi kalau sholat seseorang itu buruk maka yang lainnya menjadi buruk. Jadi indikasi ketaatan manusia kepada Allah Swt dalam melakukan segala aktivitas adalah sholat.

Dari uraian yang telah diungkapkan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep pemerintahan pemimpin zalim yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah merupakan konsep kewajiban mendirikan Negara dan kepatuhan

²⁸ Mukhtar yahya dan Fatkhurrahman, *“Dasar-dasar pembinaan Hukum Islam”*, Bandung: al-Ma’arif, 1993, hlm 510

terhadap pemimpin yang zalim dalam pemerintahan. Penulis mendasarkan kesimpulan pada beberapa alasan, antara lain: *pertama*, agama (Islam) tidak mungkin ditegakkan tanpa ada pemerintahan (*imarah*). *Kedua*, kemaslahatan umat Islam manusia tidak akan terealisasi secara sempurna kecuali dengan menata kehidupan bermasyarakat, mengingat para anggotanya satu dengan lain saling mempunyai kebutuhan. Sedangkan tata kehidupan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada orang yang memimpin. *Ketiga*, kalau dalam sekelompok orang berjumlah sedikit saja Nabi Muhammad Saw, memerintahkan umatnya supaya mengangkat seorang pemimpin (kepala Negara), maka sudah semestinya apabila masalah kepemimpinan (*leadership*) ini mendapat perhatian serius bagi setiap bertuk organisasi sosial kemasyarakatan yang lebih besar (seperti Negara dan pemerintahan). *Keempat*, seorang pemimpin non muslim yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim, sebab yang dibutuhkan umat adalah keadilan dan kesejahteraan yang menyeluruh, bukan figur maupun sosok tertentu.

Sedangkan amanat dan keadilan sangat dominan dalam pemikiran politik Ibnu Taimiyah yang berdasarkan pada agama. Ibnu Taimiyah memang dikenal sebagai pemikir muslim yang sangat kuat berpegang pada *nash-nash al-Qur'an* dan *Sunnah* yang menghiasi pembahasannya dalam berbagai bidang. Demikian pula pemikiran politik nya sangat kuat relevansinya dengan syari'at dan etika. Orientasi pemikiran politiknya yang berdasarkan agama dan etika. Dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah dapat dilihat dari tiga alasan. *Pertama* dari judul bukunya di bidang politik *al-Siyasah al-Syar'yyat fi Islah al-Ra'iy wa al*

Ra'yyat (politik yang berdasarkan bagi perbaikan pemimpin (pengembala) dan yang di pimpin (Gembala). *Kedua* dalam muqaddimah buku tersebut tegaskan bahwa risalahnya itu membicarakan politik ketuhanan dan politik kenabian yang diperlukan oleh pemimpin dan rakyat. *Ketiga* dalam pendahuluan buku juga ia tegaskan bahwa teori politiknya berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 dan 59 yaitu ayat 58 ditujukan kepada para penguasa dan ayat 59 ditujukan kepada rakyat.²⁹

Sedangkan prinsip pertama dalam teori politik Islam adalah iman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah, yang merupakan landasan sistem dan moral yang ditanamkan oleh para Rasul. Dari sinilah filsafat politik Islam. Prinsip dasar Islam adalah bahwa makhluk manusia, baik secara individual maupun kelompok, harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan, legislative serta penguasaan atas sesamanya.

Abul A'la Al-Maududi mengatakan bahwa tidak seorang pun yang diperkenankan memberikan perintah dan aturan-aturan sekehendaknya sendiri dan tidak seorang pun yang diperkenankan untuk mengakui kewajiban untuk melaksanakan perintah, tidak seorang pun diberi hak istimewa untuk membuat undang-undang sekehendak hati sendiri dan tidak seorang pun yang wajib mengikatkan dirinya kepada undang-undang yang telah dibentuk kecuali hak ini merupakan hak Allah Swt.³⁰

²⁹ Suyuti Pulungan, "*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*", cet, ke- 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 273

³⁰ Abul A'la Al-Maududi "*The Islamic law and Constitution*", Terj, Drs. Asep Hikmat "Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Bandung, Penerbit Mizan, 1995, hlm.157

Setiap orang Islam tentu memiliki kesadaran berpolitik atau mendirikan suatu pemerintahan itu menjadikan keharusan terutama untuk mempengaruhi budaya politik yang penuh dengan nilai-nilai etika dan moral.

Dalam etika Islam, politik harus bertujuan *amar ma'ruf nahi munkar*, mengingatkan yang salah dan mendorong sebanyak mungkin kreativitas masyarakat dalam berlomba-lomba merah kebaikan.³¹ Oleh karena itu, produk politik Islam tidak mungkin menjadi sectarian atau kepentingan umat Islam saja. Melainkan meratakan keadilan dan rahmat bagi orang banyak (*rahmatan lil-'alamin*) dan semua terwujud dengan adanya suatu pemerintahan.

Mengenai hubungan antara penguasa (pemerintah dan warga negara) seperti hak hidup, hak-hak wanita, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, hak partisipasi dalam pemerintah, yang di sini umat Islam harus terjun ke percaturan politik untuk mengarahkan kehidupan masyarakat Islam yang sejalan dengan hukum-hukum Tuhan, baik dalam hal yang berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan maupun kemasyarakatan.³²

³¹ A.M Fatwa. "*Demokrasi Teitis Upaya merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, 2001, hlm 258

³² Adeng Muchtar Ghazali, "*Pemikiran Islam Kontemporen Suatu Refleksi Keagamaan yang dialogis*", Bandung: Pustaka setia, 2005, hlm 117

Sekarang ini manusia sangat membutuhkan bantuan orang lain, apalagi tanggung jawab untuk mencegah timbulnya hal-hal yang buruk atau munkar merupakan kewajiban kaum muslim untuk mencegahnya.³³

Oleh karena itu, bahwa organisasi politik bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangnya agama tidak akan tegak dan kukuh dan hal ini tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Islam adalah *multiinterpretatif*, yang membuka kemungkinan banyaknya penafsiran mengenainya.³⁴

Mengenai Relevansi ajaran Politik Islam menunjukan adanya ajaran-ajaran politik yang terkandung dalam al-Qur'an. Ini menunjukan kekeliruan pendapat yang memisahkan Islam dari kehidupan politik dan juga membantah pendapat yang menyatakan bahwa ide-ide politik terdapat kehidupan masyarakat muslim muncul karena pengaruh ide-ide keagamaan. Justru kehidupan politik tersebut adalah manifestasi dari ajaran-ajaran politik Qur'ani.³⁵

Sebagai agama yang universal, Islam menolak dikotomi agama dan politik, namun hubungan keduanya saling memerlukan, agama memerlukan politik sehingga agama dapat terpelihara dan politik memerlukan agama sehingga politik itu bermoral.

Simbiosisme agama dan politik, mengandung arti bahwa agama merupakan sumber etika dan moralitas politik. Perjuangan dalam politik adalah untuk

³³ *Ibid*, hlm 104

³⁴ *Ibid*, hlm 26

³⁵ Abdul Muin Salim, "*Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Dalam Al-Qur'an*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-3, hlm 131

mengalokasi etika dan moralitas, agama tersebut ke dalam proses politik yang ada pada suatu bangsa dalam rangka mencapai tujuan bangsa tersebut.³⁶

Fungsional agama sebagai sumber motivasi bagi pembangunan membawa implikasi terhadap pendekatan pembangunan terhadap agama. Dalam hal ini, agama tidak hanya dijadikan sarana pembangunan, yang menekankan pembangunan aspek non-fisik dari keberagamaan, yaitu menciptakan suasana kondusif, penghormatan dan pengalaman nilai-nilai agama.³⁷

Dari perspektif hukum Islam, konsep yang ditawarkan Ibnu Taimiyah boleh dikatakan relevan secara tekstual dan konstektual karena dengan adanya pemerintahan yang disertai dengan kepemimpinan, maka peraturan-peraturan akan menjadi aman dan adil. Adapun mengenai pemimpin zalim dalam pemerintahan, maka dapat ditoleransi dengan menegakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Adapun konsep Ibnu Taimiyah tidak bisa dikatakan relevan karena dalam proses merubah bentuk kezaliman menuju pemerintahan yang di inginkan Ibnu Taimiyah tidak dapat dilakukan dalam yang cepat akan tetapi mencakup cukup lama.

Maka dalam masalah ini Ibnu Taimiyah berdalil, kewajiban manusia hanyalah tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya disamping patuh kepada *Ulil al-amr*.³⁸

³⁶ M. Din Syamsuddin, “*Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani*”, Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 2002 hlm 218

³⁷ *Ibid*, hlm 219

³⁸ Menurut pemahaman Ibnu Taimiyah, *uli al-amr* terdiri atas dua golongan : pemerintahan (*al-umara*) dan ulama (Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-syar'iyah Fi Islahir Raa'i War Ra'iyah*, kairo: Dar al-kitab al-arabi, 1969 hlm 159)

Jadi mengenai relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim dengan konsep siyasah Islam adalah menciptakan manusia untuk *beramar ma'ruf* dan *nahi munkar*.³⁹

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim

Ibnu Taimiyah adalah cermin pribadi yang mampu membangkitkan rasa kagum yang dalam pada sebagian masyarakat yang sekaligus juga cacik pada bagian yang lain. Para penyanjungnya memuja dan menghormatinya sebagai seorang wali, sedang orang-orang yang menentangnya melemparkan kutukan dengan segala cacik maki karena ia dianggap melanggar batas dan melakukan penyelewengan. Anggapan negatif mereka biasanya terungkap dalam bentuk makian tajam dan kadang juga deraan fisik yang memilukan.

Perpaduan antara kecerdasan otak dan ketekunan dalam belajar serta kepribadian nya yang dihiasi dengan akhlak yang mulia, ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi ulama' besar yang sangat berprestasi. Dalam pada itu ia dapat digolongkan sebagai salah seorang tokoh yang pemahaman keagamaannya boleh dikatakan mandiri dalam pengertian tidak mau terikat pada pemahaman siapapun dan aliran Islam yang manapun. Namun bersamaan dengan itu dia tidak menolak untuk menerima dan membela pendapat siapa dan aliran Islam manapun jika menurut penilaian nya sejalan dan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁰

³⁹ Munawir Sjadzali, *op cit*, hlm 89

⁴⁰ Jeje Abdul Rajak, "*Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Gazali dan Ibnu Taimiyah*", Surabaya: PT. Bina Ilmu. Th, 1999, hlm. 118.

Ibnu Taimiyah menekuni setiap masalah dengan sepenuh hati dan dengan sedalam-dalamnya. Kadang-kadang untuk mempelajari satu masalah ia menghabiskan waktu sampai beberapa malam dan masalah tersebut tidak akan ditinggalkannya sebelum dapat dipecahkan dengan memuaskan, ia merenunginya dengan perenungan yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Saw dan kesimpulan-kesimpulannya selalu sesuai menurut akal pikiran dengan pertimbangan-pertimbangan dan membanding-bandingkan secara berulang-ulang sehingga kebenarannya tampak jelas di depan matanya. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang cendekiawan yang paling kritis dan paling kompeten yang dapat menyimpulkan peraturan-peraturan dan hukum dari hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an.⁴¹

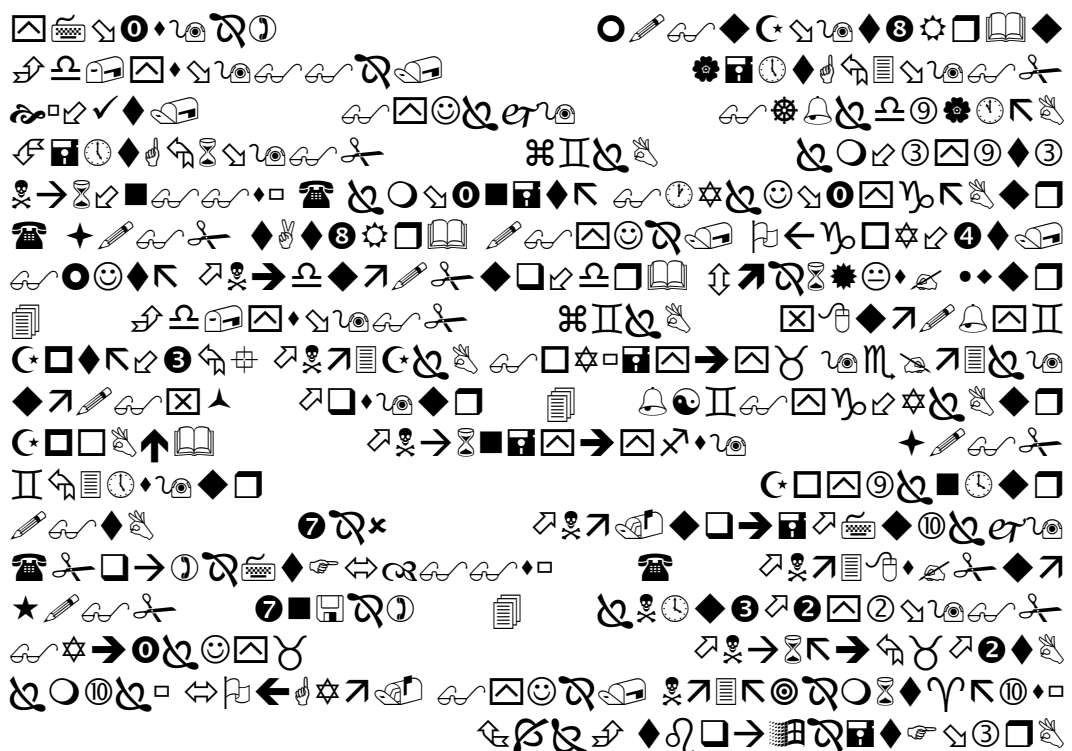
Ikhtisar pendekatan Ibnu Taimiyah dalam mengkaji Islam, dapat di lihat pada pengantar bukunya yang berjudul “ *Ma'arij Al-Wusul* “, yang tujuannya adalah untuk menegaskan kembali kedudukan mazhab Hambali yang menjadikan teks-teks kitab suci sebagai satu-satunya sumber hukum dan teologi yang terpercaya. Jadi, mazhab itu berusaha untuk mempersempit kemungkinan bagi suatu perubahan atau inovasi yang mungkin muncul dari berbagai pendekatan bukan salaf (ortodoks) terhadap pengetahuan agama pada masa-masa berikutnya. Adapun metode istinbath hukum Ibnu Taimiyah dalam menggali hukum adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

⁴¹ Qomaruddin khan, *op. cit*, hlm. 27, 28

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam ajaran Islam, demikian S.Hossein Nasr, al-Qur'an adalah intisari semua pengetahuan yang terkandung di dalamnya hanyalah benih-benih atau prinsip-prinsipnya saja.⁴²

Kaum Muslimin telah sepakat menerima keotentikan al-Qur'an, karena al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir. Oleh sebab itu, dari segi riwayat, al-Qur'an di pandang sebagai sebagai *qath'i tsubut* (riwayatnya diterima secara pasti/meyakinkan). Bertolak dari prinsip, segenap kaum Muslim sepakat bahwa al-Qur'an sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar Allah ⁴³ yang termaktub didalam surat al maidah ayat 48 yaitu :



⁴² Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet Ke-11, hlm 79

⁴³ Nasrun Rusli, "Konsep Ijtihad Al-Syaukani", Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm.28

*Artinya : “Dan telah kami turunkan kepadamu al-Qur’an dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai timbangan terhadap kitab-kitab lain itu, maka putuskanlah hukum diantara mereka dengan yang telah diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan kebenaran yang telah datang kepadamu” (Q.S al-Maidah : 48)*⁴⁴

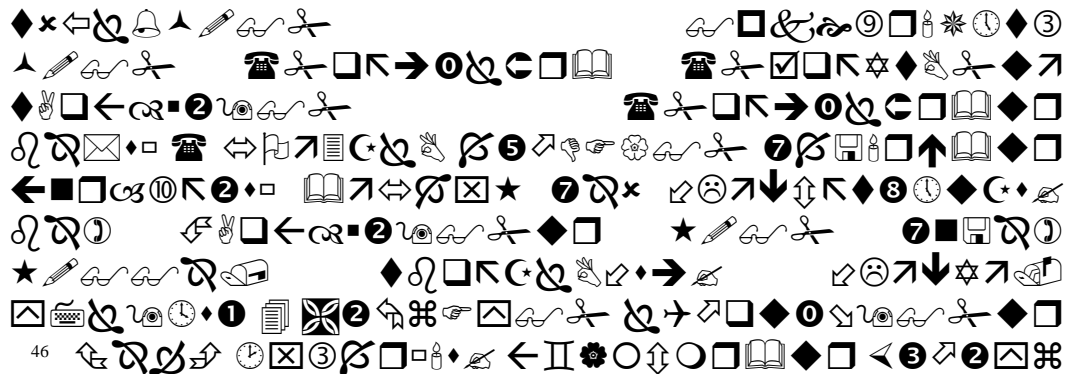
Sama halnya dengan ulama Islam yang lain, Ibnu Taimiyah menempatkan al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Menurutnya, kebutuhan umat Islam sangat mendasar untuk memahami al-Qur’an karena dia merupakan tali (agama) Allah yang sangat kuat (*habl Allah al-matin*), peringatannya yang bijak (*az-zikr al-hakim*), dan jalan yang lurus (*as-sirat al-mustaqim*). Dengan al- Qur’an hawa nafsu tidak akan menyimpang dan perkataan tidak akan tertukar meskipun banyak penolakan. Perbendaraan al-Qur’an tidak akan pernah habis, dan para *ulama* (ilmuwan) tidak akan pernah merasa kenyang mempelajarinya. Orang yang berkata dengan al-Qur’an pasti benar, dan siapa yang beramal dengannya pasti diberi pahala. Siapa yang berhukum dengannya pasti adil, dan orang yang menyeru kepadanya akan diberi petunjuk kejalan yang lurus. Allah akan membinasakan orang yang meninggalkan al-Qur’an karena sombong, dan yang menyesatkan siapa saja yang mencari hidayah selain al-Qur’an.⁴⁵

Ibnu Taimiyah dalam hal menentukan pengabdian kepada penguasa zalim memberikan keputusan hukum atasnya, dengan mendasarkan al-Qur’an sebagai jalan istinbath yang digunakan sebagai jalan pokok dalam menghasilkan hukum

⁴⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm 92

⁴⁵ Muhammad Amin, “*Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*”, Jakarta : INIS, 1991 hlm 71.

pada suatu masalah yang ada. Firman Allah Swt dalam surat an-Nissa ayat 59 sebagai berikut:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa ayat di atas, merupakan ayat pokok dalam kewajiban manusia tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya disamping patuh kepada *ulil al-amr*.

Dengan demikian Ibnu Taimiyah berpendapat pemimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan tegaknya tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya “kepemimpinan”. bahwa orang yang pantas menjadi kepala pemerintahan adalah orang yang memiliki kekuatan (*al quwwat*), dan integritas (*al amanat*), adil Dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin non muslim yang adil lebih baik

⁴⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm 69

daripada pemimpin muslim yang zalim itu berdasarkan kepada ketentuan teks (*nash*) al-Qur'an.

2. Al-Hadis

Umat Islam telah sepakat, bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah Saw, baik ucapan, perbuatan maupun taqirir, membentuk hukum syariat Islam atau tuntunan yang disampaikan kepada kita dengan sanad yang shahih yang mendatangkan kepastian atau dugaan yang kuat, maka kebenarannya itu sekaligus merupakan hujjah atas umat Islam, sumber daripada pembentukan hukum syariat Islam, yang oleh para mujtahiddin diistimbathkan dari padanya, hukum-hukum syariat mengenai perbuatan orang-orang mukallaf. Artinya bahwa hukum yang datang dalam sunnah-sunnah ini adalah hukum-hukum yang datang di dalam al-Qur'an, sebagai undang-undang yang harus diikuti.⁴⁷

Sebagai ulama' Ibnu Taimiyah mempunyai pengetahuan yang luas mengenai ilmu rijalul hadis (*perowi hadis*) mengenai hadis-hadis yang di dalaminya semuanya dikembalikan (dirujukkan) kepada kitab hadist yang enam. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa setiap hadist yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah bukanlah hadis, namun beliau mengatakan kekuasaan masih di tangan Allah Swt.⁴⁸

Selain kelompok Inkar al-Sunnah, setiap muslim (*muslimat*) yakin bahwa al-hadis adalah sumber kedua bagi hukum Islam setelah al-Qur'an. Bahkan, sebagian Imam mazhab seperti Ahmad ibnu Hanbal, menempatkan al-hadis sebagai sumber hukum Islam pertama dengan al-Qur'an. Berbeda dengan Ahmad

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh*", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, Cet Ke-8, hlm 48

⁴⁸ Qomaruddinkhan, *op.cit*, hlm. 19

ibnu Hanbal, Ibnu Taimiyah meletakkan al-hadis sebagai sumber hukum Islam kedua dan menempatkan al-Qur'an sebagai hukum Islam yang pertama. Penolakan tegas Ibnu Taimiyah terhadap kebolehan menghapus (hukum) al-Qur'an dengan al-hadis (*Naskh Al-Qur'an bi As-Sunnah*),⁴⁹ yang dianut oleh kebanyakan ulama, termasuk di dalamnya Ahmad ibnu Hanbal (menurut satu riwayat), tampak semakin memperjelas pendiriannya untuk tidak mensederajatkan al-hadis dengan al-Qur'an. Dan memang dari banyak segi al-hadis berbeda dengan al-Qur'an, meskipun dari beberapa segi tertentu keduanya memiliki unsur persamaan.⁵⁰ Di samping membedakan al-Hadis dari segi dalalah, yakni ada yang dalalahnya *qath'iy* dan ada yang tidak bersifat *qath'iy* (*ghair qath'iyyah*), Ibnu Taimiyah membagi al-hadis (dari segi penyampaian) kepada tiga bagian.⁵¹

Pertama, al-hadis mutawatir yang tidak menyalahi lahiriyah al-Qur'an, bahkan berfungsi sebagai penafsir al-Qur'an.yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah hadis-hadis (*mutawatir*) yang berkenaan dengan masalah zakat, pelaksanaan haji, umrah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hukum-hukum

⁴⁹ Muhammad Amin, *op.cit*, hlm 114

⁵⁰ Dilihat dari segi cara (*kaifiyyah*) penyampaian, Al-Qur'an disampaikan secara mutawatir dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sedangkan umumnya Al-Hadits disampaikan melalui riwayat *Ahad*, dan relatif sedikit jumlahnya yang disampaikan secaramutawatir. Perbedaan lain kita jumpai dalam sejarah pemeliharaan kemurnian dan keutuhannya. Al-Qur'an dicatat dan dihafal banyak orang dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi (sejak zaman Nabi saw, sampai sekarang dan mendatang), sedangkan Al-Hadits tidak semuanya dicatat dan dihafal orang secara utuh dan menyeluruh. Berbeda dengan Al-Qur'an yang secara resmi telah dicatat sejak masa Nabi Muhammad saw, walaupun baru dihimpun dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar dan dibukukan serta diperbanyak pada zaman Ustman bin Affan, sedangkan Al-Hadits baru ditulis secara resmi pada masa khalifah Umar ibnu Abd Al-Aziz, kendatipun secara tidak resmi, sebagian Al-Hadits memang ada yang sudah dicatat sejak zaman Nabi. Belum lagi dilihat dari segi *Qath'iy Al-Wurudnya* . al-Qur'an semuanya *Qath'iy Al- Wurudnya* meskipun dari segi dalalah (petunjuk) nya ada yang bersifat zhanni, sedangkan al- Hadits di samping ada yang *Qath'iy Al-Wurudnya* , banyak juga yang *Zhanni Al-Wurud*. Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*.

⁵¹ *Ibid*, hlm 115

al-Qur'an yang sukar diketahui tanpa melalui al-hadis. Terhadap kelompok hadis-hadis yang pertama ini, kata Ibnu Taimiyah, telah ada kesepakatan ulama al-hadis untuk menerimanya sebagai *hujjah* dan menempatkan fungsinya sebagai pelengkap dan penyempurna al-Qur'an. Orang yang mengingkari *kehujjahan* al-hadis ini berarti mengingkari salah satu sumber agama yang sangat penting dan menghancurkan sendi Islam yang amat kukuh. *Kedua*, hadis-hadis mutawatirah yang tidak menafsirkan lahiriyah nash al-Qur'an, atau malah menyalahi lahiriyah al-Qur'an karena mendatangkan hukum baru yang tidak ada dalam al-Qur'an, seperti hadis tentang penentuan *nishab* pencurian, hadis tentang hukuman rajam bagi pezina, dan hadis-hadis lain seperti itu. Selain kelompok khawarij dan orang-orang yangg sepaham dengan kaum radiakal ini, para ulama salaf dan semua ahli fiqh, kata Ibnu Taimiyah, menerima *kehujjahan* hadis-hadis kelompok kedua. *Ketiga*, hadis-hadis Ahad yang penyampaiannya melalui riwayat yang *siqah* (terpercaya). Kesemua al-hadis ini pun, kata Ibnu Taimiyah, kehujjahannya telah diakui oleh para ahli fiqh, ahli al-hadis, ahli tasawuf, dan umumnya para ulama yang lain meskipun sebagian ahli kalam dan ra'y hanya menerima sebagian (yang sesuai dengan pendapatnya) dan menolak sebagian yang lain berdasarkan syarat-syarat tertentu yang mereka buat sendiri.⁵²

Terhadap dalil as-Sunah dalam hal pemimpin, Ibnu Taimiyah menggunakannya sebagai penguat atas pendapatnya dan sekaligus sebagai penjelas atas nukilan-nukilan ayat al-Qur'an. Rasulullah Saw bersabda yang dinukil dalam kitab bukunya di bidang politik : *al-Siyasah al-Syar'iyat fi Islah*

⁵² *Ibid.* hlm, 116

al-Ra'iy wa al Ra'yyat, dalam menanggapi tentang kewajiban seseorang Muslim

Terhadap penguasa sebagai berikut:

Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : على المرء المسلم

السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

(رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar RA, Nabi Saw bahwasanya beliau bersabda, kewajiban seseorang Muslim (terhadap uli al-amr) ialah mendengarkan dan mematuhi perintahnya , baik yang sukai maupun dia benci, kecuali jika diperintahkan supaya berbuat maksiat, kalau diperintah supaya berbuat maksiat, dia tidak boleh mendengar dan mentaati (perintahnya).” (H.R Muslim)⁵³

Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ, قَالَ نَافِعٌ : فَأَقْلُنَا لِأَبِي سَلَمَةَ :

{رواه أبو دود} فَأَنْتَ أَمِيرُنَا

Artinya : “Apabila ada tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaknya mereka menjadikan salah satu sebagai Amir (pemimpin). “ Nafi berkata : ucapkanlah kepada Abi Salamah : Kamu sebagai pemimpin kita. (H.R Abu Daud dari Abu Hurairah).”⁵⁴

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut diatas

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره yang dimaksud adalah tunduk

terhadap perintah penguasa (*uli al-amr*) dengan mendengar dan mematuhi perintahnya, baik dia sukai maupun yang dia benci kecuali perintah berbuat

⁵³ Imam Muslim, “*Sahih Muslim*”, Juz II, Beirut-Lebanon : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah,t,th, hlm 131

⁵⁴ Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats bin Ishaq Al-Azdi, *op.cit*, hlm. 34

maksiat. Maka tidak diperkenankan untuk mendengar maupun mematuhi. Dengan demikian bahwa kewajiban manusia hanyalah tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya di samping patuh kepada penguasa (*uli al amr*) selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak memerintahkan maksiat.

Dan dalam hadis kedua Rasulullah Saw mewajibkan salah seseorang menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil dan bersifat mendadak (yakni dalam berpergian), sebagai isyarat dan perhatian akan pentingnya hal itu pada semua bentuk perkumpulan lain yang lebih besar. Juga karena Allah Swt telah mewajibkan *amar ma'ruf dan nahi munkar*.

3. Al-Qiyas

Selain yang telah disebutkan diatas, Ibnu Taimiyah juga menerima Al-qiyas sebagai dasar hukum, menurutnya :

القياس هو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين.

Artinya : “*Al-Qiyas adalah menghimpun dua masalah yang serupa dan memisahkan (membedakan) dua masalah yang berbeda* “.⁵⁵

Dengan cara qiyas itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya al-Qur'an dan al-hadis. Sebab hukum Islam, kadang tersurat jelas dalam nash al-Qur'an atau al-hadis. Kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Mengenai qiyas ini, Imam Syafi'i mengatakan : “ setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang

⁵⁵ *Ibid*, hlm 124

pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah yaitu dengan ijtihad dan ijtihad itu adalah al-Qiyas.⁵⁶

Ibnu Taimiyah kemudian membagi qiyas ke dalam dua macam yaitu qiyas al-Shahih dan qiyas al-fasid (*ghair Al-shahih*). qiyas al-shahih ialah qiyas yang dengannya (hukum-hukum syariat) dapat tersampaikan yaitu dengan cara menggabungkan dua masalah (kasus) yang serupa dan membedakan dua kasus yang berbeda. Yang pertama disebut qiyas al-tard, sedangkan yang kedua dinamai qiyas al-‘aks.⁵⁷

Dinamai qiyas at-tard, karena ada kesamaan hukum dalam masalah-masalah yang diperbandingkan (*ashl dan far’*), sehingga berlakulah hukum yang sama terhadap masalah-masalah yang semula masih samar hukumnya. Sedangkan disebut qiyas al-aks, karena antara masalah yang diperbandingkan itu terdapat perbedaan (berlawanan) hukumnya. Inilah yang dinyatakan para fuqaha bahwa ‘*illat al-fiqhiyyah*’ itu berlaku *al-Tard* (paralel) dan *al-aks* (kebalikannya). Yakni, jika ditemukan ‘illatnya, maka diperolehnya (kesamaan) hukumnya, tetapi jika tidak dijumpai ‘illatnya, maka berlakulah hukum kebalikan atau yang menyalahinya. Sedangkan qiyas al-shahih, kata Ibnu Taimiyah, ada dua macam yaitu :⁵⁸

Pertama, qiyas yang didalamnya tidak ada perbedaan antara *ashl dan far’*, selain perbedaan yang tidak menimbulkan pengaruh atau efek (*qhair mu’assirah*)

⁵⁶ Muhammad Abu Zaahrah, “*Ushul Al-Fiqh*”, Terj. Pustaka Firdaus, “*Ushul Fiqh*”, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003, Cet Ke -8, hlm 336.

⁵⁷ Muhammad Amin, *op.cit.*, . hlm 126

⁵⁸ *Ibid.* hlm 127

terhadap hukum yang telah ditentukan *far'*. Sebagai contoh, ketika nabi Muhammad Saw ditanya tentang status hukum mentega yang kejatuhan seekor tikus, beliau menjawab, “buanglah tikus itu berikut mentega yang ada disekitarnya (yang terkena tikus), kemudian sisanya silahkan anda makan”

Terhadap fatwa Nabi di atas, kata Ibnu Taimiyah, telah ada kesepakatan umat Islam bahwa ketentuan hukum tersebut tidak hanya dikhususkan terhadap mentega dan tikus tersebut, akan tetapi juga berlaku untuk hewan dan makanan lainnya. Kata Ibnu Taimiyah, itu sebabnya mayoritas ulama berpendapat bahwa najis mana pun yang jatuh ke dalam minyak-minyak (benda-benda padat) lainnya, seperti tikus yang jatuh ke dalam minyak samin atau kucing ke dalam mentega, maka ketentuan hukumnya sama dengan hukum mentega yang kejatuhan tikus. Oleh karena itu, sambung Ibnu Taimiyah, pendapat yang mengatakan fatwa Nabi saw di atas hanya berlaku untuk tikus dan mentega, tidak pada hewan dan makanan lain yang sejenis seperti pendapat sebagian ahli zhahir, itu merupakan pendapat yang salah. Karena, kata Ibnu Taimiyah berdalil, Nabi Saw tidak mengkhususkan hukum tersebut hanya pada tikus yang jatuh kepada mentega itu. Akan tetapi, karena waktu itu nabi saw kebetulan dimintai fatwa tentang kasus tikus tersebut, maka beliau pun memberikan fatwanya sesuai kasus yang ditanyakan.

Kedua, qiyas yang di dalamnya nash menetapkan hukum suatu masalah karena ada salah satu makna hikmah dari beberapa makna, dan makna tersebut terdapat pula pada sesuatu yang lain. Apabila ada salah satu atau beberapa dalil yang mendukung untuk menghubungkan persamaan makna *musytarak* yang ada

pada ashl dan far', maka itu pun tergolong ke dalam qiyas yang shahih. Dalam kalimat lain macam kedua dari *qiyas shahih* ialah ada kesamaan antara 'illat yang ada pada hukum ashl dengan 'illat yang ada pada hukum far'.⁵⁹

Sebagai misal, qiyas menunjukkan pada pengharaman setiap yang memabukkan (*muskir*) sebagai mana nash menunjukkan hal itu. Allah mengharamkan al-khamr, karena al-khamr itu dapat menimbulkan saling bermusuhan dan membenci di antara sesama manusia, serta menjadi penghalang untuk menunaikan shalat dan berdzikir kepada Allah. Maka (*hikmah*) semacam ini terdapat pula dalam minuman-minuman keraslainnya, sehingga tidak ada perbedaan antara minuman keras yang satu dengan minuman keras lainnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kedua macam qiyas diataslah yang digunakan para sahabat dan tabi'in dalam menetapkan hukum masalah-masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya secara pasti dalam al-Qur'an, al-hadis dan al-ijma'.

Lanjut Ibnu Taimiyah, qiyas al-shahih merupakan salah satu macam keadilan karena dapat menyamakan antara dua masalah yang serupa dan membedakan antara dua masalah yang berlainan. Dalalah qiyas al-shahih, akan selalu sesuai dengan dalalah nash. Dan oleh karena itu, setiap qiyas yang menyalahi dalalah nash itulah yang dinamakan qiyas al-fasid. Yaitu qiyas yang di dalamnya tidak terbukti padanan atau perbedaan 'illat hukumnya, atau ditemukan 'illat hukumnya tetapi bersamaan dengan itu ada sifat-sifat lain yang menghalangi kelangsungan hukum *far'* (cabang) kepada hukum ashl (dasar).⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid.* hlm 128

Diantara bentuk *qiyas al-fasid* (silogisme yang rancu) yang menyalahi dalalah nash ialah mengqiyaskan dua perkara yang masingmasing dihalalkan dan diharamkan oleh nash semacam qiyasnya orangorang yang menyamakan jual beli dengan riba dengan dasar sama-sama mencari keuntungan. Padahal, dengan tegas nash mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.

Sebagaiman para ahli *usul al-fiqh* yang lain, Ibnu Taimiyah berkeyakinan tidaklah mungkin ada nash yang tidak mengandung maslahat yang disyariatkan (*al maslahah al-masyru'ah*), karena maslahah masyru'ah itulah yang justru menjadi tali pengikat dalam persamaan atau membanding-bandingkan antara hukum masalah yang satu dengan masalah yang lain.⁶¹

Dalam masalah ini Ibnu Taimiyah secara langsung menjadikan Pemimpin adalah bayangan Allah di bumi, dengan arti bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi, dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah yang bersumberkan dari Tuhan.

Dalam lafad menunjukkan bahwasanya berkumpulnya umat itu menjadi hujjah, dan dalil hal tersebut bahwasanya Allah Swt telah memerintahkan untuk taat kepada pemimpin atas jalan yang pasti. Sebagian dari perintah taat kepada Allah harus menjaga jauh dari kesalahan.⁶²

Lafad menunjukkan bahwa Qiyas itu menjadi hujjah. Apabila kalian bertentangan dalam sesuatu yang hukumnya

⁶¹ *Ibid*

⁶² Muhammad Ar-Razzi Fakhrrur Razzi bin Dhiyauddin Umar, *op.cit* hlm 124

tidak disebut dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma' maka wajib mengembalikan hukum tersebut kepada hukum yang nyata yaitu qiyas.⁶³

Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang berpendapat tentang konsep

بناء الحكم على الحكمة Persis sama dengan gurunya (dalam hal ini Ibnu Taimiyah)

secara tegas menyatakan:

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد

*Artinya : “Maka sesungguhnya syariat itu dasar pembinaan dan asas-asasnya ialah didasarkan atas hikmah dan kemaslahatan umat manusia.”*⁶⁴

Sementara itu Ibnu Taimiyah dikenal sebagai salah seorang ahli ushul yang mengembangkan konsep pembentukan hukum atas dasar hikmah dalam teori qiyasnya

⁶³ *Ibid*, hlm 127

⁶⁴ Muhammad Abu Zaahrah, *op.cit* hlm 127

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Ibnu Taimiyah menggambarkan bahwa pemimpin zalim adalah pemimpin yang melakukan sebagian dosa, namun bukan menolak hukum Allah Swt, serta tidak bermaksud menggantikan hukum Allah Swt. adalah pemimpin yang melakukan sebagian dosa yang karenanya berhak secara mutlak disebut zalim seperti minum khamer, berzina atau mendera orang muslim tanpa adanya alasan yang benar dan jelas atau mengabaikan penetapan hukum yang berdasarkan syari'at Islam dalam suatu kejadian namun bukan menolak hukum Allah Swt. ada tiga kesimpulan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim diantaranya :

- a. Dalam dasar pemikiran Ibnu Taimiyah mengutamakan adanya suatu Negara atau pemerintahan karena Kemudlaratan-kemudlaratan itu tidak akan dapat dihindari, melainkan dengan adanya seseorang kepala Negara meskipun zalim Maka betapa penting adanya kepala Negara adalah suatu hal yang diharuskan (diwajibkan).

- b. Dalam sikap Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada sebuah pemerintahan muslim berlaku zalim, pada dasarnya sikap yang di lakukan Ibnu Taimiyah

mengambarkan kebijakan seorang pemimpin bukan melainkan sosok atau figure.

c. Dalam masalah hukum Ibnu Taimiyah menekankan pengingkaran dan pemberontakan dalam pemerintahan pemimpin zalim. Menurut Ibnu Taimiyah mengingkari imam hanya boleh apabila keputusan-keputusannya terang-terangan bertentangan dengan ketetapan yuridis yang berdasarkan teks-teks yang tegas di dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Akan tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk melawan nya selama ia melakukan shalat.

Dan dalam metode istinbath hukum Ibnu Taimiyah al-Qur'an, apabila tidak ditemukan dasar hukum terhadap suatu kasus, maka Ibnu Taimiyah beralih pada penggunaan al-hadis. Langkah selanjutnya, bila tidak ditemukan dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-hadis, maka Ibnu Taimiyah menggunakan dalam istinbath hukum. batasan qiyas pun sederhana. Namun, dalam prakteknya tidak banyak berbeda penggunaan metode Qiyas Ibnu Taimiyah dengan para ulama pada umumnya. Hanya saja Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang membolehkan penggunaan qiyas berdasarkan hikmah.

2. Mengenai relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penguasa zalim dengan konsep siyasah Islam menunjukan kenyataan adanya ajaran-ajaran politik yang terkandung dalam al-Qur'an adalah menciptakan manusia untuk *beramar ma'ruf* dan *nahi munkar* . oleh karena itu agama dan negara akan terjalin dengan baik dengan adanya pemerintahan. Karena kita ketahui manusia adalah makhluk sosial oleh karena itu butuh bantuan orang lain. Dan dengan hal itu harus adanya pemerintahan.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis ingin mengemukakan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi kita semua selaku umat Islam, antara lain :

1. Hendaknya kita dapat saling mendukung dan senantiasa saling mentaati segala undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebatas undang-undang itu tidak menyalahi (bertentangan) dengan ajaran Islam.
2. Kita harus berusaha menjalankan syari'at sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya.
3. Dalam menggali studi analisis pendapat Ibnu Taimiyah Terhadap penguasa zalim yang mengfokuskan pada kewajiban mendirikan pemerintah walaupun penguasa zalim.
4. Dalam menghadapi penguasa zalim maka kaum muslimin diharapkan tetap sabar dalam menghadapi penguasa yang zalim dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun juga.
5. Bagi para pembaca hendaknya didalam menjalankan syari'at Islam harus berhati-hati agar tidak dengan mudah dan cepat mengambil keputusan-keputusan yang cenderung tidak imbang yang kadang-kadang banyak menimbulkan kerugiann terhadap orang banyak, hendaknya kita sebagai orang Islam dalam memandang segala sesuatu yang didasarkan pada syari'at Islam dan jangan dipandang dari satu sisi aja yaitu "*sisi buruk atau sisi baiknya saja*".

C. Penutup

Dengan menghaturkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ilahi rabbi. Dengan segala rahmat dan taufiq-Nya, penulis dapat menyelesaikan naskah makalah komprehensif ini.

Usaha penulis untuk memberikan gambaran tentang tema yang dibahas sudah semaksimal mungkin. Tetapi sebagai manusia adalah hal yang niscaya apabila terdapat kesalahan dan keniscayaan untuk itu, penulis mengharapkan sumbang saran bagi perbaikan lebih lanjut.

Akhirnya, sebagai harapan sekaligus sugesti, semoga dengan terwujudnya tulisan ini dapat memberi manfaat yang banyak khususnya bagi diri penulis.

Semoga Allah Swt berkenan memberikan jalan terang kepada hamba-hamba-Nya yang mengabdikan kepada-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Fu'ad Muahammad *Al-Lu'lu' Wal-Marjan*, (Terjm, H. Salim Bahreisy), Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta : INIS, 1991.
- An-Nabhani, Taqiuddin *Nidhomul Hukmi Fi-Islam*, Terj. Moh. Magfur Wahid, "Sistem Pemerintahan Islam", Jatim: Al-Izzah, cet. 1 1997.
- Ali, Daud Muhammad, *Hukum Islam , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi Muhammad Teungku, "*Islam dan politik bernegara*", Semarang: Pustaka Rizki, Th 2002.
- Asmuni, Yusron M, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Aziz, Ghaffar Abdul, *Al-Islam Al-Siasi Baina Al-RAfidhina Lahu Al-Mughalina Fihi*, Terj. Pustak Firdaus " Islam politik, Pro Dan kontra, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- al Mandzur, Ibnu, *Lisan al Arab*, jilid 7 Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- Al-Azdi, Ishaq bin Asy'ats bin Sulaiman Daud Abu, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, cet. Ke 1, Mustafa al-babi al-Halabi wa auladihi, th 1952.
- Basyir, Azhar Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: PT. Mizan, Th, 1996.
- al-Bukhari, Mugirah bin Ibrahim bin Ismail bin Muhammad Abdillah Imam Abi *Sahih Bukhari*, Bairut : Dar al-kutub al-ilmiyah, Juz 8, "Kitab al-ahkam"
- Bosworth, E.C, *The Islamic Dynasties*, Terj . Ilyas Hasan, "Dinasti-dinasti Islam", Bandung: Mizan, Cet. Ke-1, 1993.
- Dahlan, Azis Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta : PT Intermasa, 1997.

Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*” ,Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama

dkk, Purwanto Ngalim, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara, 1984.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-4, 1994.

Fakhrur Razzi, Ar-Razzi Muhammad bin Dhiyauddin Umar, *Tafsir Fakhrur Razzi al-Tafsir kabir wa mafatihul Ghaib*, Jilid 4, Bairut: Darut Fikri, Cet.ke-1, 2005.

Fatkhurrahman, dan yahya Mukhtar, *dasar-dasar pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Fatwa.M.A, *Demokrasi Teitis Upaya merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, 2001.

Firdaus A.N. *Pedoman Islam dalam Bernegara*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Th, 1989.

Ghazali, Muchtar Adeng, *Pemikiran Islam Kontemporen Suatu Refleksi Keagamaan yang dialogis*, Bandung: Pustaka setia , 2005.

Ghufran A. Mas'adi (ed), *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : PT Intermasa, 1993, Cet Ke-1

Hasan, Ali , *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasjmy, A,”*Di mana letak Negara Islam*”,Surabaya:Bina Ilmu,1982.

Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Jakarta: Paramadina , 1999).

<http://kdi2.wordpress.com/2006/06/01/siapa-zalim>.

<http://hanifiah.multiply.com/journal/hem/2007/11/25/kaedah-dalam-memperbetulkan-pemerintah-penguasa>.

[http: // sauqiy.wordpress.com/2007/11/20/kapan-kewajiban-memerangi-penguasa-murtad](http://sauqiy.wordpress.com/2007/11/20/kapan-kewajiban-memerangi-penguasa-murtad).

- Hsubky, Badruddin *Delema Ulama dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: PT Gema Insani Press, 1995.
- Hillenbrand, Carole, *The Crusade Islamic Perspectives*, Terj. Heryadi "Perang Salib Sudut Pandang Islam", Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet.ke-1, 2005.
- Ishak, Muslim, *Sejarah dan Perkembangan Teologi Islam*, Semarang: Duta Grafika, 1988.
- Jeje Abdul Rajak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya : PT. Bina Ilmu. Th, 1999.
- Jindan, Ibrahim Khalid, *The IslamicTheory Of Goverment according To Ibnu Taimiyah*, Terj. Rineka Cipta " *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* ", Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, cet. Ke-7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Khaldun, Ibnu, *al Muqaddimat*, Beirut: Dar al Fikr,tt.
- Khallaf, Wahhab Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khan, Qamaruddin,, *The Political Thought Of Ibn Taimiyyah*, Terj. Anas Mahyuddin " *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah* ", Bandung: Cet.ke-1, 1983.
- Kastir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kastir*, jilid II, terj DR. Abdullah bin Abdurrahman bin Ishak alu Syaikh. Jakarta, pustaka Imam Syafii, 2006.
- Ma'arif, Syafi'I Ahmad ,*Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, Th, 1996.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1990.
- Mar'at, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996 .

- Munthahari, Murthada “*Imamah dan Khilafah*”, Terj, Satrio pinandito,”*Imamah dan Khilafah*”, Jakarta:CV.Firdaus,Cet-I, 1991.
- Musa, Yusuf M, *Politik dan Negara dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka SLI, 1991.
- Muslim, Imam *Shahih Muslim*, Beirut-Lebanon : Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah,t,th.
- Murzaki, M Harir“*Reinterpretasi Hukum Pidana Islam*” dalam *Cendikia Jurnal Kependudukan dan Kemasyarakatan, Ponorogo*: STAIN Ponorogo, Vol. 3, No. 2, 2005.
- Al-Maududi, A’al Abul *Khalifah dan Kerajaan*, Penerbit Mizan, Bandung, 1998.
- A’la Abu“*The Islamic law and Constitution*”, Terj, Drs. Asep Hikmat“*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung, Penerbit Mizan, 1995.
- , A’la Abu, *Sejarah Pembaharuan dan Kembali ke Alam Pikiran Agama*, Dep. RI. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkaamus Sulthaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyah*, Terj, Abd Hayyie al Kattani, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*”, Jakarta, Gema Insani Press. 2000 .
- Mansyur, Mustafa, *Tentang Kezaliman*, Jakarta: Gema Insani Press, Th 1990.
- Munawir, Imam, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*”, Yogyakarta:PP al munawwir, 1984.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992
- Nawawi, Hadari *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Th 1993.
- Nawawi, Imam, *Riadhul Shalihin*, Terj Salim Bahreisy, Bandung: PT. Al-Ma’arif. Tt.

- Al-anshari, Ahmad bin Muhammad Abdillah Abi *Jamiul Ahkamil Qur'an*, Bairut: Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami'al-Tirmidzi*, Bairut : Darut Fikr 1980.
- Purwadarna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka ,1982.
- Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*, cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Pulungan, J, Suyuthi *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet, ke- 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Pasha, Kamal Ahmad Musthofa ,Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Ideologis)*, Yogyakarta, LPPI, 2000.
- Rahman, Fazlur ,*Islam*, terjemahan Ahsin Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Rosyid, Abdul *Aqidah Akhlak* , Semarang, PT. Toha Putra, 2003.
- Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Raziq, Abdul ali, *al-Islam wa Ushul al-Hukum*, Al-Qahirah, Th 1925.
- Syafie Kencana Inu, *Al Qur'an dan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-1,1996.
- Salim, Arskal. M, *Etika Intervensi Negara Perspektif politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, Cet ke-1, 1999.
- Sjadzali, Munawir, “*Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran*”, Jakarta: Penerbit UI-Press, 1993.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet,ke 4, 1997 .
- Sevilla, G Consuelo ,dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993.
- Soehino, *Ilmu Negara*,Yogyakarta: Liberty, 1986.

Salim, Muin Abdul , *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Shihab, Quraish, *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, cet. Ke-8, 1998.

Syamsuddin, Din M, *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 2002 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Taimiyah, Ibnu , "*al-Siyasah al-Syar'iyah*", Daral-Kitab al-Arabi, Kairo .

----- "*Al-Siyasah Al-syar'iyah Fi Islahir Raa'i War Ra'iyah*", Terj. Rofi' Munawwar, "Siyasah Syari'ah Etika Politik Islam", Surabaya: Risalah Gusti, Cet. ke-1, 1995.

----- *Ash-Sharim Al-Maslul 'Ala Syatim Al-Rasul*, Beirut-Lebanon : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, t, th.

----- "*Al-Furqan Baina Auliya Al-Rahman Wa Auliya AL-Syaithan*," Terj. Pustaka Panjimas, "*Al-Furqan Antara Kekasih Allah Dan Kekasih Syaitan*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1989.

----- "*Tafsir Al-Kabir*", Jilid 1, Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t, th, hlm 37, lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah*, Juz 2, Beirut- Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1987.

----- "*Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*", Riyadh: al-Riyad al-Hadisati, jilid I, tt.

----- "*Majmu Fatawa*", Bairut: Darul Fikr 1920.

----- "*Tawasul Wal-Wasilah*", Terj. Halimuddin, Jakarta: Bumi Aksara.

----- "*Al-Amru bil Mu'ruf Wa an-Nahyi Anil Mungka*," Terjemahan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani, 1993.

Tholhah, Muhammad Hasan, "*Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*" Jakarta: Penerbit Lantabara Press, 2005.

Umar Abdurrahman, Umar, *Tipe-tipe Penguasa dan Statusnya dalam Islam*, Solo: CV. Pustaka Mantik, 1990.

Van Donzel, et. al. (eds), *First Encyclopadia of Muslim*, Vol. IV, Leiden: Brill, 1978.

www.islam-blogsome.co/islam/2005/12/10/penjara-Ibnu-Taimiyah

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya, 1989.

Zaahrah, Abu Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Pustaka Firdaus, “ *Ushul Fiqh* “, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Fu'ad Muahammad *Al-Lu'lu' Wal-Marjan*, (Terjm, H. Salim Bahreisy), Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta : INIS, 1991.
- An-Nabhani, Taqiuddin *Nidhomul Hukmi Fi-Islam*, Terj. Moh. Magfur Wahid, "Sistem Pemerintahan Islam", Jatim: Al-Izzah, cet. 1 1997.
- Ali, Daud Muhammad, *Hukum Islam , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi Muhammad Teungku, "*Islam dan politik bernegara*", Semarang: Pustaka Rizki, Th 2002.
- Asmuni, Yusron M, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Aziz, Ghaffar Abdul, *Al-Islam Al-Siasi Baina Al-RAfidhina Lahu Al-Mughalina Fihi*, Terj. Pustak Firdaus " Islam politik, Pro Dan kontra, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- al Mandzur, Ibnu, *Lisan al Arab*, jilid 7 Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- Al-Azdi, Ishaq bin Asy'ats bin Sulaiman Daud Abu, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, cet. Ke 1, Mustafa al-babi al-Halabi wa auladihi, th 1952.
- Basyir, Azhar Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: PT. Mizan, Th, 1996.
- al-Bukhari, Mugirah bin Ibrahim bin Ismail bin Muhammad Abdillah Imam Abi *Sahih Bukhari*, Bairut : Dar al-kutub al-ilmiyah, Juz 8, "Kitab al-ahkam"
- Bosworth, E.C, *The Islamic Dynasties*, Terj . Ilyas Hasan, "Dinasti-dinasti Islam", Bandung: Mizan, Cet. Ke-1, 1993.
- Dahlan, Azis Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta : PT Intermasa, 1997.

Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*” ,Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama

dkk, Purwanto Ngalim, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara, 1984.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-4, 1994.

Fakhrur Razzi, Ar-Razzi Muhammad bin Dhiyauddin Umar, *Tafsir Fakhrur Razzi al-Tafsir kabir wa mafatihul Ghaib*, Jilid 4, Bairut: Darut Fikri, Cet.ke-1, 2005.

Fatkhurrahman, dan yahya Mukhtar, *dasar-dasar pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Fatwa.M.A, *Demokrasi Teitis Upaya merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, 2001.

Firdaus A.N. *Pedoman Islam dalam Bernegara*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Th, 1989.

Ghazali, Muchtar Adeng, *Pemikiran Islam Kontemporen Suatu Refleksi Keagamaan yang dialogis*, Bandung: Pustaka setia , 2005.

Ghufran A. Mas'adi (ed), *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : PT Intermasa, 1993, Cet Ke-1

Hasan, Ali , *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasjmy, A,”*Di mana letak Negara Islam*”,Surabaya:Bina Ilmu,1982.

Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Jakarta: Paramadina , 1999).

<http://kdi2.wordpress.com/2006/06/01/siapa-zalim>.

<http://hanifiah.multiply.com/journal/hem/2007/11/25/kaedah-dalam-memperbetulkan-pemerintah-penguasa>.

<http://sauqiy.wordpress.com/2007/11/20/kapan-kewajiban-memerangi-penguasa-murtad>.

- Hsubky, Badruddin *Delema Ulama dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: PT Gema Insani Press, 1995.
- Hillenbrand, Carole, *The Crusade Islamic Perspectives*, Terj. Heryadi "Perang Salib Sudut Pandang Islam", Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet.ke-1, 2005.
- Ishak, Muslim, *Sejarah dan Perkembangan Teologi Islam*, Semarang: Duta Grafika, 1988.
- Jeje Abdul Rajak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya : PT. Bina Ilmu. Th, 1999.
- Jindan, Ibrahim Khalid, *The IslamicTheory Of Goverment according To Ibnu Taimiyah*, Terj. Rineka Cipta " *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* ", Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, cet. Ke-7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Khaldun, Ibnu, *al Muqaddimat*, Beirut: Dar al Fikr,tt.
- Khallaf, Wahhab Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khan, Qamaruddin,, *The Political Thought Of Ibn Taimiyyah*, Terj. Anas Mahyuddin " *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah* ", Bandung: Cet.ke-1, 1983.
- Kastir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kastir*, jilid II, terj DR. Abdullah bin Abdurrahman bin Ishak alu Syaikh. Jakarta, pustaka Imam Syafii, 2006.
- Ma'arif, Syafi'I Ahmad ,*Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, Th, 1996.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1990.
- Mar'at, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996 .

- Munthahari, Murthada “*Imamah dan Khilafah*”, Terj, Satrio pinandito,”*Imamah dan Khilafah*”, Jakarta:CV.Firdaus,Cet-I, 1991.
- Musa, Yusuf M, *Politik dan Negara dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka SLI, 1991.
- Muslim, Imam *Shahih Muslim*, Beirut-Lebanon : Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah,t,th.
- Murzaki, M Harir“*Reinterpretasi Hukum Pidana Islam*” dalam *Cendikia Jurnal Kependudukan dan Kemasyarakatan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 3, No. 2, 2005.
- Al-Maududi, A’al Abul *Khalifah dan Kerajaan*, Penerbit Mizan, Bandung, 1998.
- A’la Abu“*The Islamic law and Constitution*”, Terj, Drs. Asep Hikmat“*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung, Penerbit Mizan, 1995.
- , A’la Abu, *Sejarah Pembaharuan dan Kembali ke Alam Pikiran Agama*, Dep. RI. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkaamus Sulthaniyyah Wal Wilaayaatud Diniyah*, Terj, Abd Hayyie al Kattani, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*”, Jakarta, Gema Insani Press. 2000 .
- Mansyur, Mustafa, *Tentang Kezaliman*, Jakarta: Gema Insani Press, Th 1990.
- Munawir, Imam, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*”, Yogyakarta:PP al munawwir, 1984.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992
- Nawawi, Hadari *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Th 1993.
- Nawawi, Imam, *Riadhul Shalihin*, Terj Salim Bahreisy, Bandung: PT. Al-Ma’arif. Tt.

- Al-anshari, Ahmad bin Muhammad Abdillah Abi *Jamiul Ahkamil Qur'an*, Bairut: Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami'al-Tirmidzi*, Bairut : Darut Fikr 1980.
- Purwadarna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka ,1982.
- Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*, cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Pulungan, J, Suyuthi *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet, ke- 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Pasha, Kamal Ahmad Musthofa ,Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Ideologis)*, Yogyakarta, LPPI, 2000.
- Rahman, Fazlur ,*Islam*, terjemahan Ahsin Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Rosyid, Abdul *Aqidah Akhlak* , Semarang, PT. Toha Putra, 2003.
- Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Raziq, Abdul ali, *al-Islam wa Ushul al-Hukum*, Al-Qahirah, Th 1925.
- Syafie Kencana Inu, *Al Qur'an dan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-1,1996.
- Salim, Arskal. M, *Etika Intervensi Negara Perspektif politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, Cet ke-1, 1999.
- Sjadzali, Munawir, “*Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran*”, Jakarta: Penerbit UI-Press, 1993.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet,ke 4, 1997 .
- Sevilla, G Consuelo ,dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993.
- Soehino, *Ilmu Negara*,Yogyakarta: Liberty, 1986.

Salim, Muin Abdul , *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Shihab, Quraish, *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, cet. Ke-8, 1998.

Syamsuddin, Din M, *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 2002 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Taimiyah, Ibnu , "*al-Siyasah al-Syar'iyah*", Daral-Kitab al-Arabi, Kairo .

----- "*Al-Siyasah Al-syar'iyah Fi Islahir Raa'i War Ra'iyah*", Terj. Rofi' Munawwar, "Siyasah Syari'ah Etika Politik Islam", Surabaya: Risalah Gusti, Cet. ke-1, 1995.

----- *Ash-Sharim Al-Maslul 'Ala Syatim Al-Rasul*, Beirut-Lebanon : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, t, th.

----- "*Al-Furqan Baina Auliya Al-Rahman Wa Auliya AL-Syaithan*," Terj. Pustaka Panjimas, "*Al-Furqan Antara Kekasih Allah Dan Kekasih Syaitan*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1989.

----- "*Tafsir Al-Kabir*", Jilid 1, Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t, th, hlm 37, lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah*, Juz 2, Beirut- Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1987.

----- "*Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*", Riyadh: al-Riyad al-Hadisati, jilid I, tt.

----- "*Majmu Fatawa*", Bairut: Darul Fikr 1920.

----- "*Tawasul Wal-Wasilah*", Terj. Halimuddin, Jakarta: Bumi Aksara.

----- "*Al-Amru bil Mu'ruf Wa an-Nahyi Anil Mungka*," Terjemahan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani, 1993.

Tholhah, Muhammad Hasan, "*Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*" Jakarta: Penerbit Lantabara Press, 2005.

Umar Abdurrahman, Umar, *Tipe-tipe Penguasa dan Statusnya dalam Islam*, Solo: CV. Pustaka Mantik, 1990.

Van Donzel, et. al. (eds), *First Encyclopadia of Muslim*, Vol. IV, Leiden: Brill, 1978.

www.islam-blogsome.co/islam/2005/12/10/penjara-Ibnu-Taimiyah

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya, 1989.

Zaahrah, Abu Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Pustaka Firdaus, “ *Ushul Fiqh* “, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.